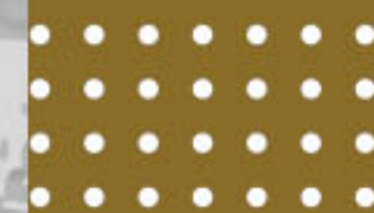


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT





PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Peta Pembinaan Provinsi Kalimantan Barat

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88512-6-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Septian Putri Palupi, S.Stat.
2. Adi Nugraha, S.Stat.
3. Arzad Sectio, S.IP, MPA.

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------|--|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR TABEL | |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------|---|
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MANFAAT | 2 |
| C. TUJUAN | 2 |
| D. RUANG LINGKUP | 3 |

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

| | |
|--------------------------------|----|
| A. KABUPATEN BENGKAYANG | 5 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 6 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 7 |
| B. KABUPATEN KAPUAS HULU | 12 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 12 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 13 |
| C. KABUPATEN KAYONG UTARA | 20 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 21 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 22 |
| D. KABUPATEN KETAPANG | 28 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 29 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 30 |
| E. KABUPATEN KUBU RAYA | 38 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 39 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 40 |
| F. KABUPATEN LANDAK | 47 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 47 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 48 |
| G. KABUPATEN MELAWI | 57 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 57 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 58 |
| H. KABUPATEN MEMPAWAH | 68 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 69 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 70 |
| I. KABUPATEN SAMPANG | 76 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 77 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 78 |
| J. KABUPATEN SANGGAU | 85 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 85 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 86 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| K. KABUPATEN SEKADAU | 93 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 93 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 94 |
| L. KABUPATEN SINTANG | 101 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 101 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 102 |
| M. KOTA PONTIANAK | 109 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 109 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 110 |
| M. KOTA SINGKAWANG | 118 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 118 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 119 |

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Bengkulu
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bengkulu
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kapuas Hulu
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kapuas Hulu
- Gambar 14. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kayong Utara
- Gambar 15. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kayong Utara
- Gambar 16. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Ketapang¹⁵
- Gambar 17. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Ketapang¹⁶
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Ketapang¹⁷
- Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Ketapang¹⁷
- Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Ketapang¹⁸

Gambar 21. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Ketapang

Gambar 22. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Ketapang

Gambar 23. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Ketapang

Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Ketapang

Gambar 25. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang

Gambar 26. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 27. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 28. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Kubu Raya

Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 32. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kubu Raya

Gambar 33. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 34. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kubu Raya

Gambar 36. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kubu Raya

Gambar 37. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 38. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Landak

Gambar 39. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Landak

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Landak

Gambar 41. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Landak

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Landak

Gambar 43. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Landak

Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Landak

Gambar 45. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Landak

Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Landak

Gambar 47. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Landak

Gambar 48. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 49. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Melawi

Gambar 50. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Melawi

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Melawi

Gambar 52. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Melawi

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Melawi

Gambar 54. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Melawi

Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Melawi

Gambar 56. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Melawi

Gambar 57. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Melawi

Gambar 58. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Melawi

Gambar 59. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 60. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mempawah

Gambar 61. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mempawah

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Mempawah

Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mempawah

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mempawah

Gambar 65. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mempawah

Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Mempawah

Gambar 67. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mempawah

Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mempawah

Gambar 69. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah

Gambar 70. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sambas

Gambar 71. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sambas

Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sambas

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sambas

Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sambas

Gambar 75. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sambas

Gambar 76. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sambas

Gambar 77. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sambas

Gambar 78. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sambas

Gambar 79. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 81. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sanggau

Gambar 82. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sanggau

Gambar 83. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sanggau

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sanggau

Gambar 85. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sanggau

Gambar 86. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sanggau

Gambar 87. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sanggau

Gambar 88. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sanggau

Gambar 89. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sanggau

Gambar 90. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau

Gambar 91. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 92. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sekadau

Gambar 93. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sekadau

Gambar 94. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sekadau

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sekadau

Gambar 96. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sekadau

Gambar 97. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sekadau

Gambar 98. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sekadau

Gambar 99. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sekadau

Gambar 100. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sekadau

Gambar 101. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sekadau

Gambar 102. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 103. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sintang

Gambar 104. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sintang

Gambar 105. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sintang

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sintang

Gambar 107. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sintang

Gambar 108. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sintang

Gambar 109. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sintang

Gambar 110. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sintang

Gambar 111. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sintang

Gambar 112. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sintang

Gambar 113. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 114. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Pontianak

Gambar 115. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pontianak

Gambar 116. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kota Pontianak

Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Pontianak

Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Pontianak

Gambar 119. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Pontianak

Gambar 120. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Pontianak

Gambar 121. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Pontianak

Gambar 122. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Pontianak

Gambar 123. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pontianak

Gambar 124. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 125. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Singkawang

Gambar 126. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Singkawang

Gambar 127. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kota Singkawang

Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Singkawang

Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Singkawang

Gambar 130. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Singkawang

Gambar 131. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Singkawang

Gambar 132. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Singkawang

Gambar 133. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Singkawang

Gambar 134. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Singkawang

Gambar 135. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Bengkayang beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Ketapang beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Kubu Raya beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Landak beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Melawi beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kabupaten Mempawah beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Sambas beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Sanggau beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kabupaten Sekadau beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Kabupaten Sintang beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Pontianak beserta Skor Kematangannya

Tabel 13 Daftar Inovasi Kota Singkawang beserta Skor Kematangannya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan menyinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan

inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

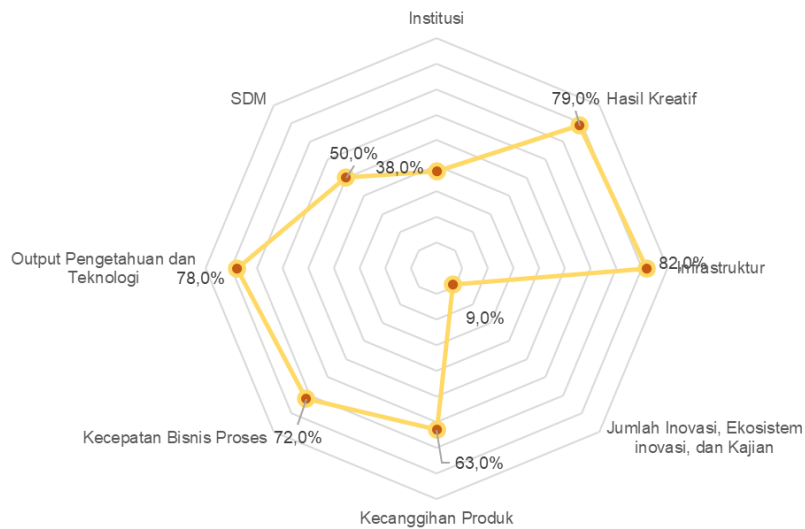
| ASPEK | VARIABEL | INDIKATOR |
|--------------|---|--|
| SPD | Institusi | Visi Misi |
| | | Tingkat Lembaga Kelitbangan |
| | | APBD Tepat Waktu |
| | | Kualitas Peningkatan Perizinan |
| | | Jumlah Pendapatan Perkapita |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| | | Jumlah Peningkatan Investasi |
| | | Jumlah Peningkatan PAD |
| | | Opini BPK |
| | | Nilai Capaian Lakip |
| | | Penurunan Angka Kemiskinan |
| | Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian | Jumlah Inovasi Daerah |
| | | Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi |
| Roadmap SiDA | | |
| SDM | Nilai IPM | |
| | Penghargaan Bagi Inovator | |
| SID | Hasil Kreatif | Kemanfaatan Inovasi |
| | | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | | Kualitas Inovasi Daerah |
| | Infrastruktur | Regulasi Inovasi Daerah |
| | | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | | Dukungan Anggaran |
| | | Penggunaan IT |
| | | Bimtek Inovasi |
| | | Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| | Kecanggihan Produk | Replikasi |
| | | Online Sistem |
| | | Kecepatan Inovasi |
| | Kecepatan Bisnis Proses | Pedoman Teknis |
| | | Kemudahan Informasi Layanan |
| | | Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| | | Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| | Output Pengetahuan | Jejaring Inovasi |

| ASPEK | VARIABEL | INDIKATOR |
|-------|---------------|----------------------------|
| | dan Teknologi | Pelaksana Inovasi Daerah |
| | | Keterlibatan aktor inovasi |
| | | Sosialisasi Inovasi Daerah |

BAB II

INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

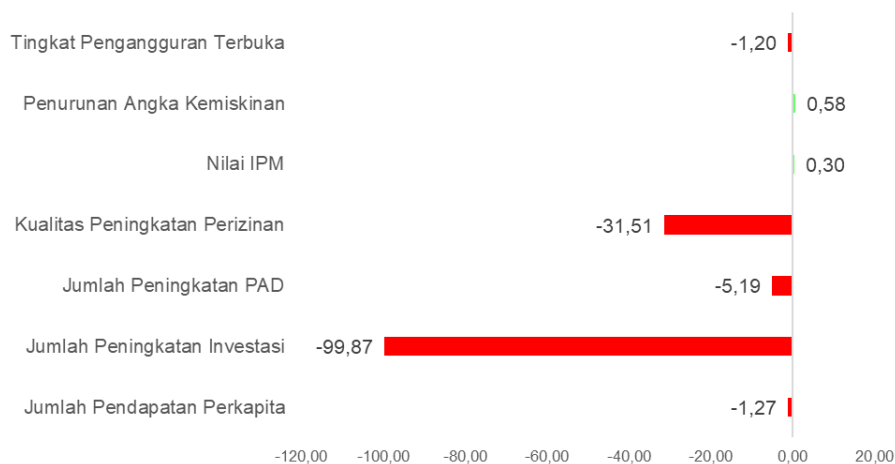
A. KABUPATEN BENGKAYANG



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bengkulu memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 82%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 9%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bengkulu

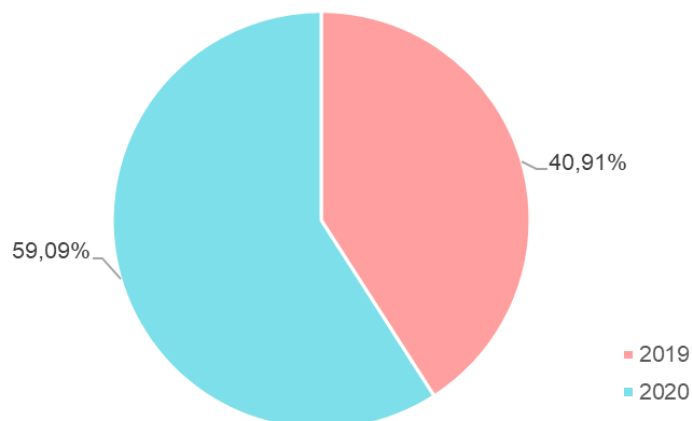
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bengkulu belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 5 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.20%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.20% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 31.51%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 31.51% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 5.19% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan yang besar, yaitu sebesar 99.87%. Perubahan keempat indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat hanya sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka, meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan, meningkat sebesar 8% bagi jumlah PAD, dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi. Sedangkan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 1.27% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun perubahan nilai indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun hingga 1.85%.

Dua indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Nilai IPM. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.58%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.58% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.3%. Perubahan kedua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, dan tetap bagi nilai IPM.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkayang telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 13 (59.09%) inovasi dari 22 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 9 (40.91%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

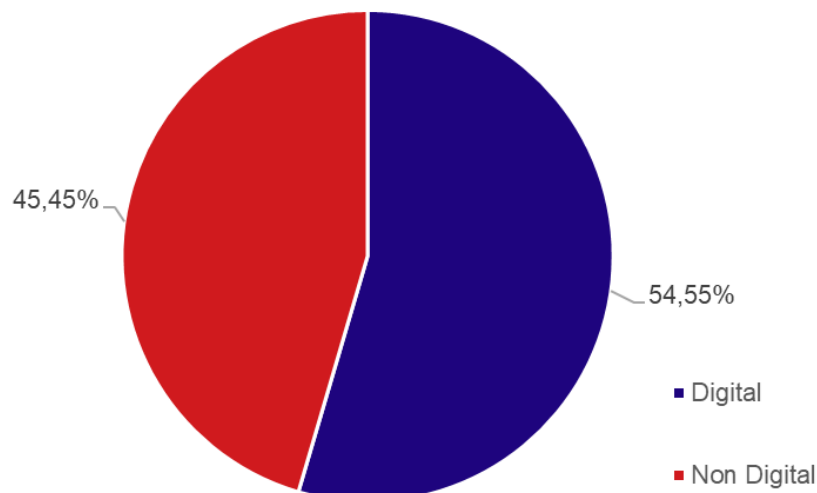
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkulu merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 11 (50%) inovasi dari total 22 inovasi. Sedangkan sejumlah 6 (27.27%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 5 (22.73%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

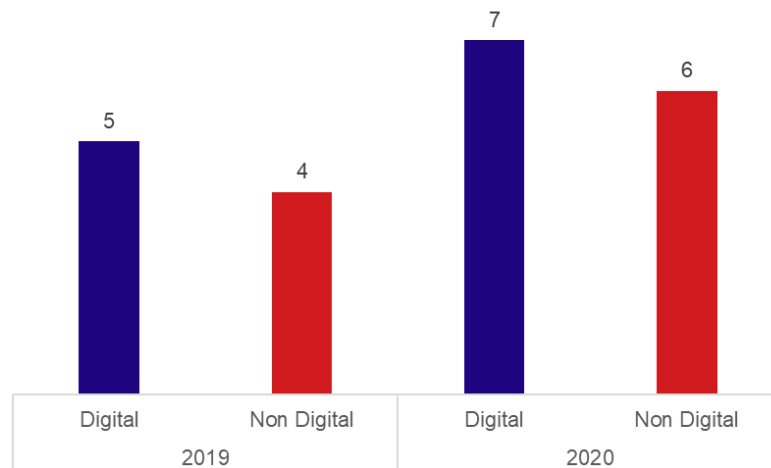
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bengkulu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 12 (54.55%) dari 22 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Bengkulu merupakan inovasi digital, dan 10 (45.45%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

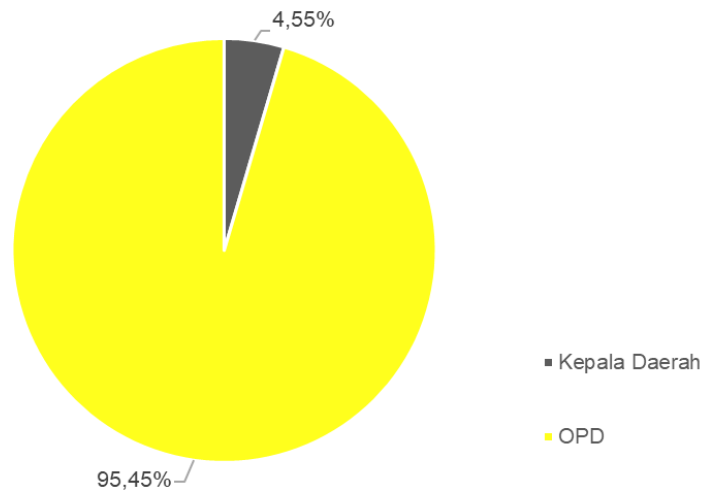
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bengkayang

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami kenaikan dari sejumlah 5 inovasi pada tahun 2019, menjadi 7 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami kenaikan dari 4 inovasi menjadi 6 inovasi.

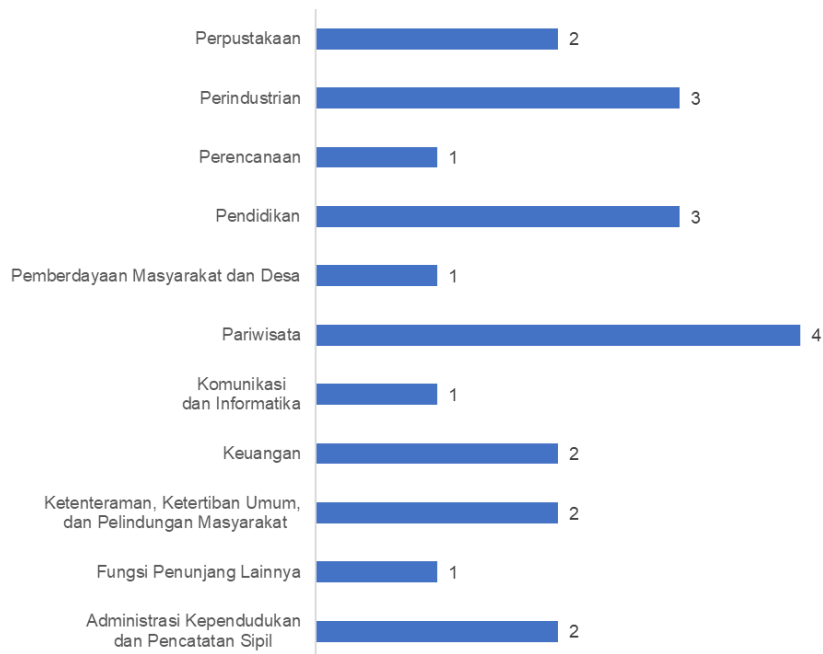
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bengkayang

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 21 (95.45%) inovasi. Sedangkan 1 (4.55%) inovasi lainnya diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan masyarakat.

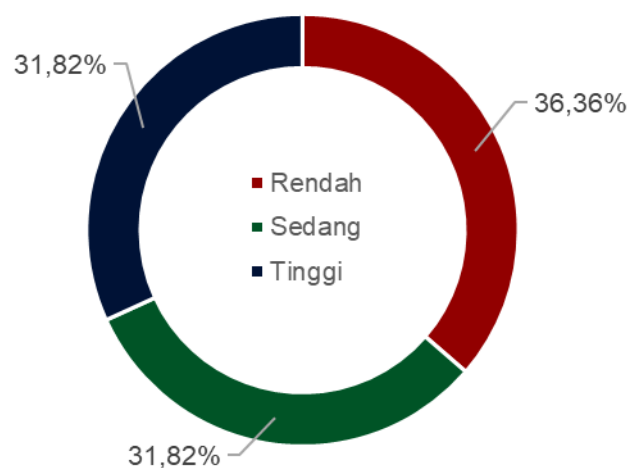
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bengkulu

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Bengkulu berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pariwisata dengan 4 inovasi dari 22 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 3 inovasi, dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 2 inovasi.

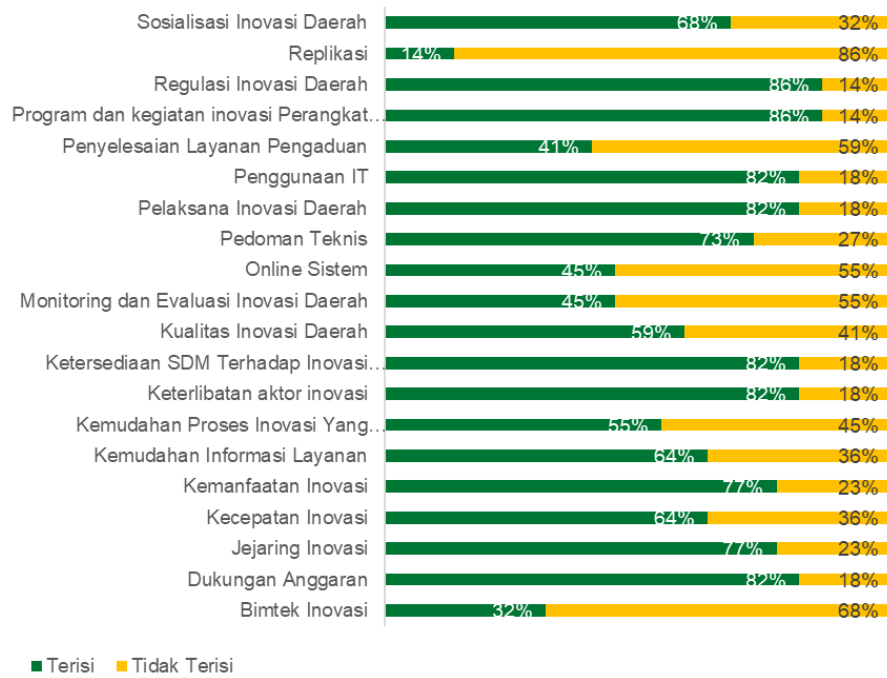
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bengkulu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 8 (36.36%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 7 (31.82%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 7 (31.82%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

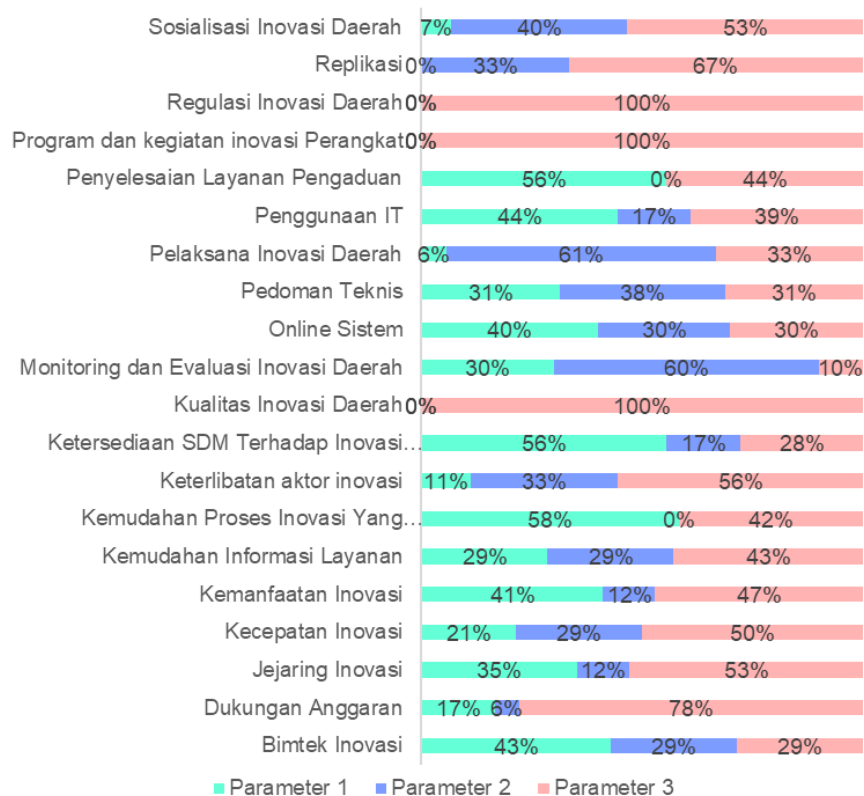


Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 64.77%, artinya dari 22 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 13 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 86%, yang berarti bahwa sebanyak 19 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 14%, yang berarti bahwa hanya 3 dari 22 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi daerah, indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah, dan indikator Kualitas Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, yaitu sebesar 61%, yang berarti bahwa sebanyak 61% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan yaitu sebesar 58% yang berarti bahwa sebanyak 58% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

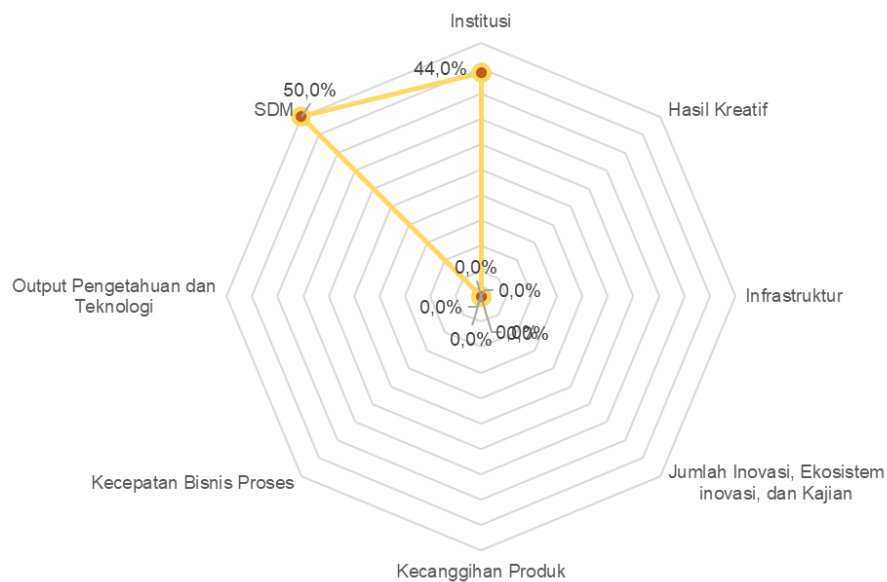
j. Daftar Inovasi Kabupaten Bengkulu beserta Skor Kematangannya

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Bengkulu beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Pembayaran Pajak Berbasis Online Kabupaten Bengkulu | 135 |
| Promosi berbasis Android (Bengkulu di Ujung Jarimu) | 125 |
| Layanan Informasi Publik Berbasis Website dan Media Sosial | 123 |
| PALING LAMUS DI SAPA (Pelayanan Pajak Keliling Menuju Masyarakat Sadar pajak) | 117 |

| | |
|--|-----|
| SIP IKM BKY | 111 |
| Updating Data dan Pengembangan Sistem Informasi Infrastruktur Berbasis Geospasial Kabupaten Bengkayang | 108 |
| Penetapan "Kampung Kreatif" Jagoi Kindau | 106 |
| RAPERDA TENTANG DESA WISATA | 99 |
| Jalur Baru Kapal Pesiar "Yatch" baru Sambas - Singkawang - Bengkayang - Mempawah - Pontianak - Kayong - Ketapang | 86 |
| ASOSIASI IKM BENGKAYANG MAJU | 86 |
| SENTRA KERAJINAN ROTAN TON SOWA | 83 |
| Desa Tangguh Bencana (DESTANA) | 70 |
| Klinik Desa | 65 |
| Kunang - Kunang | 50 |
| Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Politeknik Pariwisata Bali melalui pendidikan D-3 dan D-4 Pariwisata | 28 |
| Satu Desa Satu PAUD | 20 |
| i-Bengkayang | 18 |
| Rekrutmen Kepala Sekolah Yang Bermutu dan Visioner | 18 |
| M merger Beberapa Sekolah Yang Tidak Produktif | 18 |
| Pembentukan Tim Penegakan Perda "SIAGA" | 18 |
| Daftar Online (Dafon) | 0 |
| Tracking | 0 |

B. KABUPATEN KAPUAS HULU

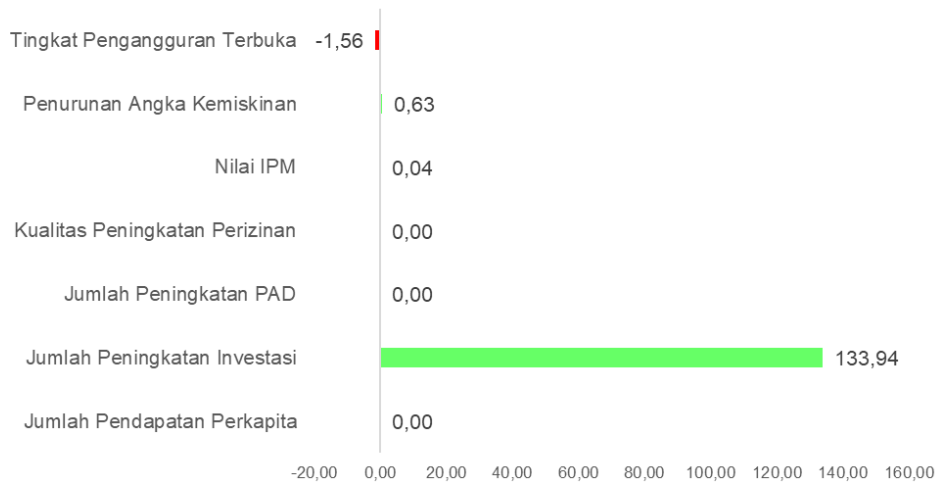


Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kapuas Hulu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki skor pada variabel SDM sebesar 50% dan pada variabel Institusi sebesar 44%. Artinya secara umum indikator-indikator pada kedua variabel tersebut memiliki skor yang berada pada

parameter 2. Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaporkan inovasi pada tahun 2021, sehingga tidak terdapat nilai pada variabel yang terkait dengan inovasi.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kapuas Hulu

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kapuas Hulu belum mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.56%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.56% dibandingkan tahun 2019. Perubahan ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik hanya sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka.

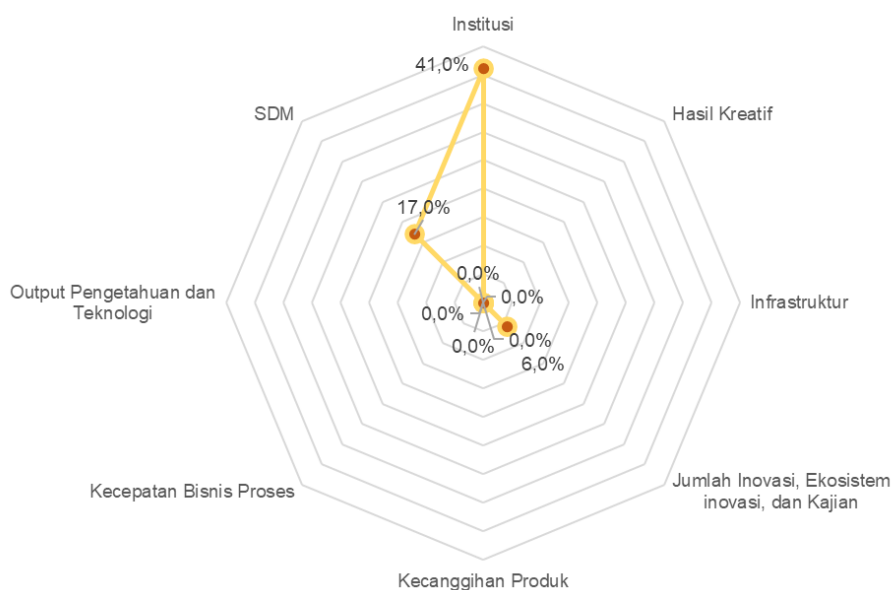
Terdapat tiga indikator Satuan Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan, yaitu indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, indikator Jumlah Peningkatan PAD, dan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita. Nilai indikator Kualitas Peningkatan Perizinan dan indikator Jumlah Peningkatan PAD yang tidak berubah ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat 5% bagi jumlah perizinan dan meningkat 8% bagi jumlah PAD. Sedangkan tidak berubahnya nilai indikator Jumlah Pendapatan Perkapita telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya justru turun sebesar 1.85%.

Tiga indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.63%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.63% dibandingkan tahun 2019. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.04%. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 133.94%. Perubahan ketiga indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun hanya sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, tetap bagi nilai IPM, dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2021, Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaporkan inovasi, sehingga tidak ada data yang ditampilkan.

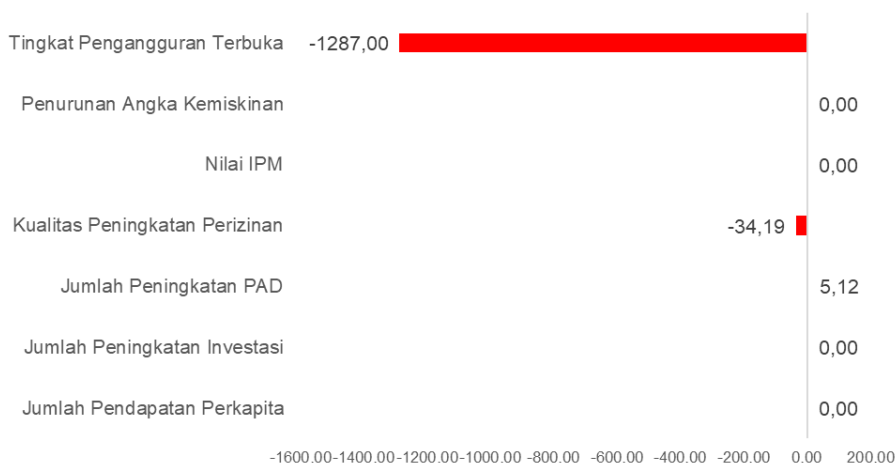
C. KABUPATEN KAYONG UTARA



Gambar 14. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kayong Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kayong Utara memiliki skor pada variabel SDM sebesar 17% dan pada variabel Institusi sebesar 41%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel SDM berada pada parameter 1, sedangkan indikator-indikator pada variabel Institusi berada pada parameter 2. Kabupaten Kayong Utara tidak melaporkan inovasi pada tahun 2021, sehingga tidak terdapat nilai pada variabel yang terkait dengan inovasi.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 15. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kayong Utara

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kayong Utara

belum mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1287%. Dikarenakan nilai ini sangat besar, dapat dikatakan bahwa data yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang diminta, sehingga nilai ini dapat diabaikan. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 34.19%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah perizinan turun sebesar 34.19% dibandingkan tahun 2019. Perubahan ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat 5% bagi jumlah perizinan.

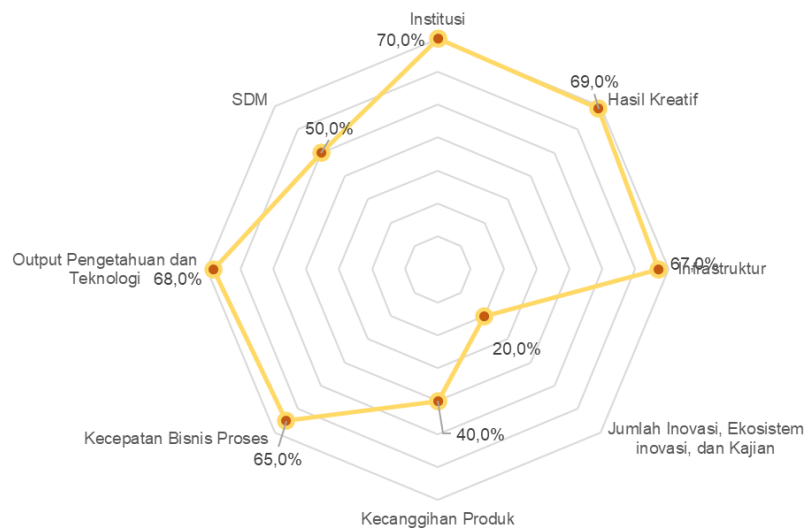
Indikator Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, Jumlah Peningkatan Investasi, dan Jumlah Pendapatan Perkapita tidak mengalami perubahan. Bagi nilai IPM dan jumlah pendapatan perkapita, hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM dan justru turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita. Sedangkan bagi dua indikator lainnya, hal tersebut belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin dan meningkat 0.45% bagi jumlah investasi.

Satu indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan sebesar 5.12% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat hingga 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2021 seluruhnya masih berada pada tahap inisiatif, sehingga tidak dapat dinilai.

D. KABUPATEN KETAPANG



Gambar 16. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Ketapang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Ketapang memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 70%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 20%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



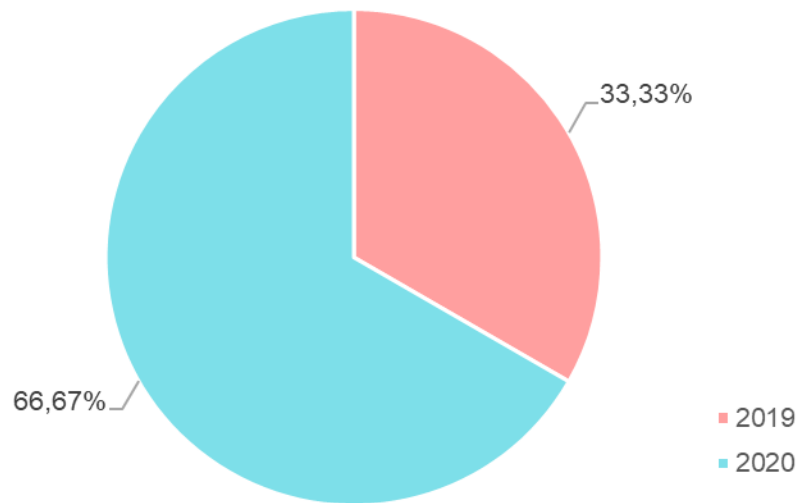
Gambar 17. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Ketapang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Ketapang belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih terdapat 4 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 2.77%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 2.77% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 23.38%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 23.38% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 2.76%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 143.76%, dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan keempat indikator ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik hanya sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka, meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan, meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi, dan menurun hanya sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita. Selain itu, indikator Nilai IPM tidak mengalami perubahan. Hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM.

Dua indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Jumlah Peningkatan PAD. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.20%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.20% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1726.8%. Perubahan kedua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, dan meningkat sebesar 8% bagi jumlah PAD.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Ketapang telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 26 (66.67%) inovasi dari 39 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 13 (33.33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

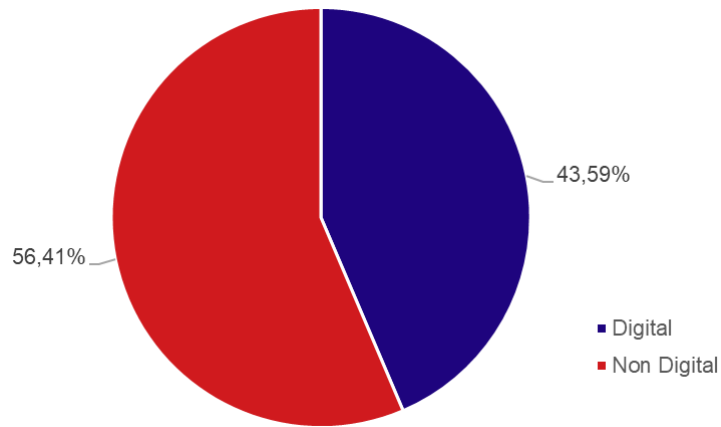


Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Ketapang

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Ketapang merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 20 (51.28%) inovasi dari total 39 inovasi. Sedangkan sejumlah 19 (48.72%) inovasi lainnya merupakan

inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belum ada inovasi tata kelola pemerintah daerah yang dilaporkan tahun 2021.

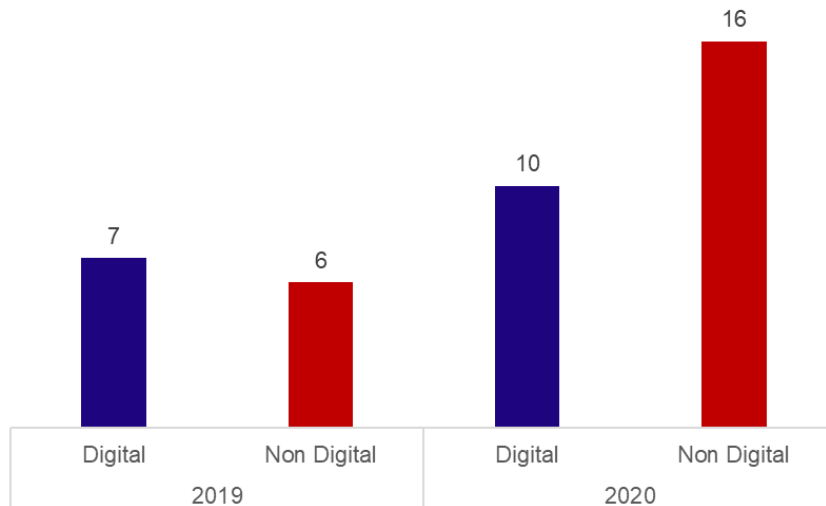
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Ketapang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 17 (43.59%) dari 39 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Ketapang merupakan inovasi digital, dan 22 (56.41%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

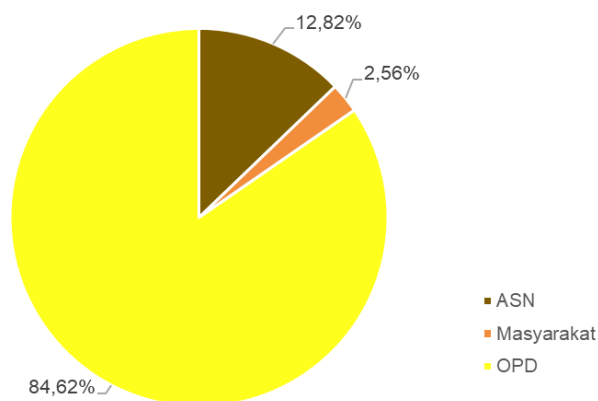
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 21. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Ketapang

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ketapang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami kenaikan dari sejumlah 7 inovasi pada tahun 2019, menjadi 10 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami kenaikan dari 6 inovasi menjadi 16 inovasi.

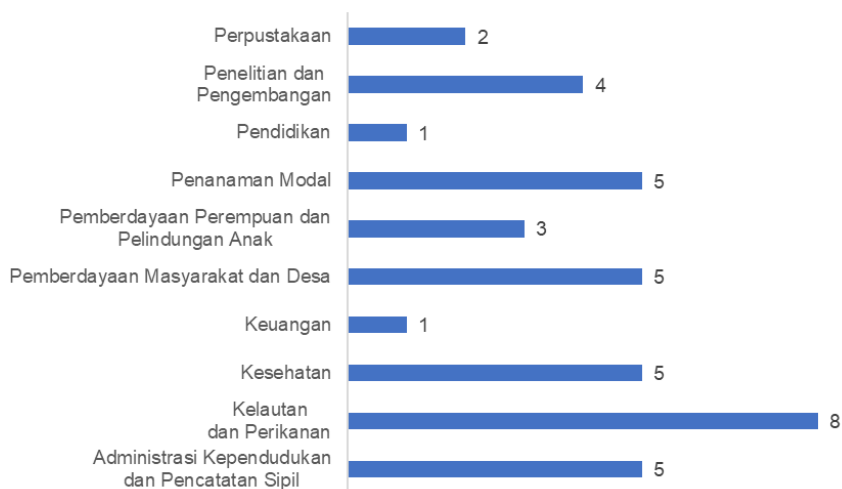
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 22. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Ketapang

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 33 (84.62%) inovasi. Sedangkan 5 (12.82%) inovasi diinisiasi oleh ASN, dan 1 (2.56%) inovasi lainnya diinisiasi oleh masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh kepala daerah dan DPRD.

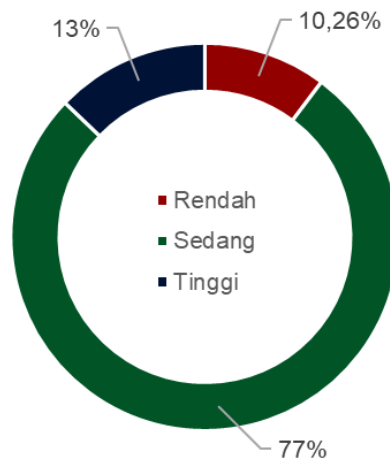
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 23. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Ketapang

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Ketapang berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kelautan dan perikanan dengan 8 inovasi dari 39 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi, dan kesehatan dengan 5 inovasi.

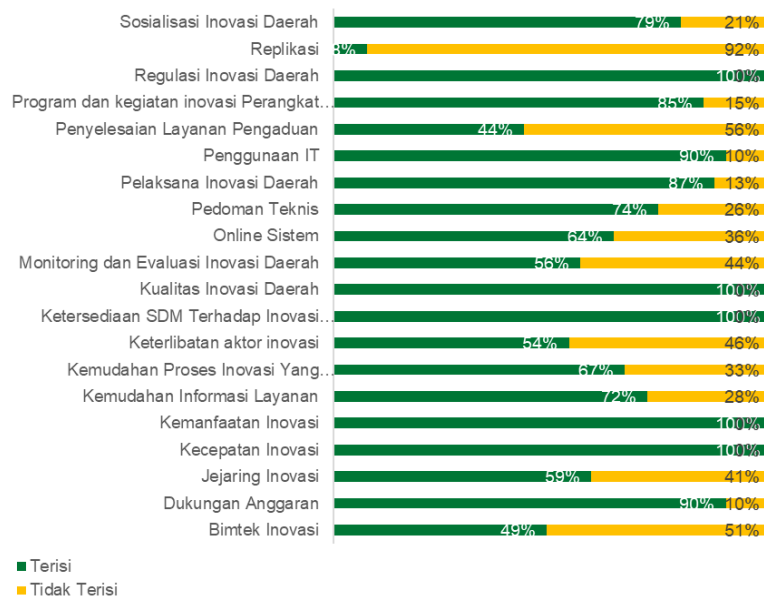
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Ketapang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 4 (10.26%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 30 (77%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 5 (13%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

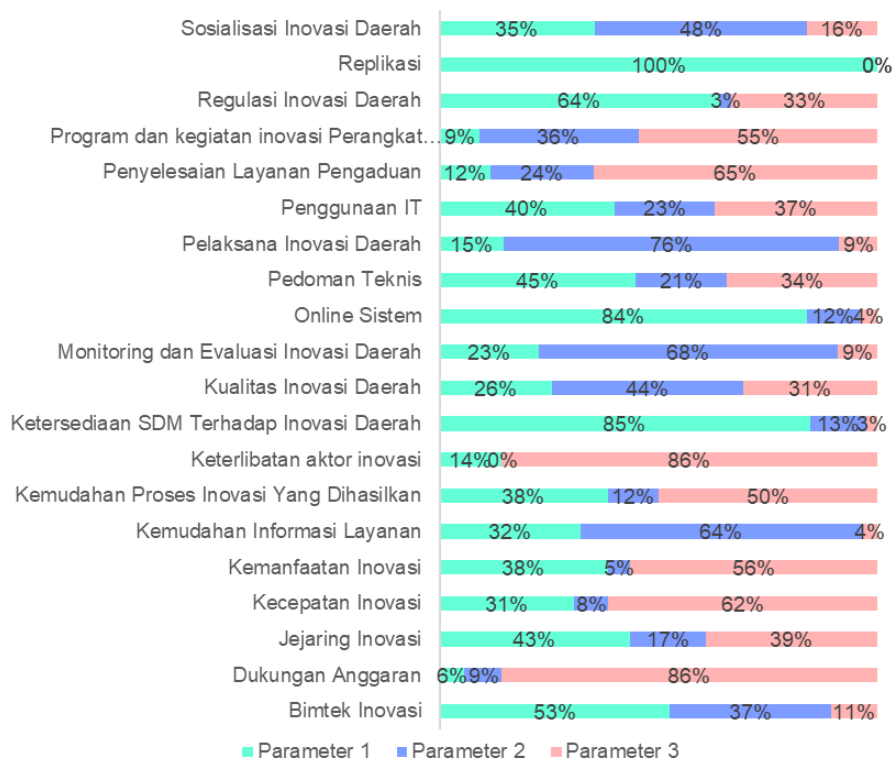


Gambar 25. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 73.85%, artinya dari 39 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Ketapang rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 15 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ketapang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 8%, yang berarti bahwa hanya 3 dari 39 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 26. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi dan indikator Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 86%, yang berarti bahwa sebanyak 86% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, yaitu sebesar 76%, yang berarti bahwa sebanyak 76% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi

yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

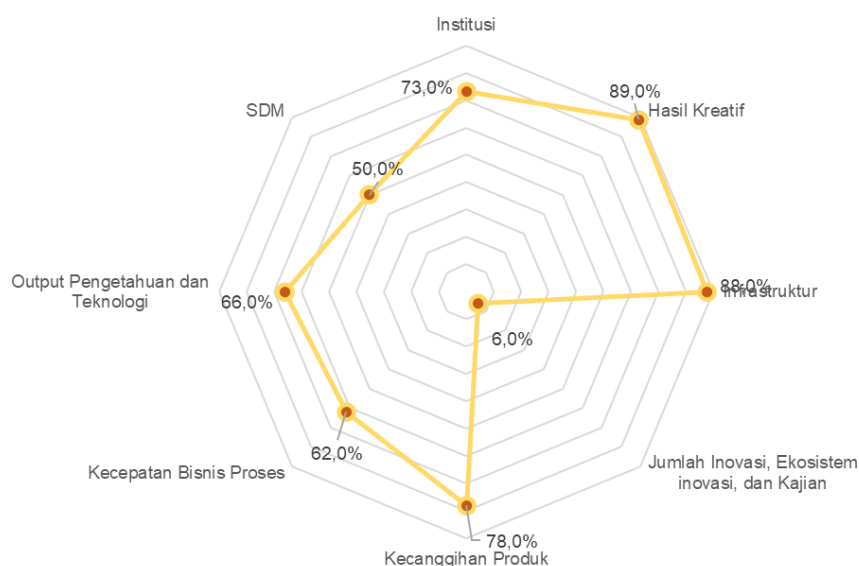
j. **Daftar Inovasi Kabupaten Ketapang beserta Skor Kematangannya**

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Ketapang beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|------------------------|
| SEJITU (SEMUA JADI SATU) | 129 |
| BERLEPI (Berkas Lengkap Sehari Pasti Jadi) | 117 |
| JEBOL (Jemput Bola) | 117 |
| AKTA CAPIL : Akuntabilitas dan Kualitas tetap ada di Pelayanan Pencatatan Sipil | 117 |
| Pedak Pari (Pelayanan Dakkan Henti Meski Pandemi Menghampiri) | 111 |
| PENDAFTARAN PASIEN MELALUI SMS/ WHATSAPP (PEPES) | 99 |
| LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI MASA PANDEMI COVID-19 (LIMA) | 99 |
| PELAYANAN ONLINE PASIEN CORONA VIRUS DISEASE-19 (POPCORN) | 97 |
| KETAPANG BERANAK DAPAT LANGSUNG AKTE LAHER (KETAPANG BETUAH) | 95 |
| SIMPADA dengan singkatan Sistem Informasi Pajak Daerah. | 95 |
| MAPODA (Majalah Potensi Daerah Kabupaten Ketapang) | 94 |
| Gambar Begerak (Video Promosi Potensi Daerah Kabupaten Ketapang) | 92 |
| Risi Datang (Galleri Foto Potensi Daerah Kabupaten Ketapang) | 91 |
| Pojok Konsultasi dan Pustaka Perikanan (Pos-Ikan) | 85 |
| Kursus Bahasa Inggris | 84 |
| Ketapang Creating Future | 83 |
| Pemantauan Harga Pangan Pokok (PHP2) | 77 |
| Pengelolaan Sistem Informasi Database Kelitbangan Ketapang (DALIKA) | 76 |
| BI ADES (PEMBINAAN PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA) | 75 |
| Pustaka Cafe | 75 |
| Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (PUGER) | 74 |
| Bercocok Tanam di Pekarangan (BeTaPe) | 73 |
| Peningkatan Kebijakan Dan Perlindungan Anak Melalui Pengembangan Kota Layak Anak (PEKOLA) | 73 |
| Inventarisasi, Konsultasi dan Asistensi Bentuk-bentuk Layanan Inovasi Daerah Ketapang (IKAN BELIDAK) | 72 |
| Sistim Pertingan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (SIP- Epdes/ Kel) | 67 |
| EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA MELALUI SISTEM INFORMASI EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA (SIVAKLARA – DESA) | 66 |
| FAPE (Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan) | 65 |

| | |
|--|----|
| TBM (Taman Baca Masyarakat) Insan Cita | 60 |
| Sistem Informasi Kelompok Pembudidaya Ikan (SIMFOKDAKAN) | 58 |
| APBDes AWARD | 53 |
| Sistem Pelayanan Statistik Perikanan (STEMPEL IKAN) | 53 |
| Pemberian Penghargaan Kepada Bumdes Terbaik Tingkat Kabupaten Ketapang (BUTER) | 53 |
| Sistem Informasi Persuratan Elektronik (SI PERNIK) | 52 |
| Pelayanan Pekan Interaksi | 50 |
| Olahan Pangan Lokal (OPaK) | 50 |
| Sistem Pelayanan Rekomendasi BBM (SIKOMEN BBM) | 48 |
| Pembentukan Kader JUMANTUK (Juru Pemantau Batuk) | 45 |
| Pelayanan Data Asuransi Nelayan (PEDA ASIN) | 43 |
| Sistem Informasi Spasial Ketapang (SISKa) | 40 |

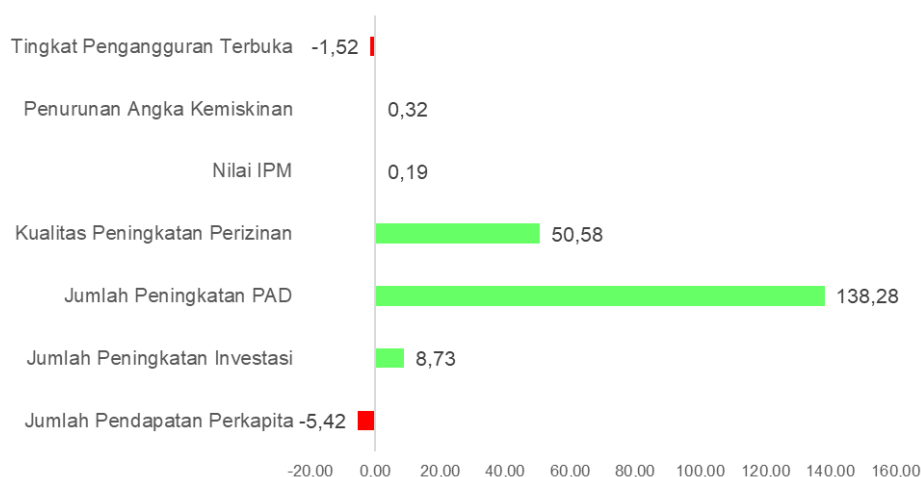
E. KABUPATEN KUBU RAYA



Gambar 27. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kubu Raya memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 89%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yaitu sebesar 6%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



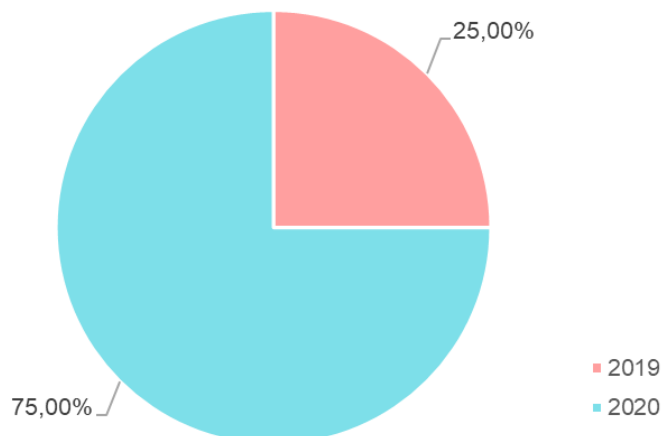
Gambar 28. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kubu Raya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kubu Raya telah cukup mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun masih terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.52%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.52% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 5.42%. Perubahan kedua indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik hanya sebesar 0.92% bagi tingkat pengangguran terbuka dan turun hanya sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

Lima indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.32%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.32% dibandingkan tahun 2019. Indikator Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.19%. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 50.58%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 50.58% dibandingkan tahun lalu. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 138.28%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 8.73%. Perubahan kelima indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun hanya sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, tetap bagi nilai IPM, meningkat hanya sebesar 5% bagi jumlah perizinan, meningkat sebesar 8% bagi jumlah PAD, dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

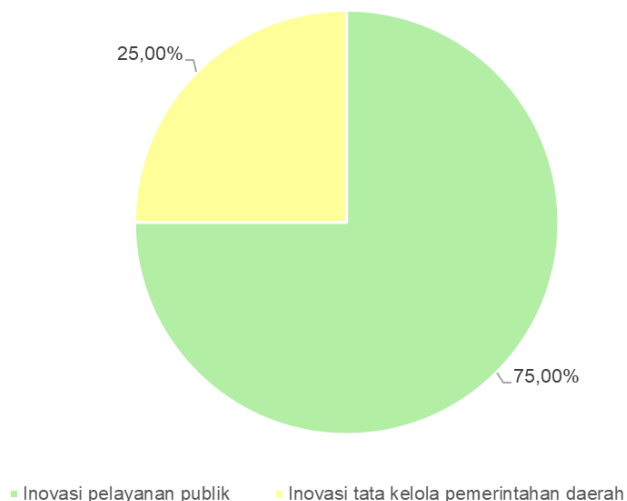
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 3 (75%) inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 1 (25%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

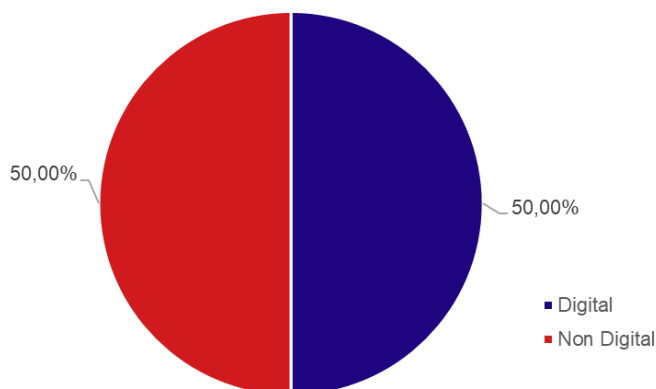
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 3 (75%) inovasi dari total 4 inovasi. Sedangkan sejumlah 1 (25%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah. Belum ada inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaporkan tahun 2021.

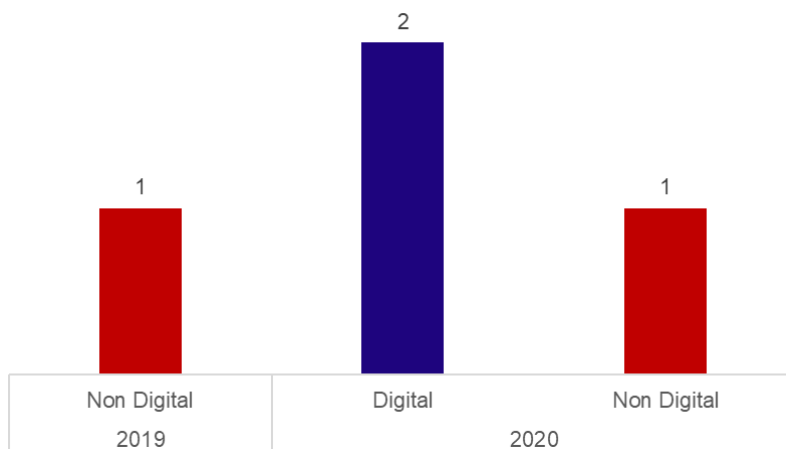
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kubu Raya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (50%) dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kubu Raya merupakan inovasi digital, dan 2 (50%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

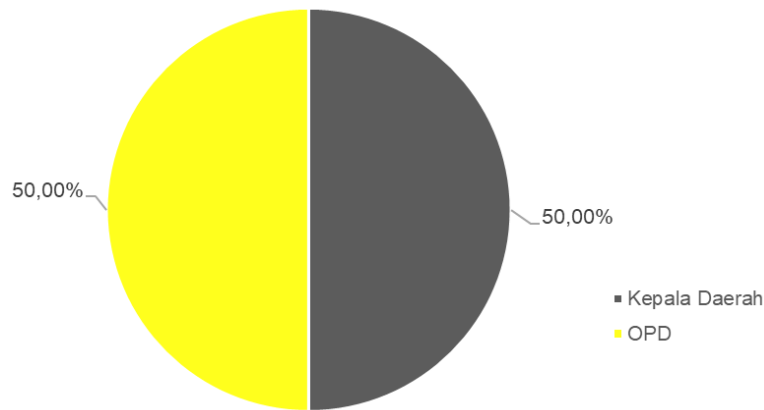
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 32. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kubu Raya

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi digital, namun tidak mengalami perubahan pada inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami kenaikan dari tidak ada inovasi pada tahun 2019, menjadi 1 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital tidak mengalami kenaikan dari 1 inovasi.

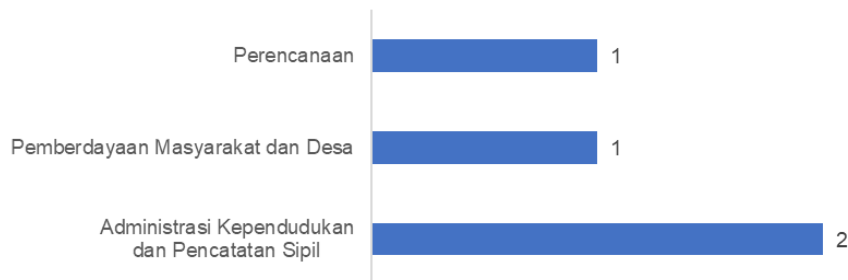
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 33. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kubu Raya

Sebanyak 2 (50%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 diinisiasi oleh kepala daerah, dan 2 (50%) inovasi lainnya diinisiasi oleh perangkat daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh kepala daerah, DPRD, dan masyarakat.

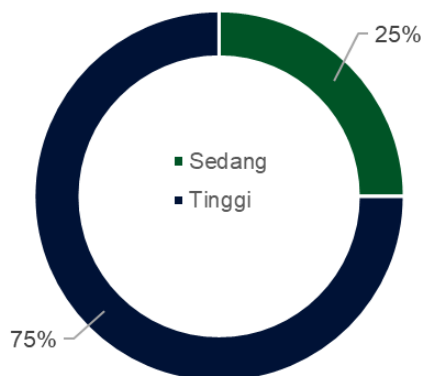
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 34. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kubu Raya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kubu Raya berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 2 inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021.

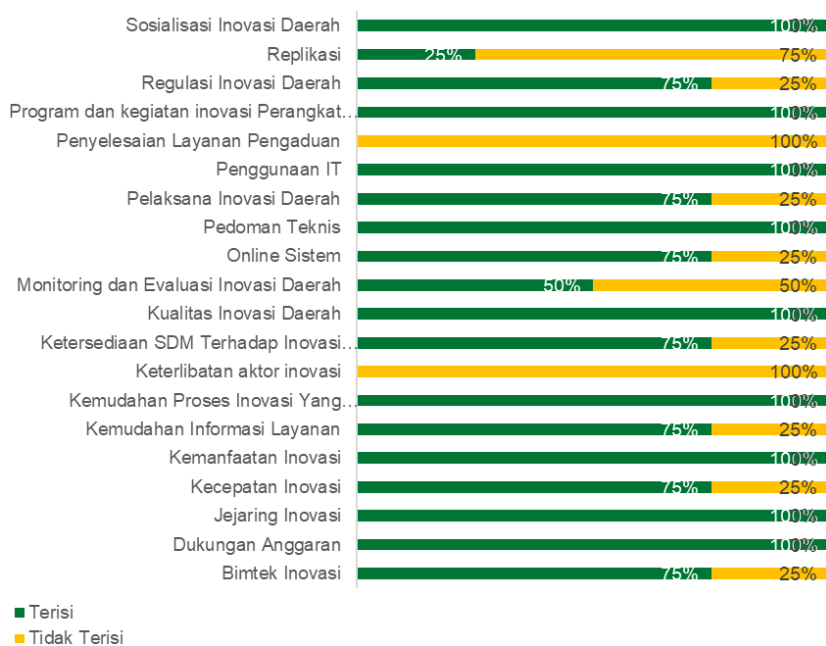
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kubu Raya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 1 (25%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 3 (75%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Belum terdapat inovasi yang dilaporkan pada tahun 2021 yang termasuk dalam kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

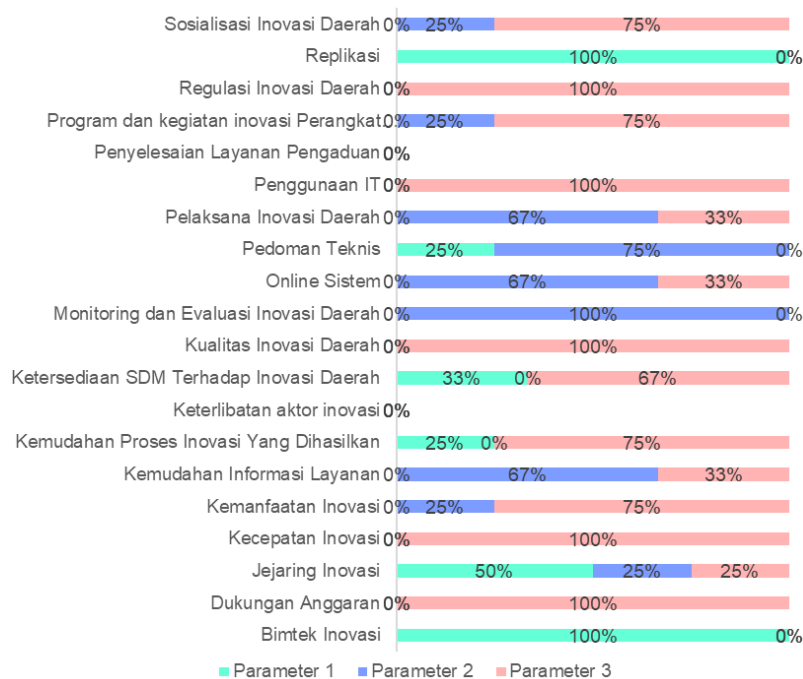


Gambar 36. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 75%, artinya dari 4 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 15 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah, indikator Penggunaan IT, indikator Pedoman Teknis, indikator Kualitas Inovasi Daerah, indikator Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, indikator Kemanfaatan Inovasi, indikator Jejaring Inovasi, dan indikator Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kubu Raya telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan indikator Keterlibatan Aktor Inovasi, yaitu 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan indikator Keterlibatan Aktor Inovasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 37. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi daerah, indikator Penggunaan IT, indikator Kualitas Inovasi Daerah, indikator Kecepatan Inovasi, dan indikator Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi

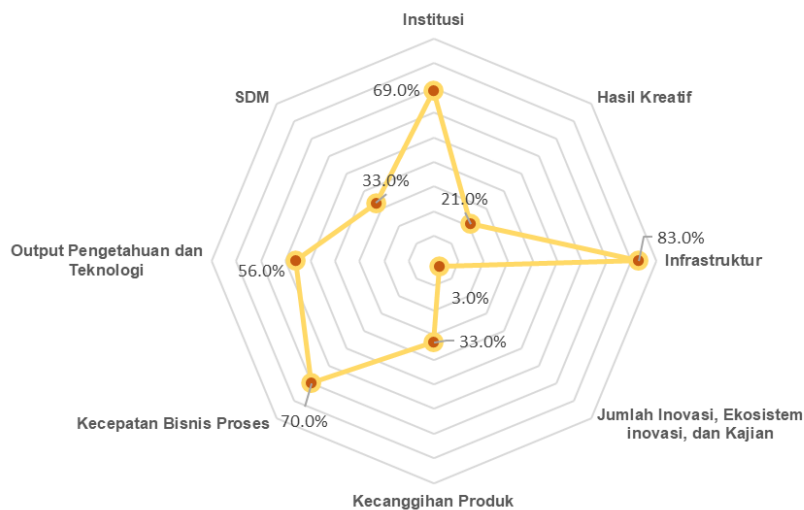
data pendukung pada indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan indikator Bimtek Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kubu Raya beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Kubu Raya beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| GEOPORTAL DAN WEBGIS KEPONG BAKOL (KUBU RAYA BERBASIS DATA GEOSPASIAL) | 113 |
| Selesai Dalam Sehari Terintegrasi (SELEDRI TERINTEGRASI) | 108 |
| Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi SIAK (PANTAS) | 108 |
| Inovasi Transaksi Non Tunai Desa Melalui Aplikasi CMS Desa | 82 |

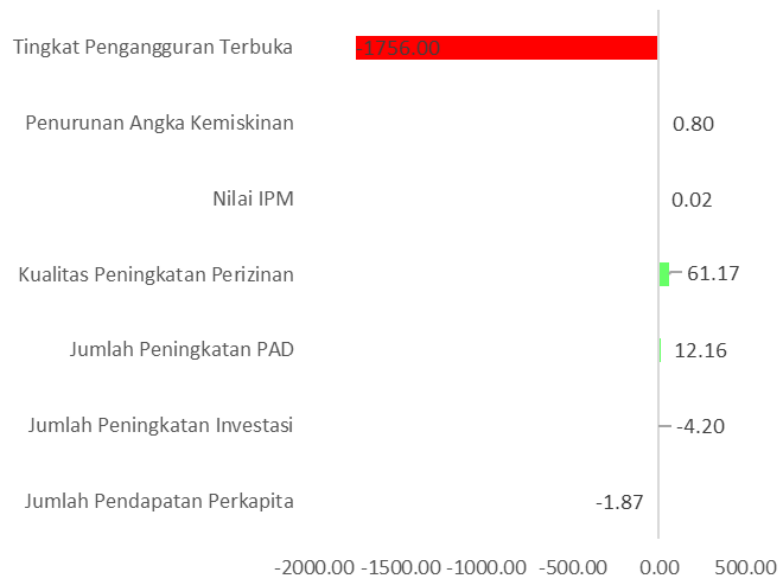
F. KABUPATEN LANDAK



Gambar 38. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Landak

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Landak memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 83%. Artinya 83% indikator-indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 3%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



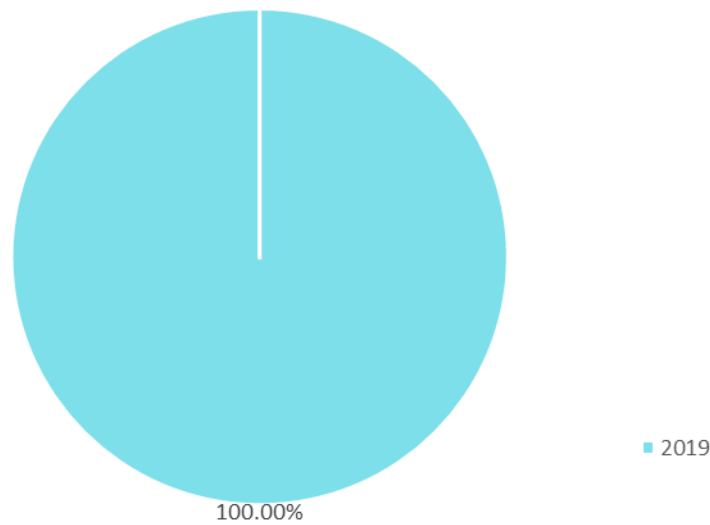
Gambar 39. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Landak

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Landak belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1756%. Dikarenakan nilai perubahan ini sangat besar dan lebih dari 100%, data yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang diminta sehingga dapat diabaikan. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4.20%, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 1.87% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.80%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.80% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.02%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan signifikan sebesar 61.17%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 61.17% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang juga meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 12.16% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

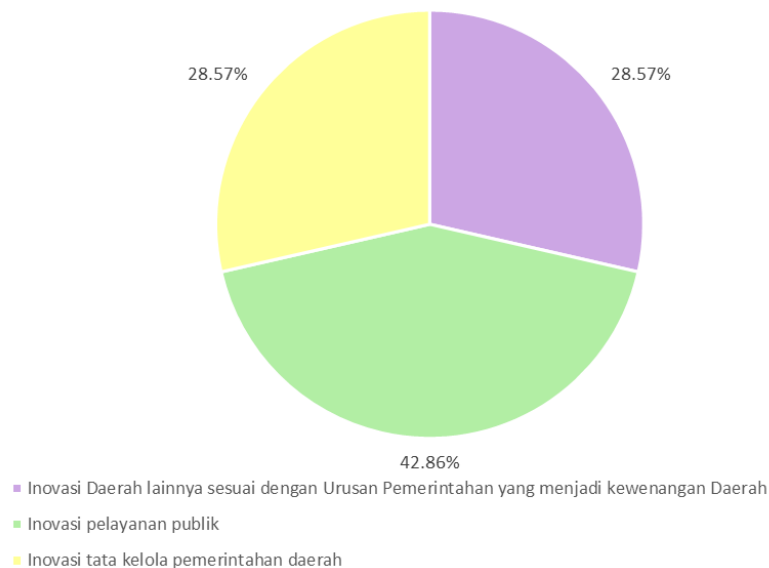
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Landak

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Landak telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 7 (100%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019, tidak ada inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

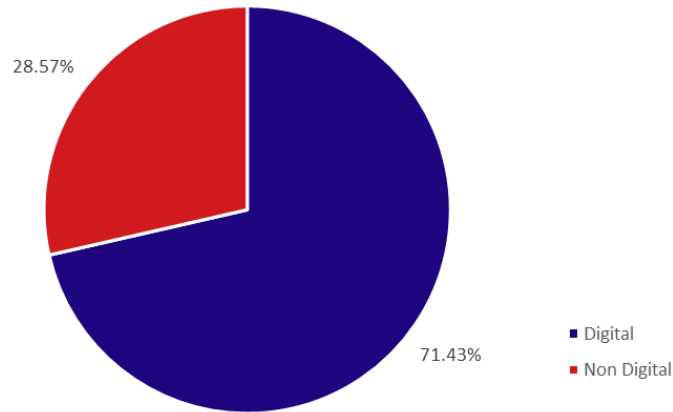


Gambar 41. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Landak

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Landak merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 3 (42.86%) inovasi

dari total 7 inovasi. Sedangkan 2 (28.57%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

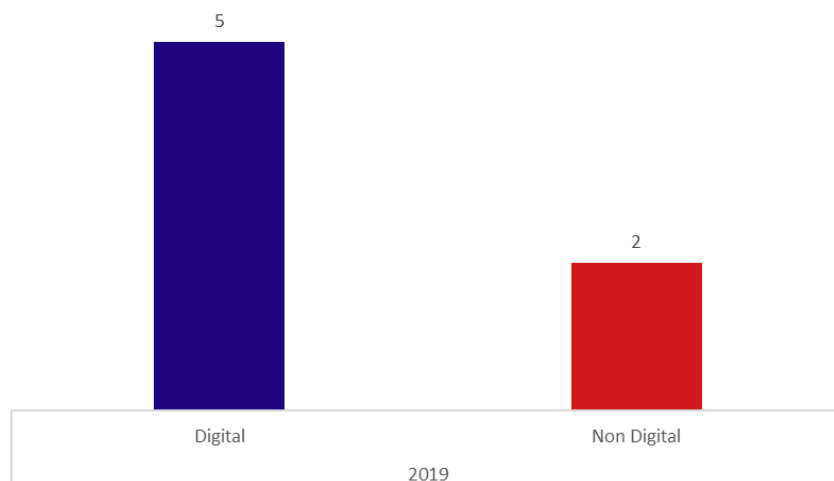
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Landak

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (71.43%) dari 7 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Landak merupakan inovasi digital, dan 2 (28.57%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

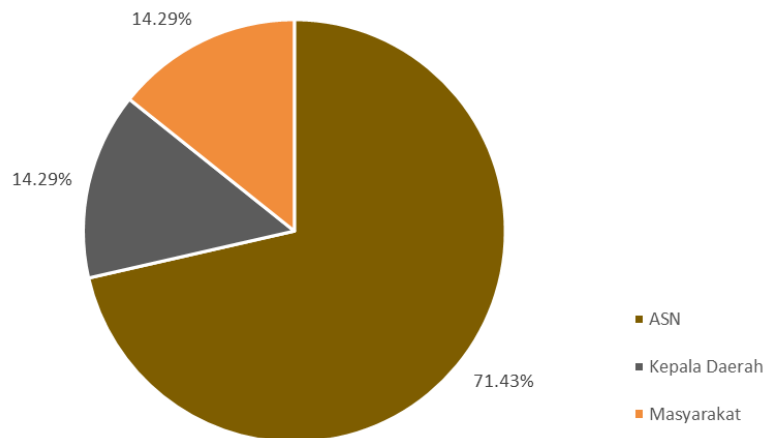
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 43. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Landak

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Landak mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari sejumlah 5 inovasi pada tahun 2019, menjadi tidak ada inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan dari 2 inovasi menjadi tidak ada inovasi.

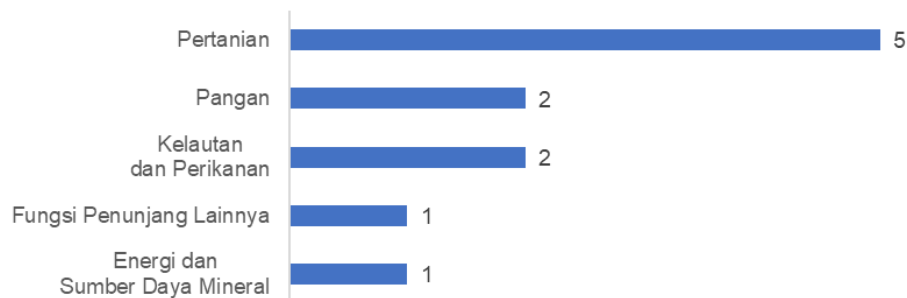
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 44. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Landak

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Landak pada tahun 2021 diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu sejumlah 5 (71.43%) inovasi, sedangkan lainnya sejumlah 1 (14.29%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan OPD.

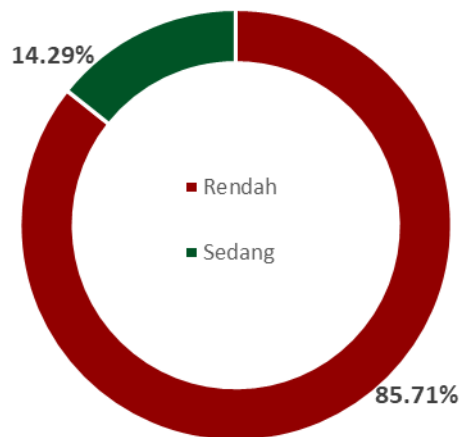
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 45. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Landak

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Landak berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pertanian dengan 5 inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan, urusan sosial, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pendidikan, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pekerjaan umum.

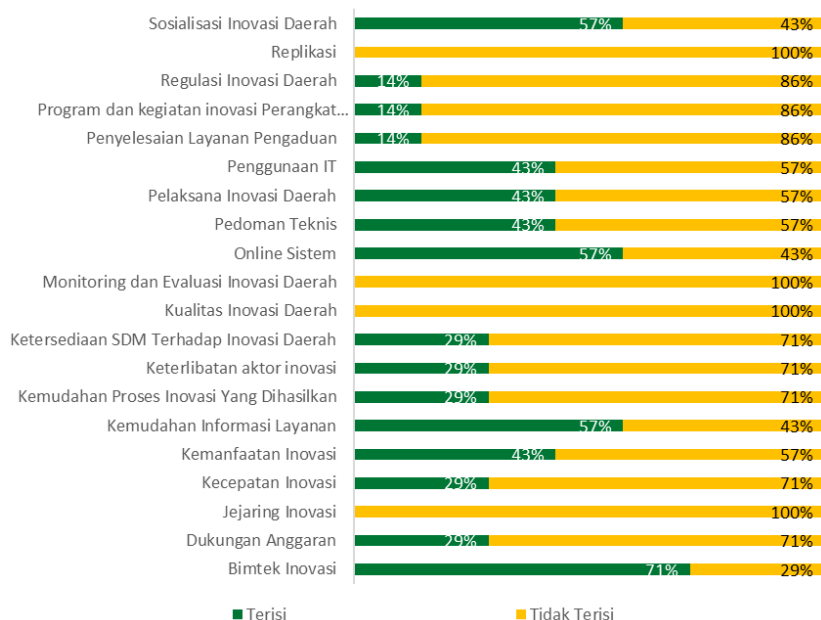
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Landak

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 6 (85.71%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan 1 (14.29%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

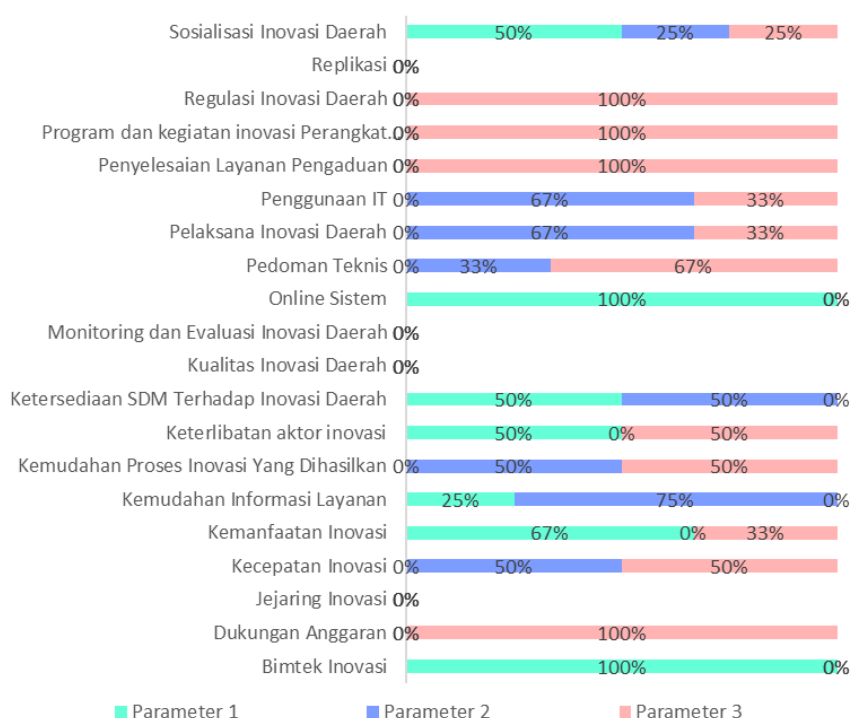


Gambar 47. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Landak

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 30.00%, artinya dari 7 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Landak rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 6 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi dengan tingkat keterisian sebesar 71%, yang berarti bahwa 71% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Landak telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 48. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

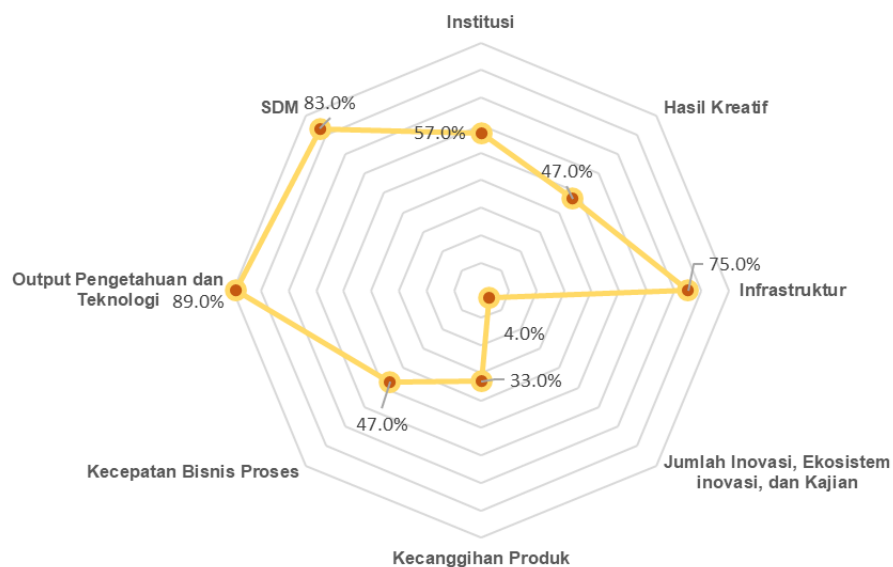
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan, yaitu sebesar 75%, yang berarti bahwa 75% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Landak beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Landak beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Sistem Informasi Penyampaian Data Lelang (SIPEDAL) | 69 |
| Kompur Merahputih Nusantara (KMN) | 29 |
| Layanan e-Do Sidi (e- Dokumentasi dan Informasi) | 29 |
| SAPA ALSINTAN (Saluran Penyampaian Aduan dan Layanan Informasi Alat dan Mesin Pertanian) | 26 |
| GEMABETA (Gerakan Masyarakat Bebas Pelita) | 20 |
| Sapa Alsintan (Saluran Penyampaian Aduan dan Layanan Informasi Alat dan Mesin Pertanian) | 0 |
| Layanan e-Do Sidi (e-Dokumentasi dan Informasi) | 0 |

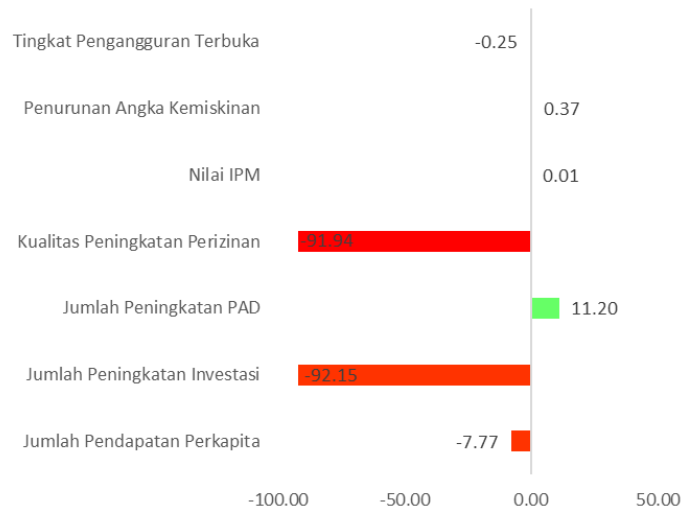
G. KABUPATEN MELAWI



Gambar 49. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Melawi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Melawi memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi dan Hasil Kreatif, yaitu 89%. Artinya 89% indikator-indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi dan Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 4%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



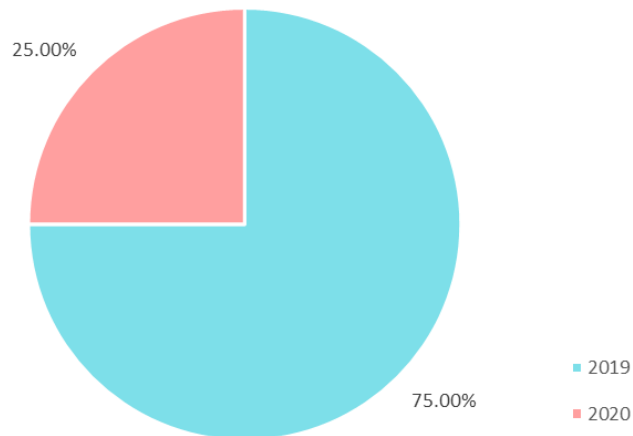
Gambar 50. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Melawi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Melawi belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 4 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif yaitu Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.25%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.25% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 92.15%, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 7.77% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.37%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.37% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.01%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan signifikan sebesar 91.94%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 91.94% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 11.20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

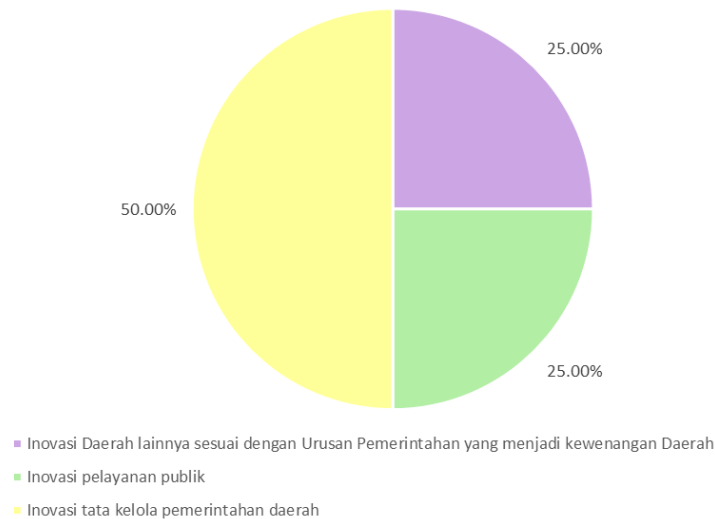
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Melawi

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Melawi telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 1 (25.00%) inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 3 (75.00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

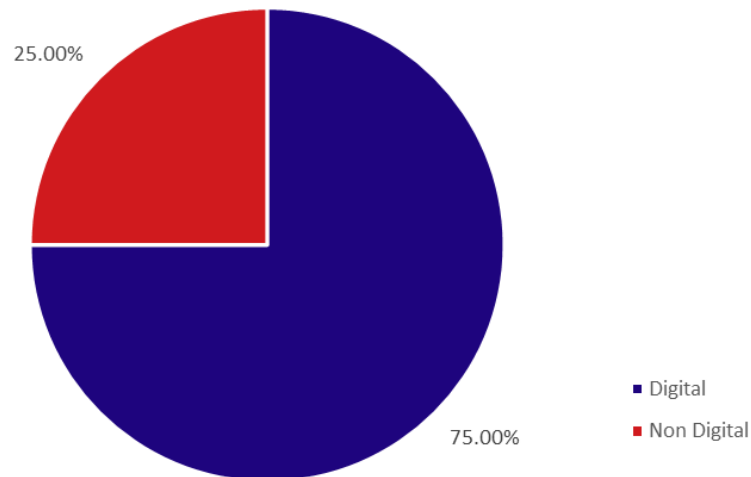
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 52. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Melawi

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Melawi merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah, yaitu sebanyak 2 (50.00%) inovasi dari total 4 inovasi, 1 (25.00%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

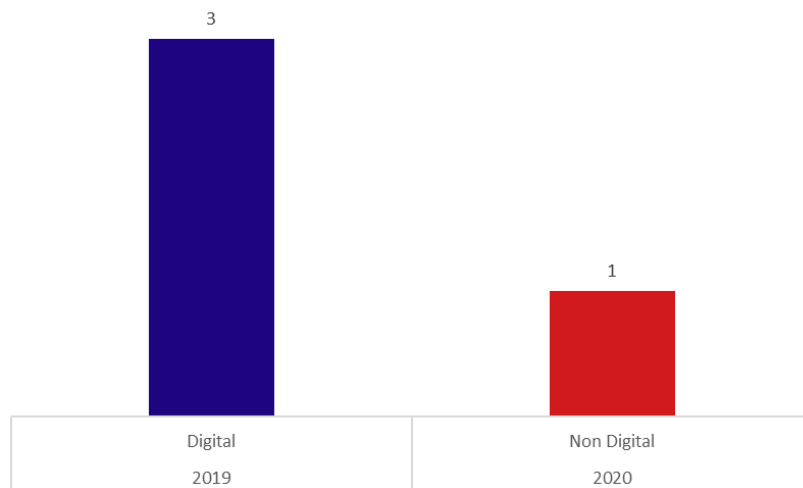
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Melawi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 3 (75.00%) dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Melawi merupakan inovasi digital dan 1 (25.00%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

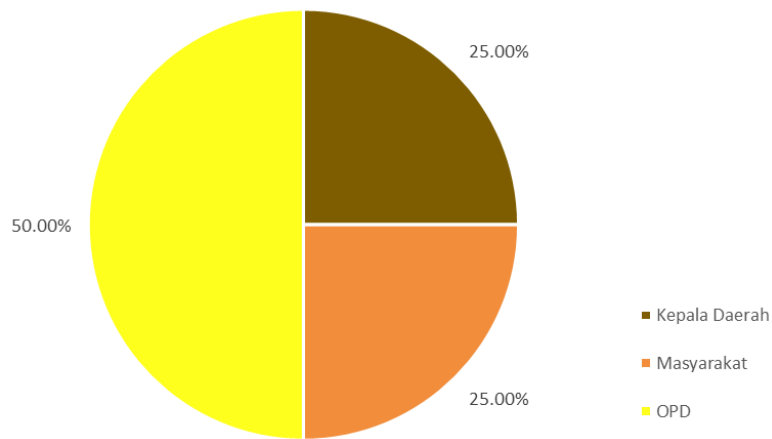
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 54. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Melawi

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Melawi ada yang mengalami penurunan maupun peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari sejumlah 3 inovasi pada tahun 2019, menjadi tidak ada inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dari tidak ada inovasi pada tahun 2019 menjadi 1 inovasi pada tahun 2020.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 55. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Melawi

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Melawi pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 2 (50.00%) inovasi, sedangkan sejumlah 1 (25.00%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan ASN.

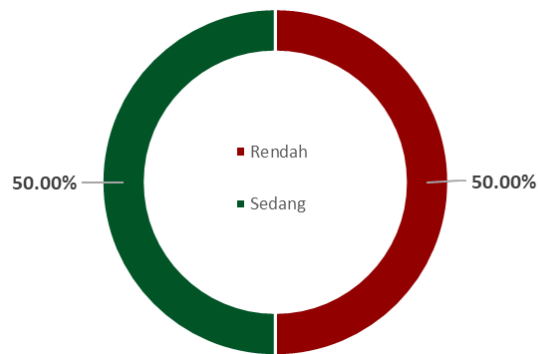
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 56. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Melawi

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Melawi berdasarkan urusan pemerintahan sangat merata. Seluruh urusan sama yaitu inovasi pada urusan Perencanaan, Perdagangan, Penanaman Modal dan Fungsi Penunjang Lainnya dengan masing-masing 1 inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan sosial, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

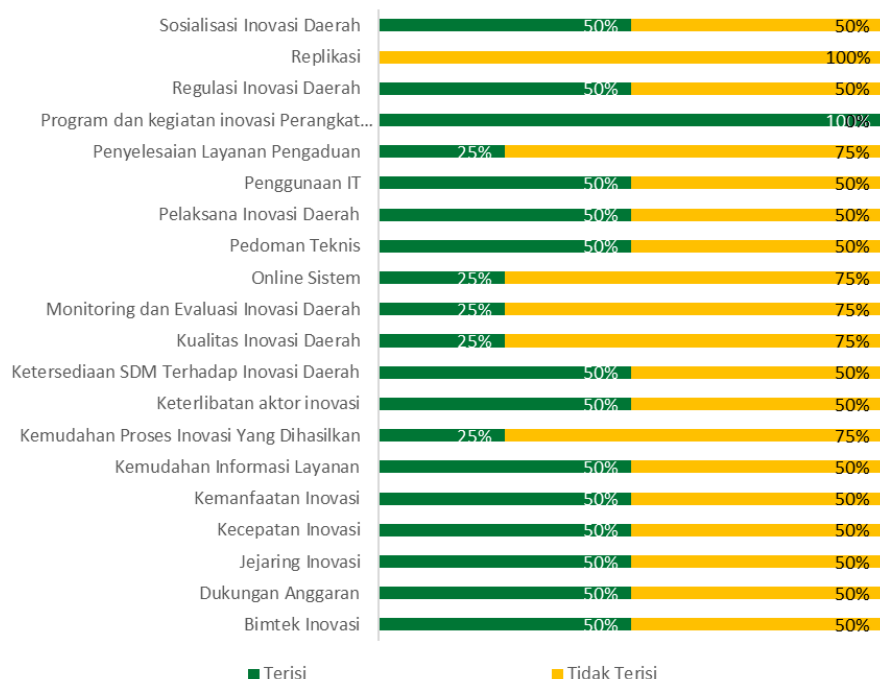
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 57. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Melawi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 2 (50.00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan 2 (50.00%) masuk kategori skor kematangan sedang dan tidak ada inovasi yang telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

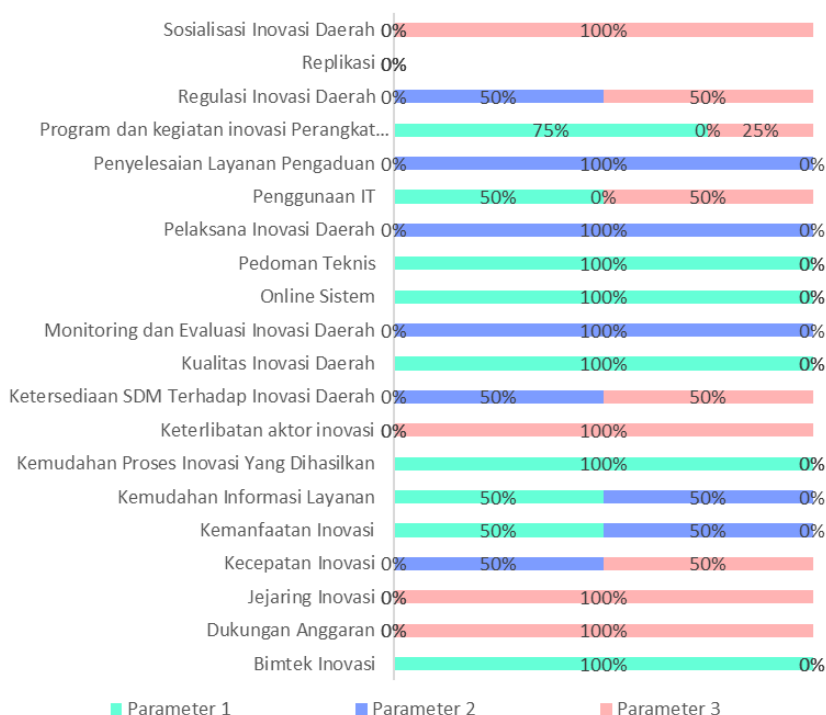


Gambar 58. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Melawi

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 43.75%, artinya dari 4 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Melawi rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 9 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Melawi telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 59. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

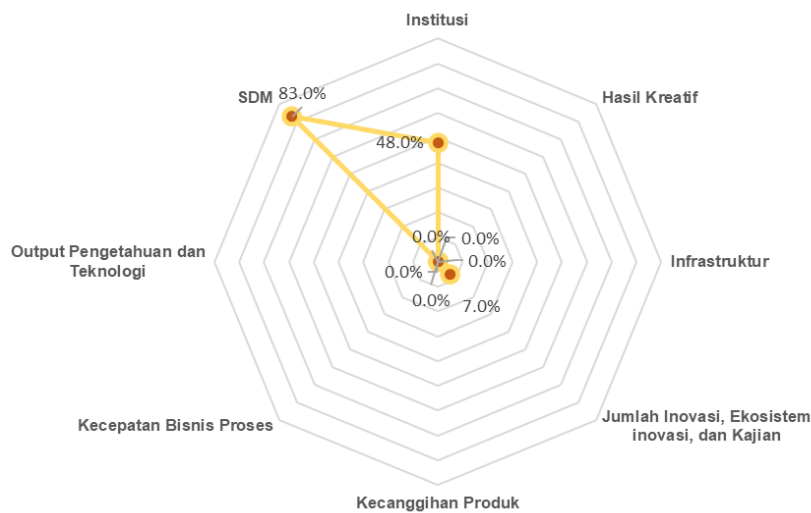
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktif Inovasi, Jejaring Inovasi dan Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah Indikator Pedoman Teknis, Online Sistem, Kualitas Inovasi Daerah, dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Melawi beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Melawi beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Menuju Ketransparanan Melalui Perencanaan e-Planning | 78 |
| Perolehan PAD Melawi Belum Maksimal, Bapenda Bentuk Sekretariat POSYANDU | 71 |
| Mitra Buana Mart Sadar Covid-19 | 2 |
| Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online di Kabupaten Melawi. | 2 |

H. KABUPATEN MEMPAWAH



Gambar 60. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Mempawah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Mempawah memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 83%. Artinya 83% indikator-indikator pada variabel hasil kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk, Infrastruktur dan Hasil Kreatif sangat rendah, yaitu sebesar 0%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



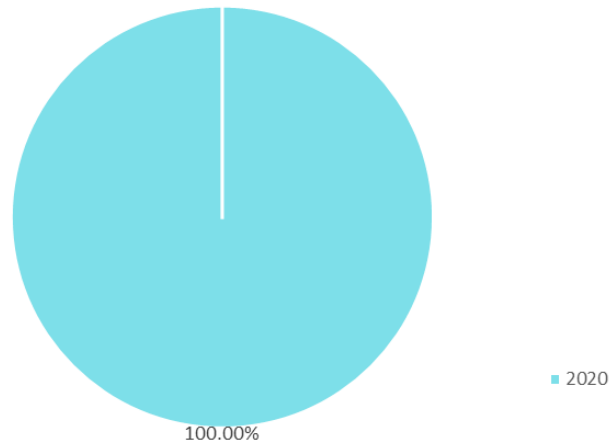
Gambar 61. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mempawah

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Mempawah belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 2.36%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 2.36% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1.32%, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan sebesar 4.21% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.37%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.37% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.24%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 16.31%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 16.31% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan signifikan sebesar 112.57% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

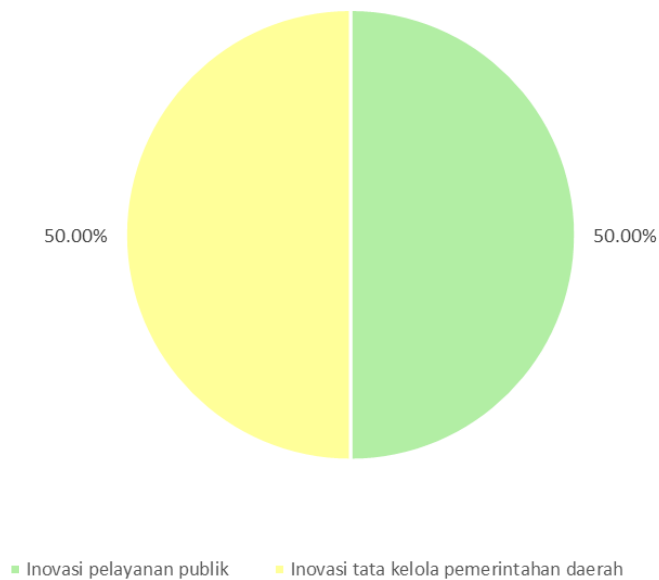
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Mempawah

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mempawah telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 2 inovasi dari 2 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan tidak ada inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

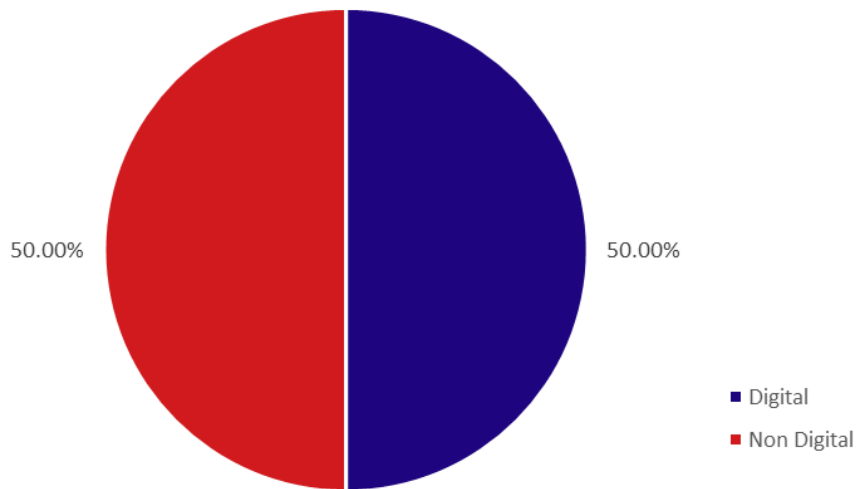
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Mempawah

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mempawah merupakan inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah lainnya

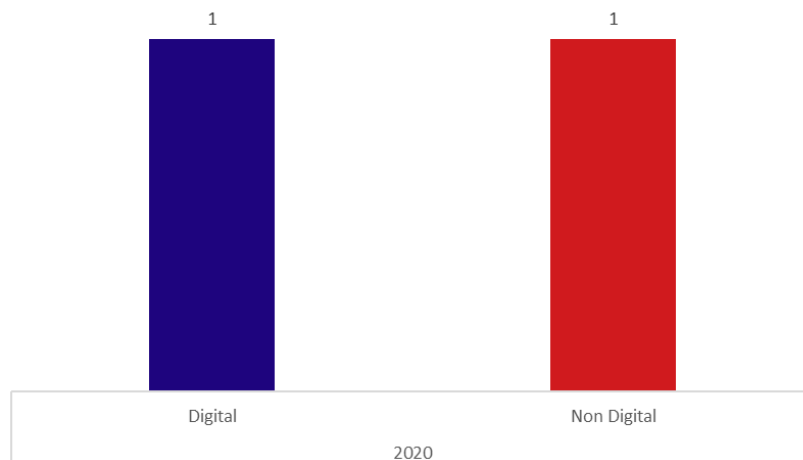
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Mempawah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, masing-masing 1 (50.00%) dari 2 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Mempawah merupakan inovasi digital dan inovasi non digital, tidak terdapat inovasi teknologi.

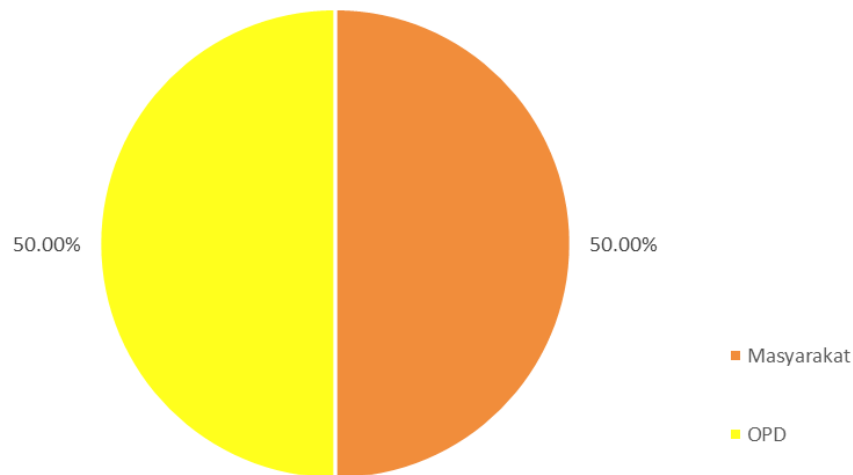
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 65. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Mempawah

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami peningkatan dari tidak ada inovasi pada tahun 2019, menjadi 1 inovasi pada tahun 2020, inovasi non digital mengalami peningkatan dari tidak ada inovasi menjadi 1 inovasi, dan inovasi teknologi tidak ada di tahun 2019 maupun tahun 2020.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 66. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Mempawah

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Mempawah pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Kepala Daerah (OPD) dan Masyarakat yaitu sejumlah masing-masing 1 (50.00%) inovasi. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD, ASN dan Kepala Daerah.

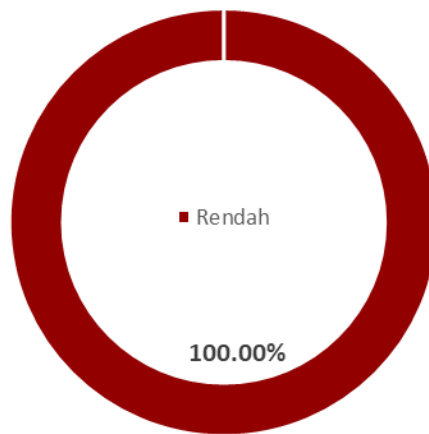
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 67. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Mempawah

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Mempawah berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Hanya terdapat 2 urusan yaitu urusan perencanaan dengan 1 inovasi dan urusan perdagangan dengan 1 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan, urusan sosial, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pendidikan, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

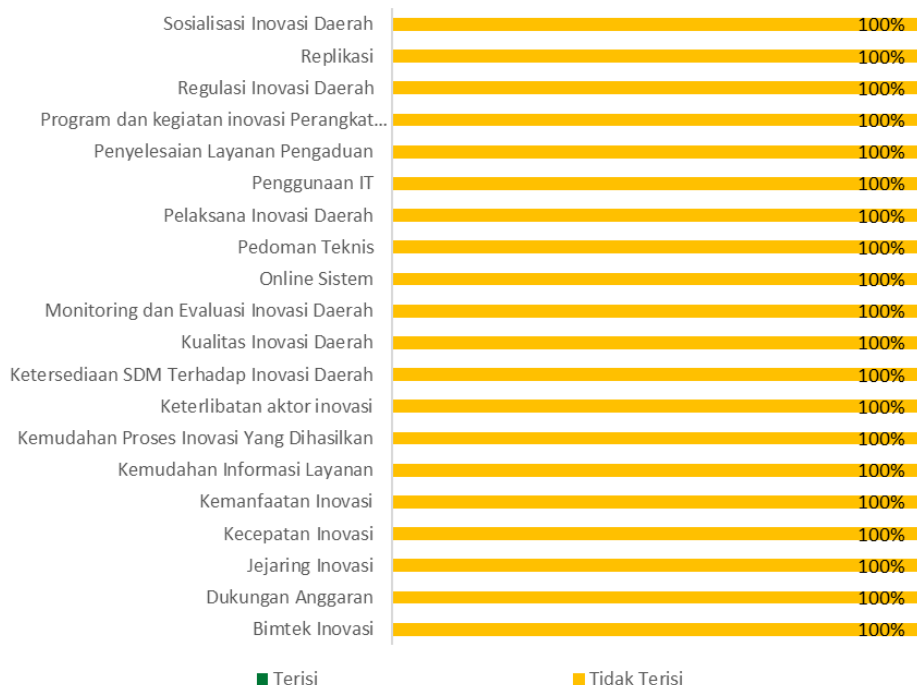
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Mempawah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 69. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah

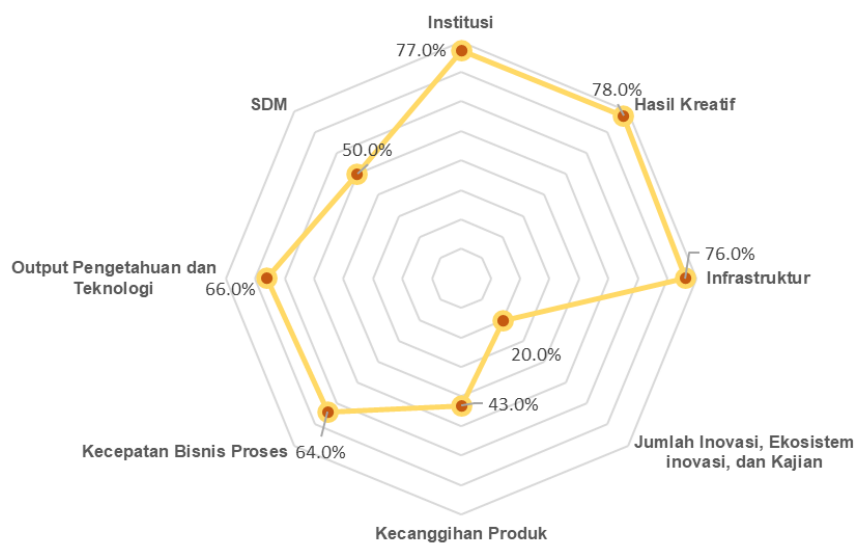
Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, seluruh tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi yang dilaporkan yang menyertakan bukti dukung pada seluruh indikator.

i. Daftar Inovasi Kabupaten Mempawah beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kabupaten Mempawah beserta Skor Kematangannya

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|---|-----------------|
| Cafe Sadar COVID-19 | 0 |
| SiCanda (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) | 0 |

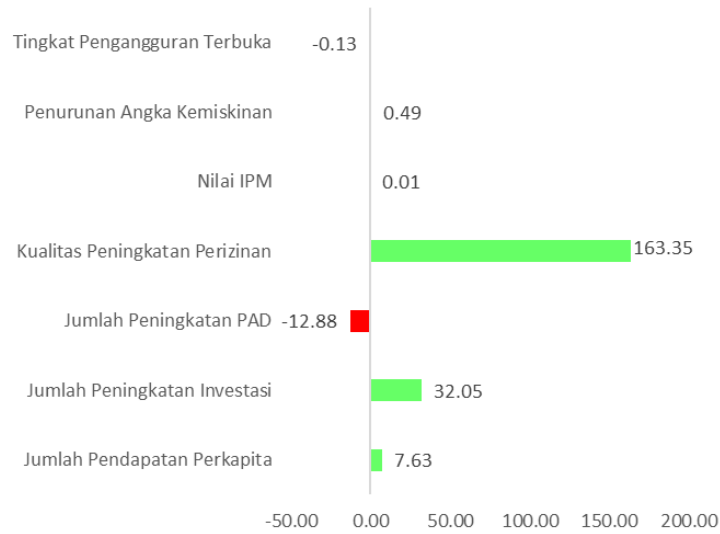
I. KABUPATEN SAMBAS



Gambar 70. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sambas

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sambas memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 78%. Artinya 78% indikator-indikator pada variabel hasil kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 20%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



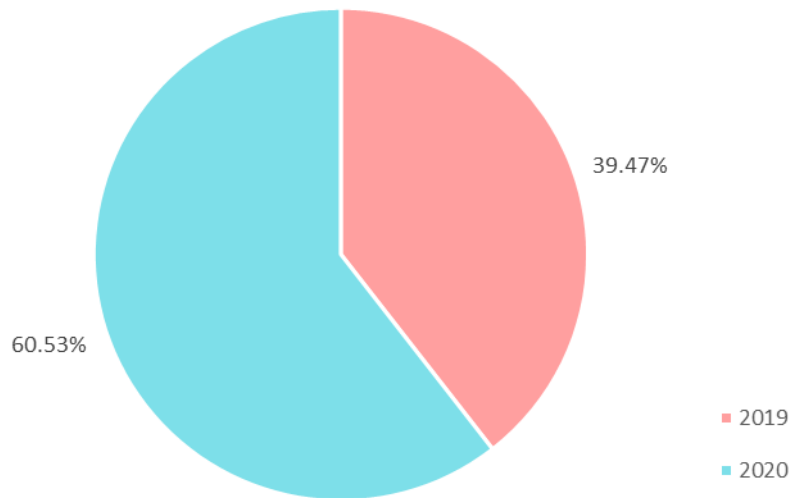
Gambar 71. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sambas

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sambas belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.13%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.13% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami naik signifikan, yaitu sebesar 32.05%, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan sebesar 7.63% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.49%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.49% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.01%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan signifikan sebesar 163.35%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 163.35% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 12.88% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

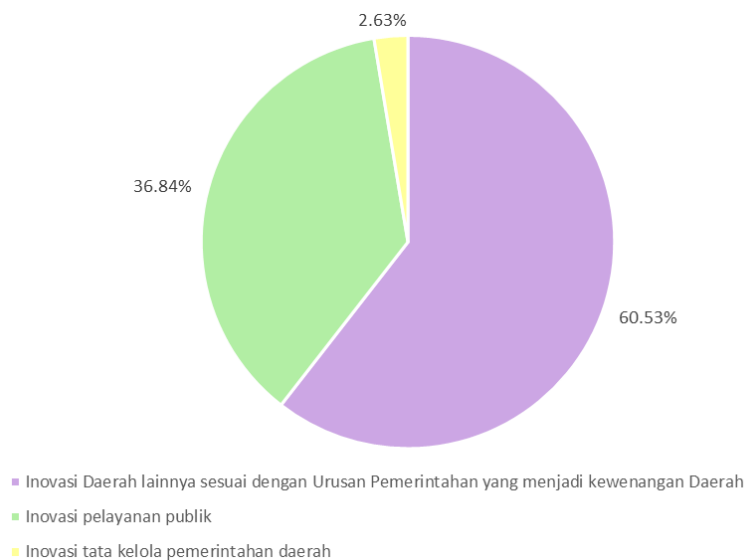
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sambas

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sambas telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 23 (60.53%) inovasi dari 38 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 15 (39.47%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

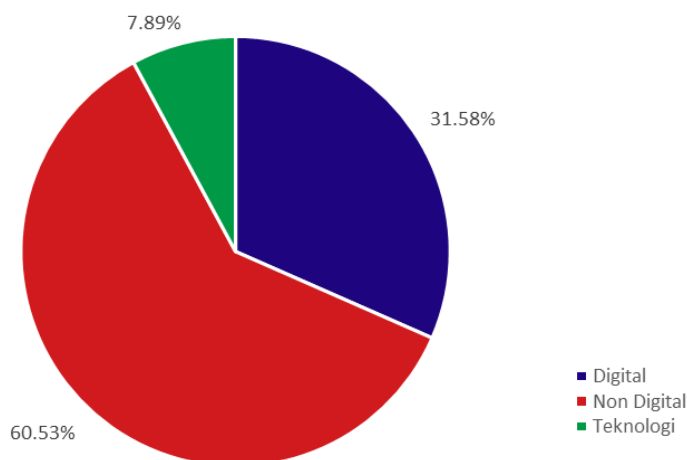


Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sambas

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sambas merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebanyak 23 (60.53%) inovasi dari total 38 inovasi.

Sedangkan 14 (36.84%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik dan 1 (2.63%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

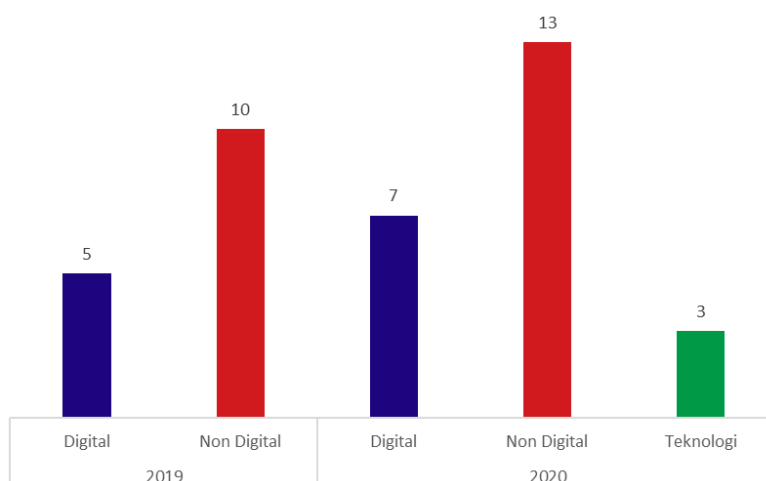
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sambas

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 12 (31.58%) dari 38 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sambas merupakan inovasi digital, 23 (60.53%) inovasi merupakan inovasi non digital dan 3 (7.89%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

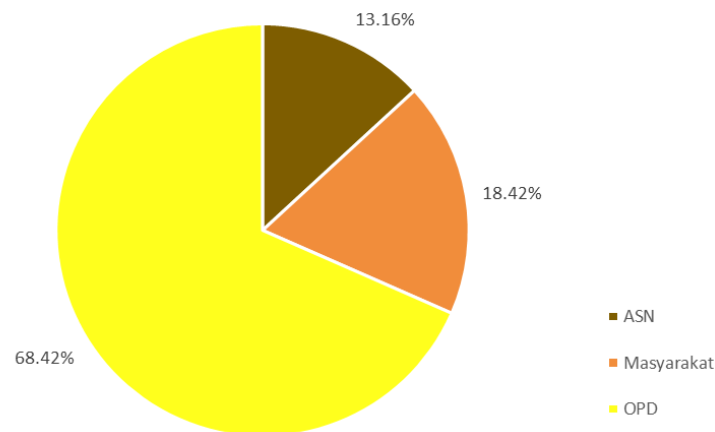
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 75. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sambas

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sambas mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami peningkatan dari sejumlah 5 inovasi pada tahun 2019, menjadi 7 inovasi pada tahun 2020, inovasi non digital mengalami peningkatan dari sejumlah 10 inovasi menjadi 13 inovasi, dan inovasi teknologi dari tidak ada di tahun 2019 menjadi 3 inovasi pada tahun 2020.

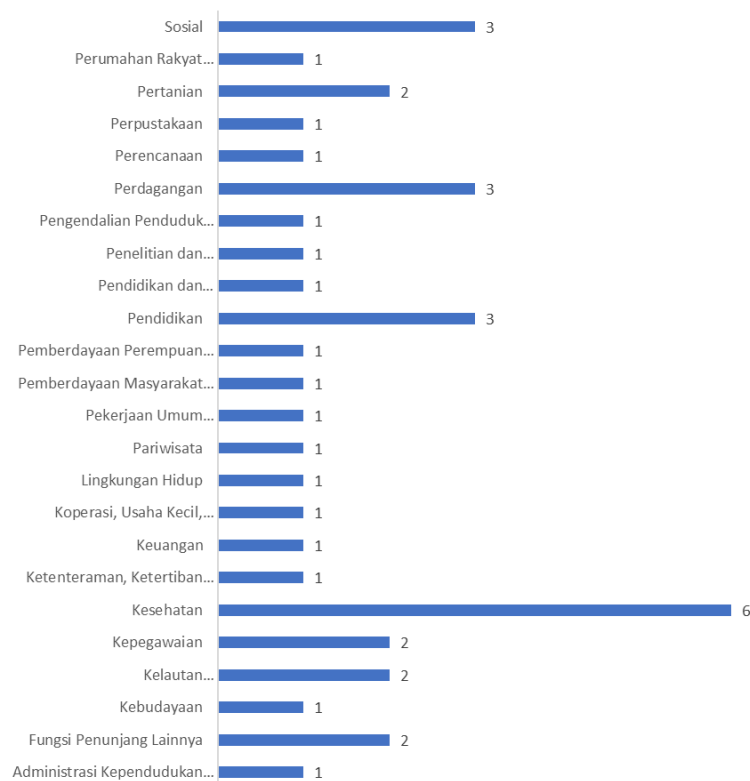
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 76. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sambas

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sambas pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Kepala Daerah (OPD), yaitu sejumlah 23 (68.42%) inovasi, sejumlah 7 (18.42%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, dan 5 (13.16%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan Kepala Daerah

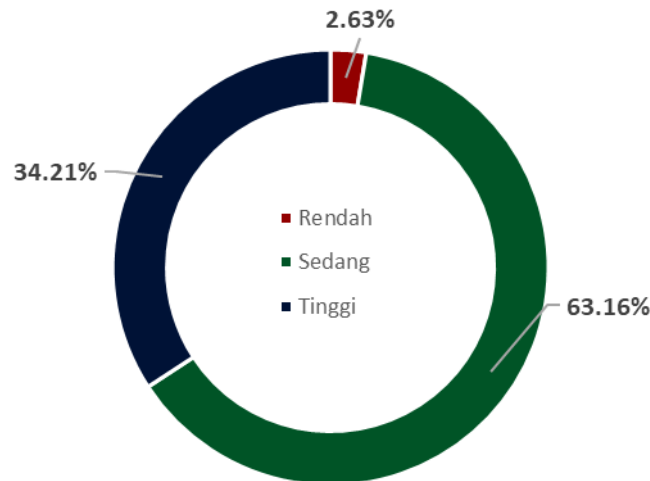
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 77. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sambas

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sambas berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 6 inovasi dari 38 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 6 inovasi, urusan sosial dengan 3 inovasi, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan 1 inovasi, urusan pendidikan dengan 3 inovasi, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan 1 inovasi serta urusan pekerjaan umum dan tata ruang dengan 1 inovasi.

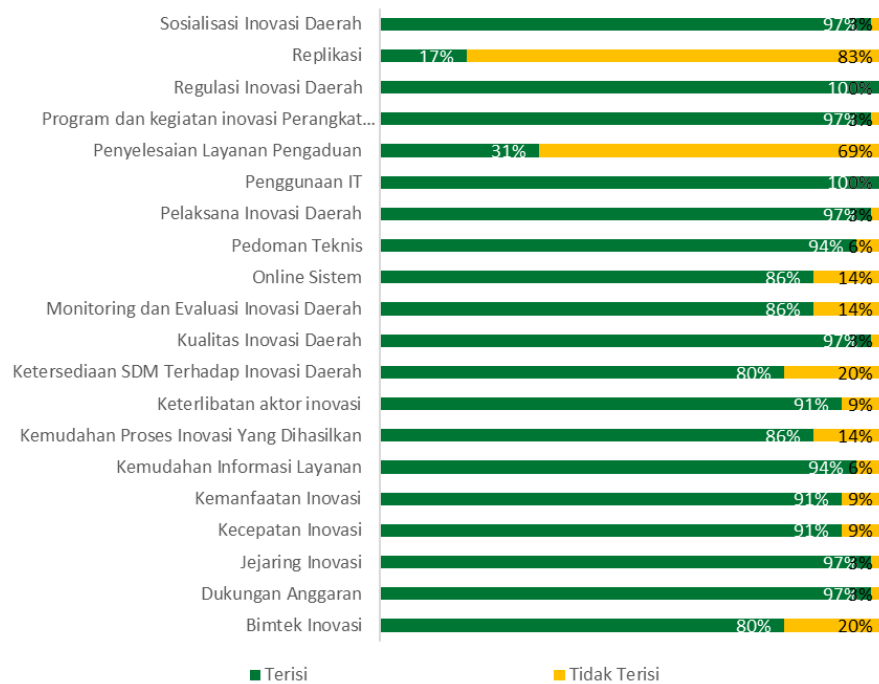
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 78. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sambas

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 1 (2.63%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 24 (63.16%) termasuk kategori skor kematangan sedang dan 13 (34.21%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

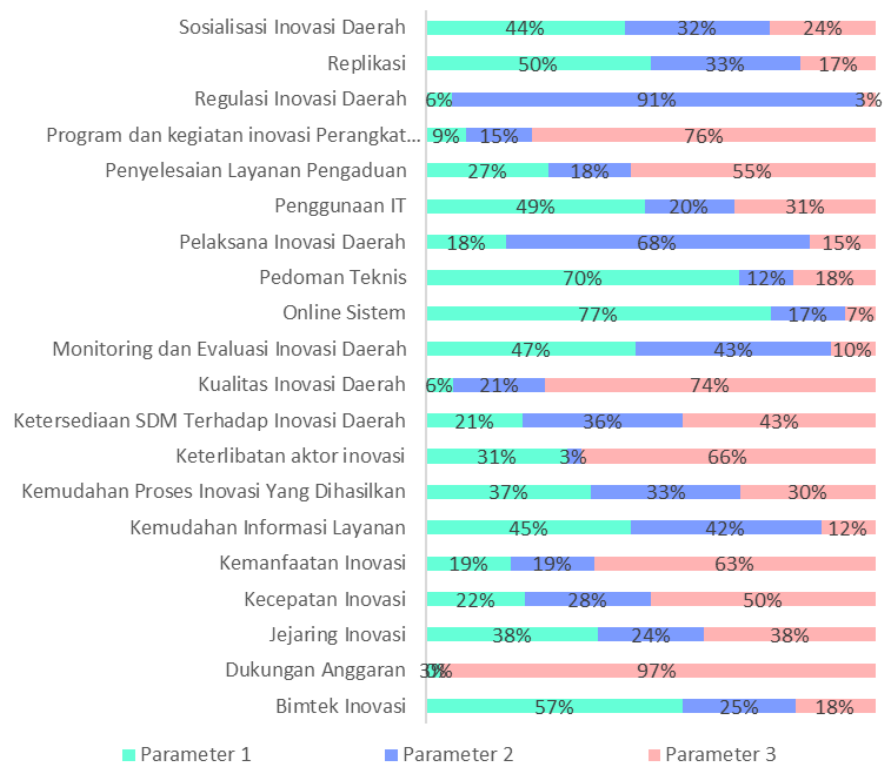


Gambar 79. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 85.57%, artinya dari 38 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Sambas rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 17 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Penggunaan IT dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sambas telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 17%, yang berarti bahwa hanya 7 dari 38 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 80. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 97%, yang berarti bahwa 97% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 91%, yang berarti bahwa 91% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem yaitu sebesar 77% yang berarti bahwa 77% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sambas beserta Skor Kematangannya

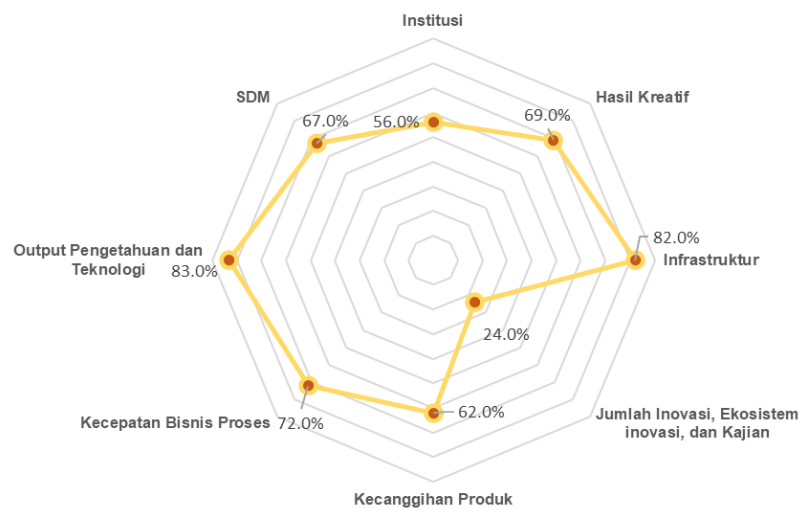
Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Sambas beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| INSANAK (INternet pedesaAN AKomodatif) | 131 |
| APEYAK (Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan - untuk Desa) | 116 |
| ASMA (Aduan Aspirasi Masyarakat) Parlemen Ujung Negeri | 113 |
| PENINGKATAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN CLOSET UNTUK Mendukung PROGRAM DANA Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas | 113 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| ISPA (Informasi Seputar PARlemen) DPRD Kabupaten Sambas | 112 |
| SALAM TASBARA (paSAr berLAMpar di linTAS Batas negaRA) | 111 |
| SIMPEL MURAH (SistEM PELaksanaan pasar MURAH di awal pandemi covid 19) | 108 |
| MotoR katoDa (Modul Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar) Luar Jaringan Semester 1 di Masa Pandemi | 107 |
| SI INDA Nelayan (Sistim INformasi DATA Nelayan) | 107 |
| Sistem Informasi Pengawasan Satpol PP Sambas | 106 |
| SI MELON TERASI (TERTib dan pAS sekali), Strategi 1 DESA 1 PANGKALAN GAS MELON untuk Mengatasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Sambas | 105 |
| Aplikasi Perpustakaan Digital i-Sambas | 103 |
| SIRATTE (Sistem pempRosesan dAn oTomaTisasi pEnsiun) | 100 |
| Alat Perekam Transaksi Elektronik (APTEK) | 97 |
| SIKERAN (Slaga keKERasan ANak) | 96 |
| LENSA AMAN (kaLEnder perSAlinan AMAN) | 96 |
| SABUR (Siapkan Buat Atur Uji Revisi) | 96 |
| KOMPASTINKESGA (KOMITMEN PASANGAN PENGANTIN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN KELUARGA) | 93 |
| Data Spasial Pertanian | 93 |
| TAMAN WISATA BAHARI (TWB) "KAMPUNG ZERO PENGANGGURAN" | 92 |
| Pelayanan Kepegawaian Terpadu | 92 |
| ENYAH KEMISKINAN DENGAN PRODUK LOKAL (AMPING SAMBAS PKH BIG PROJECT) | 92 |
| Teknologi MORAGA (MODifikasi Bujangseta RAMli GAPura) Pada Tanaman Jeruk | 91 |
| Jembatan Konstruksi Beton Berbiaya Murah | 91 |
| Ayo Ke Museum, Museum di Hatiku | 86 |
| MATOA (Modul Aktivitas Orang tua dan Anak) Sebagai Media Aktivitas Rekreasional dan Dukungan Psikososial Bagi Anak Usia Sekolah Dasar di Masa Pandemi | 86 |
| PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLA SAMPAH DI DESA PENJAJAP GANG NELAYAN PEMANGKAT | 84 |
| KAN AGE' (Kelulut simANis dAn berGizi dari pErbatasan) | 80 |
| MAJLIS TAKLIM IBU HAMIL | 79 |
| TB BECKER (Alarm Tuberculosis) | 78 |
| LAJU (Layanan penJemputan Ibu Bersalin) | 78 |
| BU NAGA SALIN (Budidaya Buah Naga pada Lahan Salin) | 78 |
| PROVIL (PROtokol KEsehatan Via Lagu) untuk Mendukung PERBUP No 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin & GAKKUM PROKES COVID-19 | 75 |
| KABIN (Kampung KB INtegrasi) | 74 |
| HATIKU TUMBANG (perHATian KhUsus TUMbuh kembANG) | 68 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| BUDIKDAMBER (BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER) Pramuka jaya, Warga Binaan Sejahtera | 68 |
| Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) berbasis e-planning | 60 |
| PROViL (PROtokol KEsehatan Via Lagu) untuk Mendukung PERBUP No 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin & GAKKUM PROKES COVID-19 | 0 |

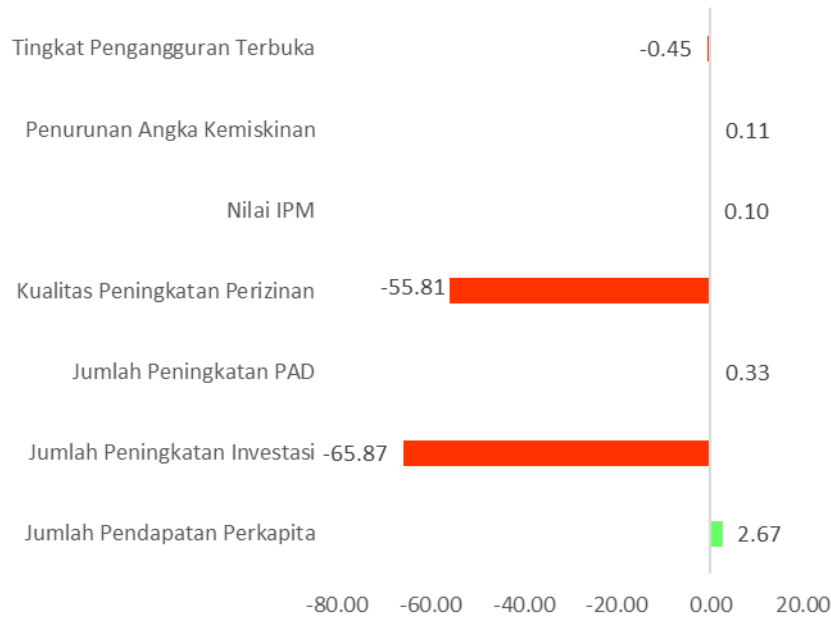
J. KABUPATEN SANGGAU



Gambar 81. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sanggau

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sanggau memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 83%. Artinya 83% indikator-indikator pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM) sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 24%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



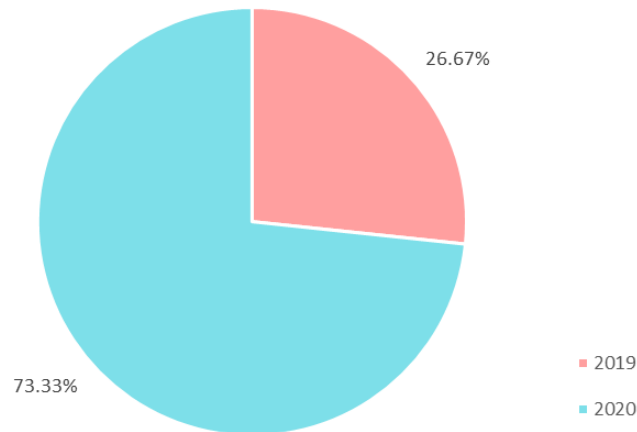
Gambar 82. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sanggau

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sanggau belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 3 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.45%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.45% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 65.87%, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan sebesar 2.67% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.11%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.11% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.10%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan signifikan sebesar 55.81%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 55.81% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 0.33% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

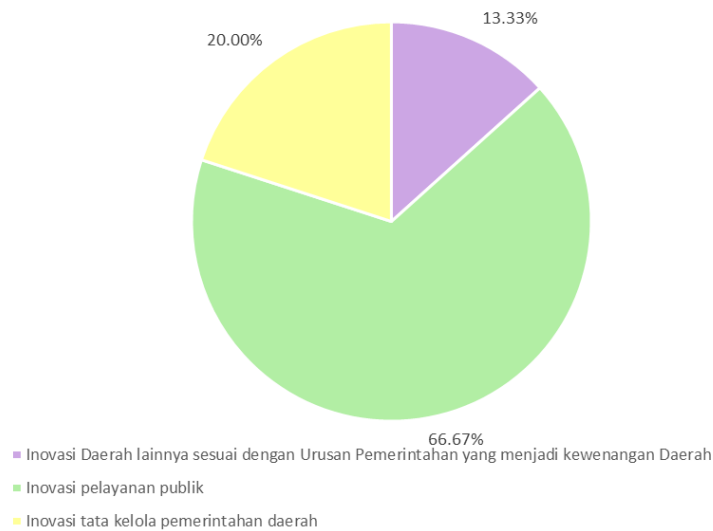
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 83. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sanggau

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sanggau telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 11 (73.33%) inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 4 (26.67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

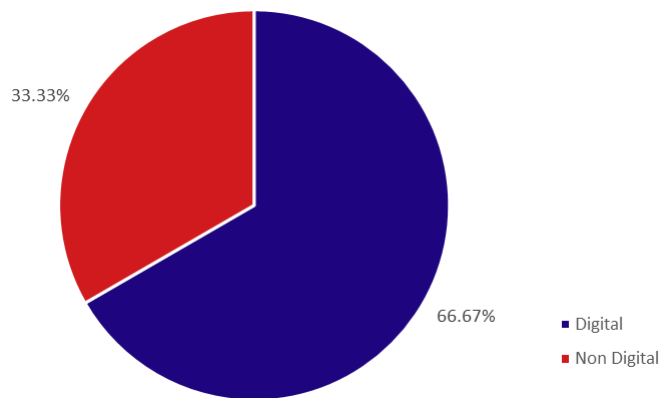
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sanggau

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sanggau merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 10 (66.67%) inovasi dari total 15 inovasi. Sedangkan 3 (20.00%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah dan 2 (13.33%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

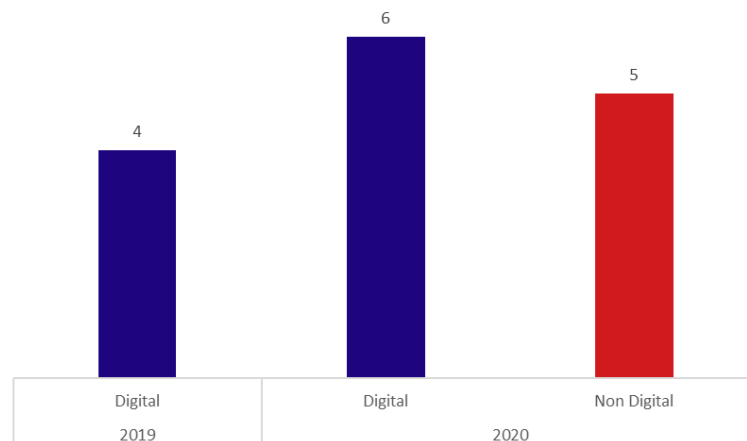
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 85. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sanggau

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 10 (66.67%) dari 15 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sanggau merupakan inovasi digital, dan 5 (33.33%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

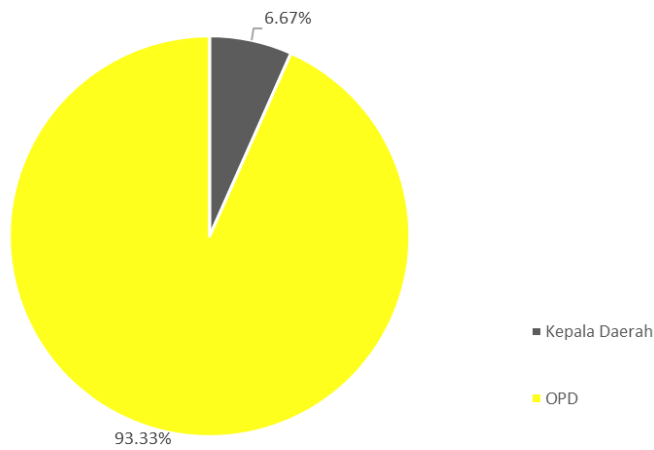
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 86. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sanggau

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami peningkatan dari sejumlah 4 inovasi pada tahun 2019, menjadi 6 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dari tidak ada inovasi menjadi 5 inovasi.

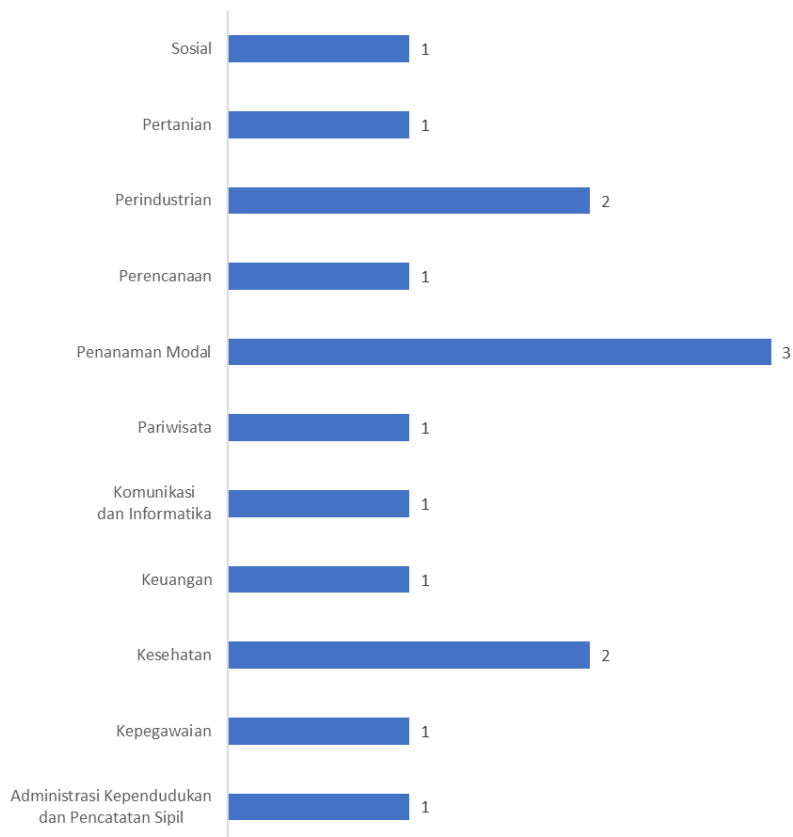
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 87. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sanggau

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Kepala Daerah (OPD), yaitu sejumlah 14 (93.33%) inovasi, sedangkan sejumlah 1 (6.67%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat.

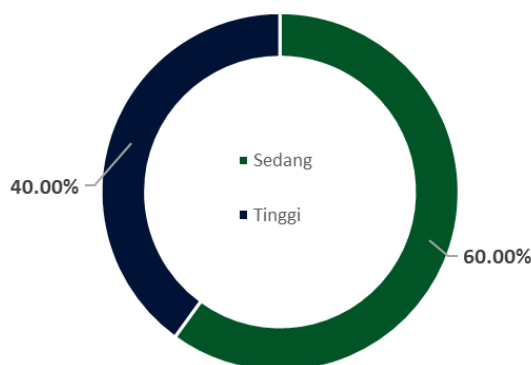
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 88. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sanggau

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sanggau berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan penanaman modal dengan 3 inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 2 inovasi dan urusan sosial dengan 1 inovasi. Sementara urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pendidikan, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pekerjaan umum dan tata ruang belum ada.

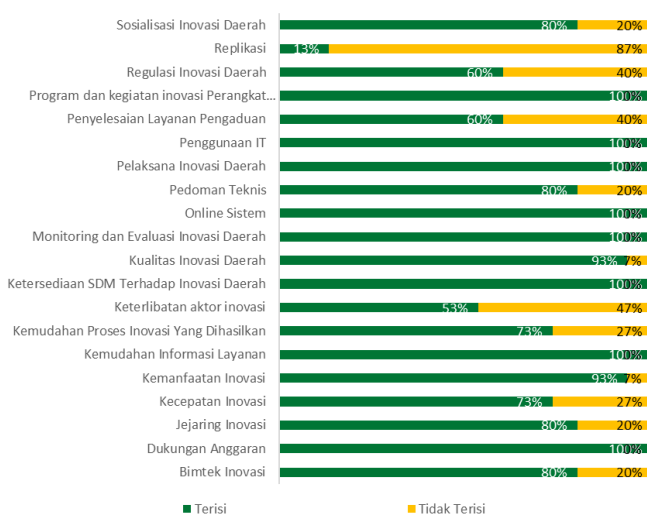
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 89. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sanggau

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 9 (60.00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 6 (40.00%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

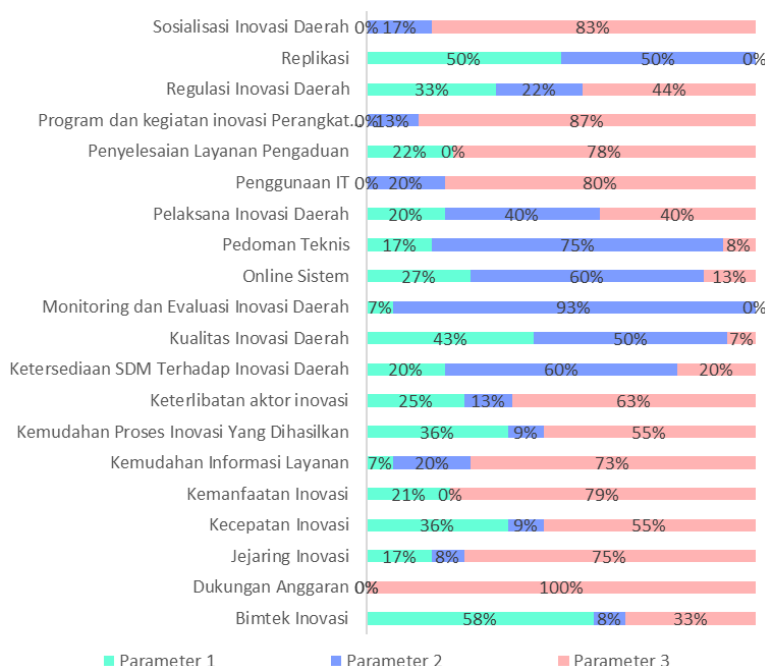


Gambar 90. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 82.00%, artinya dari 15 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Sanggau rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 16 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sanggau telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 13%, yang berarti bahwa hanya 2 dari 15 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 91. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

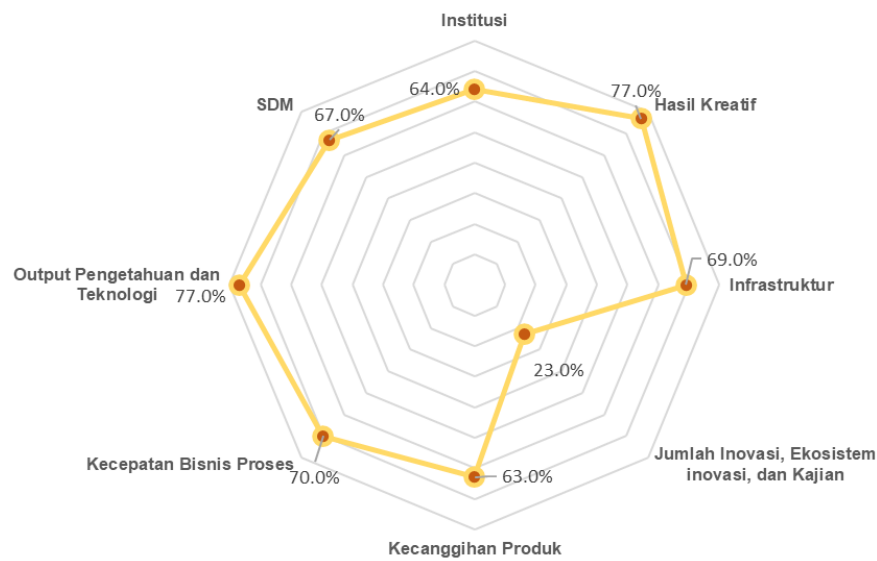
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 93%, yang berarti bahwa 93% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yaitu sebesar 58% yang berarti bahwa 58% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sanggau beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Sanggau beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| SABER '24 (Sanggau Bebas Rabies Tahun 2024) | 124 |
| Mal Pelayanan Publik (MPP) | 123 |
| SIDOMPU (Sistem Informasi Data Orang Miskin Terpadu) | 107 |
| APD Online & Mb-Pay (Aplikasi Pajak Daerah Berbasis Online dan Multi Biller Payment) | 102 |
| SI KEPON (Sistem Kependudukan Online) | 101 |
| JIGD (Jaringan Informasi Geospasial Daerah) Kabupaten Sanggau | 100 |
| MASYARAKAT DELIMA (Masyarakat Peduli Lingkungan Menuju Sehat) | 98 |
| SIPEDAS (Sistem Informasi Pelayanan Data ASN) | 97 |
| SEMAWIS (SEhat dan aMAN berWISata) | 91 |
| Layanan Gerai Samer New Normal Series | 87 |
| SIPADU (Sistem Informasi dan Pelaporan Pelayanan Publik Terpadu) | 87 |
| SANG PERMAI (sanggau.go.id Portal Elektronik Ruang Media Aplikasi dan Informasi) | 85 |
| REBUNG (REmbuk Bersama Untuk cegah stuntiNG) | 84 |
| LAPIZ JEMPOL (Pelayanan Perizinan Terpadu Jemput Bola) | 82 |
| Layanan Gerai Samer (Satu Atap Merangkul IKMers) | 80 |

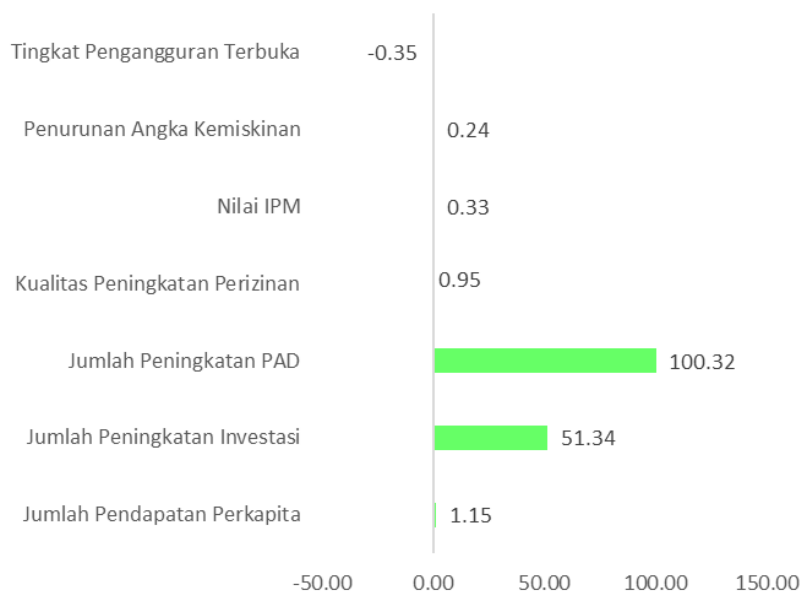
K. KABUPATEN SEKADAU



Gambar 92. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sekadau

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sekadau memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi dan Hasil Kreatif, yaitu 77%. Artinya 77% indikator-indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi dan Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 23%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



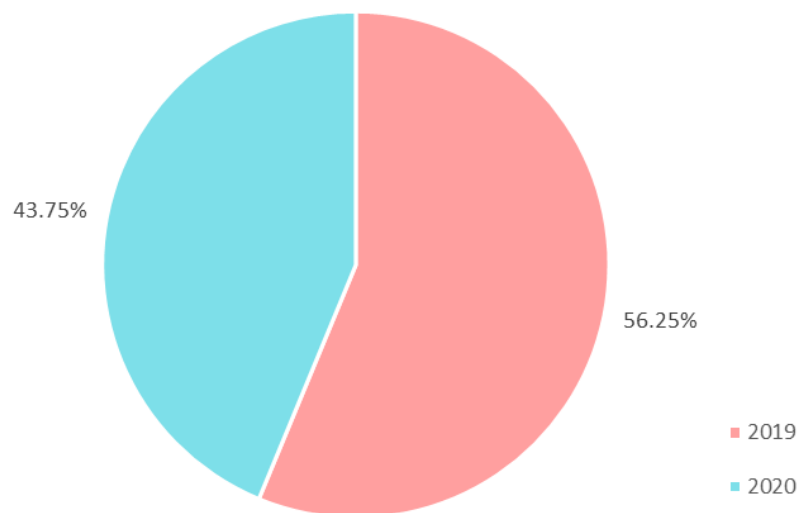
Gambar 93. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sekadau

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sekadau belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 1 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif yaitu Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.35%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.35% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan, yaitu sebesar 51.34%, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan sebesar 1.15% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.24%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.24% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.33%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.15%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 1.15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan signifikan sebesar 100.32% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

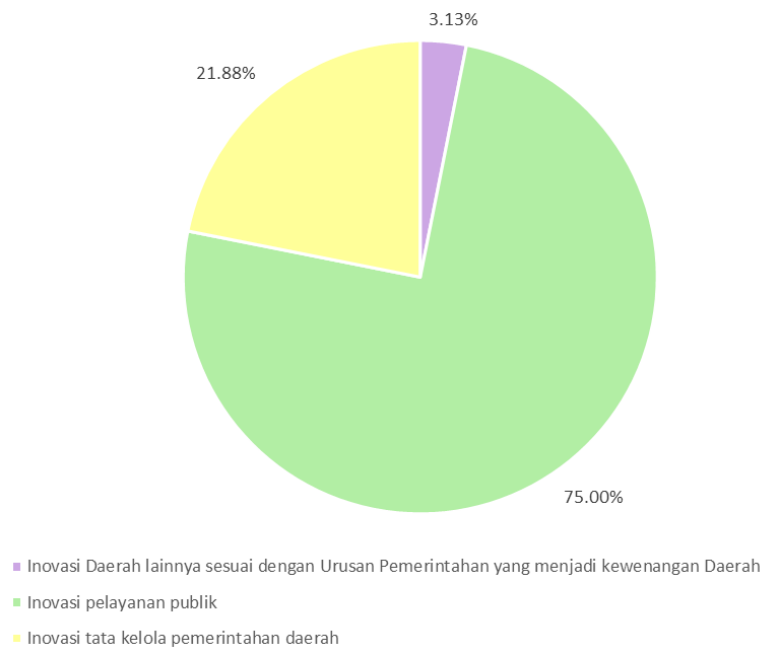
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 94. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sekadau

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sekadau telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 14 (43.75%) inovasi dari 32 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 18 (56.25%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

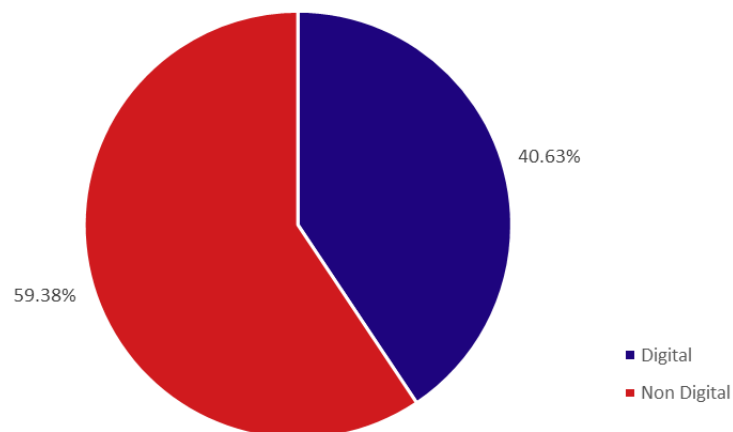
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sekadau

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sekadau merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 24 (75.00%) inovasi dari total 32 inovasi, 7 (21.88%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah, sedangkan 1 (3.13%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

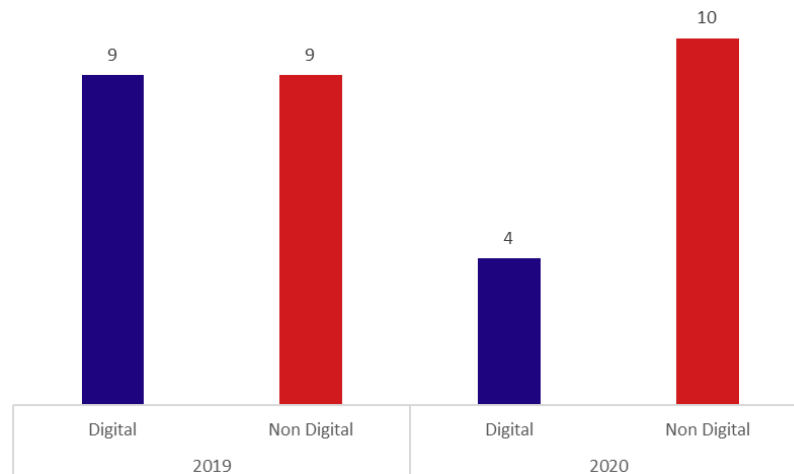
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 96. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sekadau

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 13 (40.63%) dari 32 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sekadau merupakan inovasi digital dan 19 (59.38%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

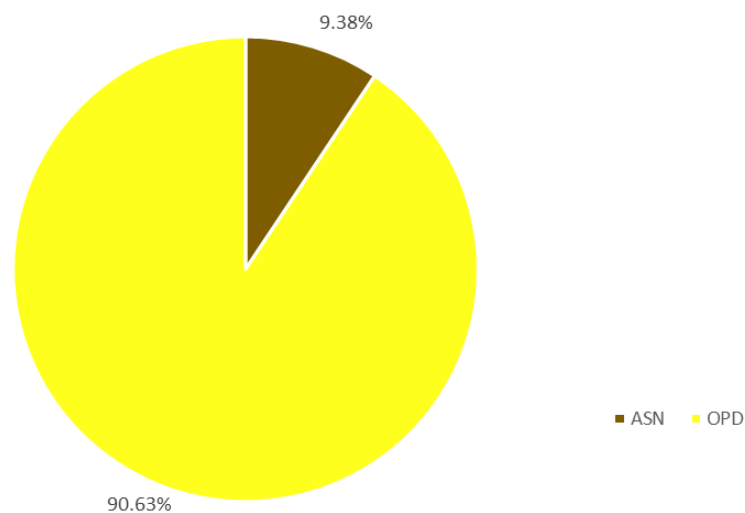
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 97. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sekadau

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sekadau ada yang mengalami penurunan maupun peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari sejumlah 9 inovasi pada tahun 2019, menjadi 4 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dari 9 inovasi menjadi 10 inovasi.

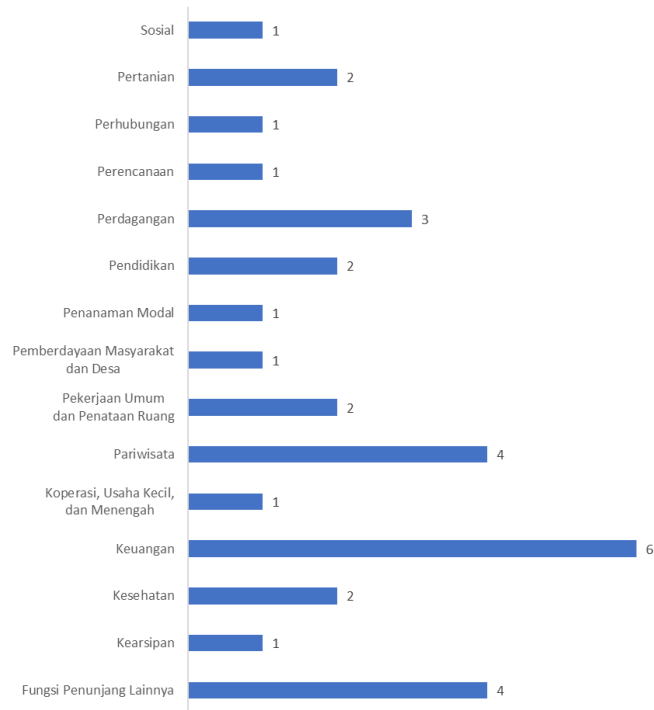
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 98. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sekadau

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 29 (90.63%) inovasi, sedangkan sejumlah 3 (9.38%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat.

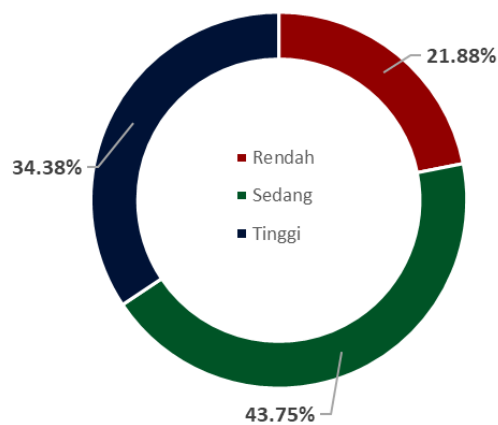
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 99. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sekadau

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sekadau berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan keuangan dengan 6 inovasi dari 32 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 2 inovasi, urusan kesehatan dengan 2 inovasi, urusan urusan pekerjaan umum dan tata ruang dengan 2 inovasi, serta urusan sosial dengan 1 inovasi. Sementara urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum ada.

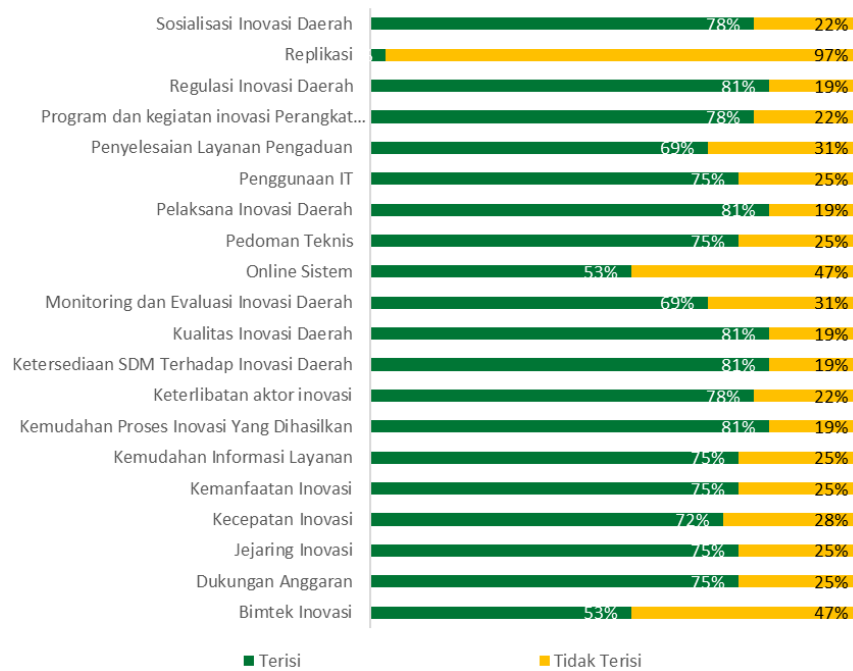
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 100. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sekadau

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 7 (21.88%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 14 (43.75%) masuk kategori skor kematangan sedang dan 11 (34.38%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

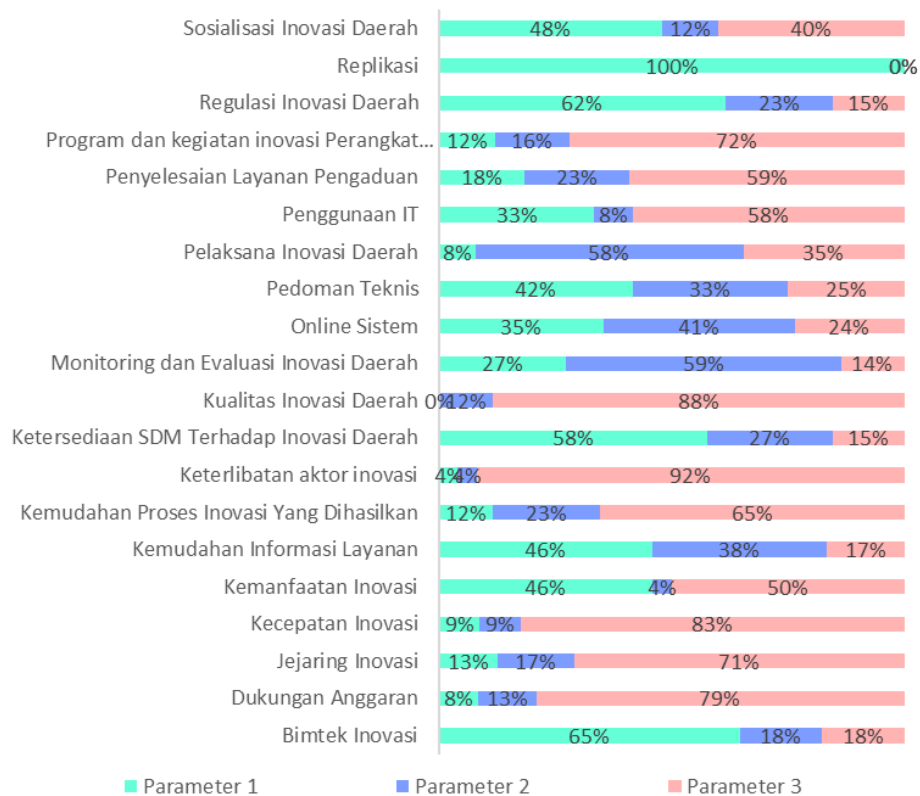


Gambar 101. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sekadau

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 70.47%, artinya dari 32 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Sekadau rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 14 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi, Pelaksana, Kualitas, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 81%, yang berarti bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sekadau telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 3%, yang berarti bahwa hanya 1 dari 32 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 102. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 59%, yang berarti bahwa 59% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sekadau beserta Skor Kematangannya

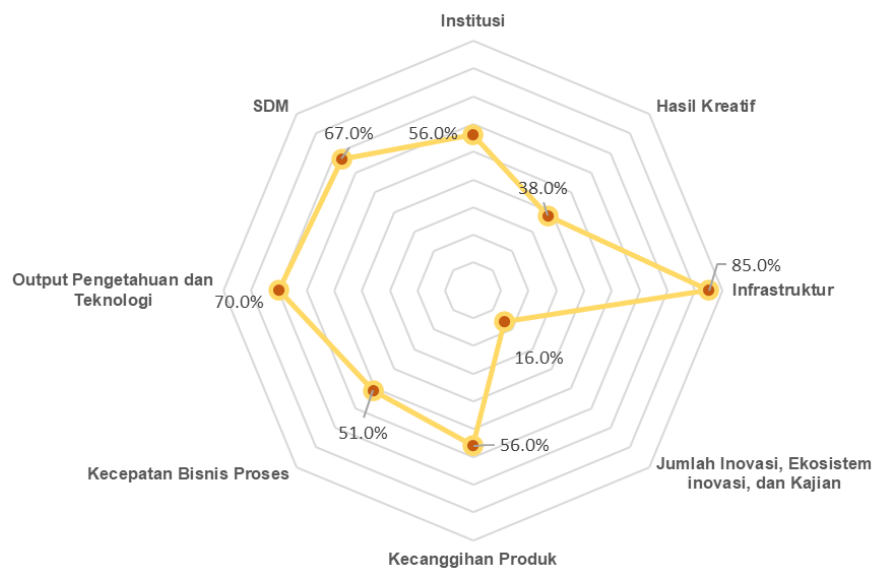
Tabel 10 Daftar Inovasi Kabupaten Sekadau beserta Skor Kematangannya

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|--|-----------------|
| Penguatan Permodalan Bagi Pelaku UMKM Melalui Kerjasama Dengan Perbankan Dikabupaten Sekadau | 136 |
| RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) | 119 |
| Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) Pada Sapi Potong Melalui Kegiatan Face To Face Relationship (FFR) Dan Pembuatan Media Penyuluhan | 116 |
| Aplikasi Host To Host BPHTB | 115 |

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|--|------------------------|
| Aplikasi Payment Gateway (Pembayaran Pajak Daerah Online) | 115 |
| e-SP2D in IEKD (Informasi Elektronik Keuangan Daerah) | 111 |
| Acceleration Of Tourism Sebagai Tata Kelola Destinasi Pariwisata | 107 |
| PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA SEKOLAH DALAM PERENCANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN | 105 |
| Percepatan Pelaksanaan Penyerapan DAK Kab. Sekadau | 101 |
| Optimalisasi Pemanfaatan Jalan Usaha Tani (JUT) Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Jalan Usaha Tani | 101 |
| Peningkatan Sinergitas Pemberian Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang melalui penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) | 100 |
| Aplikasi Pembayaran PBB-P2 Online | 99 |
| Optimalisasi Pelaksanaan Pengolahan Informasi Pendataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) melalui system Aplikasi secara efektif dan efisien pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau | 98 |
| Pengelolaan Usulan Bantuan Hibah Melalui Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau | 97 |
| Promosi Destinasi Wisata Melalui Web Tourism System | 95 |
| PEMBENTUKAN KLINIK LAYANAN ASISTENSI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KLAP SAKIP) UNTUK MEMPERMUDAH PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP | 94 |
| Optimalisasi Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Inonesia Tingkat Kabupaten Sekadau | 91 |
| Desa Tangguh Bencana (DESTANA) | 91 |
| Pengintegrasian Pengelolaan data kinerja dalam percepatan meningkatkan akuntabilitas dengan Pembentukan Sistem Informasi Aplikasi e-Monev Capaian Kinerja. | 91 |
| Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata di Kabupaten Sekadau Melalui Tim Terpadu Promosi Wisata | 90 |
| Optimalisasi kinerja penatausahaan persediaan obat pada rumah sakit umum daerah sekadau melalui penerapan elektronik stock opname obat rumah sakit (E-SOBAT RUMKIT) | 87 |
| Optimilasi pengelolaan dan penyajian data hasil Evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah dalam bentuk buku digital (E-BOOK) | 85 |
| Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan (SIPLAHWAS) | 77 |
| PENYEDIAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBAT UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN KEFARMASIAN SATU PINTU (ONE GATE POLICY) | 65 |
| Pengendalian barang persediaan dengan model standarisasi penggunaan barang | 62 |

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|---|-----------------|
| Aplikasi Sederhana Manajemen Surat (ASAMURAT) | 38 |
| Pelayanan Terpadu Bebas Covid 2019 | 0 |
| Pelayanan Transportasi Penyebrangan Sungai Bebas Covid-19 | 0 |
| ODTW Lawang Kuari Aman dan Bebas Covid-19 | 0 |
| Pasar Modern Bebas Covid-19 | 0 |
| Pasar Tradisional Bebas Covid-19 | 0 |
| Restoran Pondok indah bebas Covid-19 | 0 |

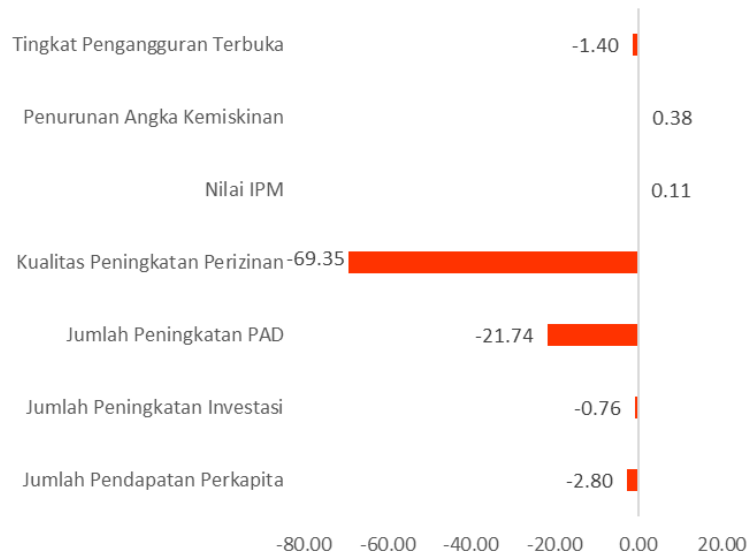
L. KABUPATEN SINTANG



Gambar 103. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sintang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sintang memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 85%. Artinya 85% indikator-indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 16%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



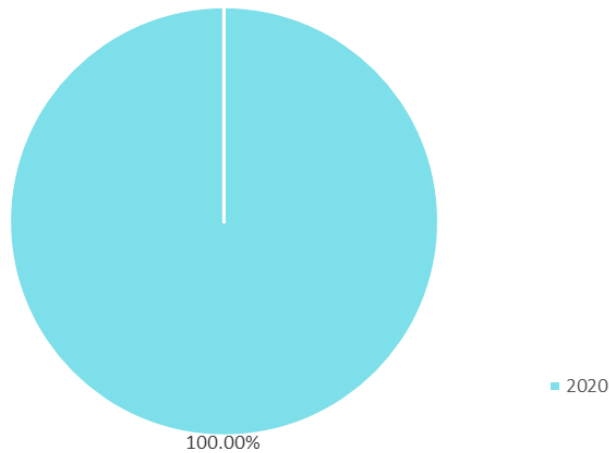
Gambar 104. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sintang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sintang belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 5 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.40%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.40% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 0.76%, hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 2.80% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.38%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.38% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.11%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan signifikan sebesar 63.35%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun signifikan sebesar 63.35% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 21.74% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

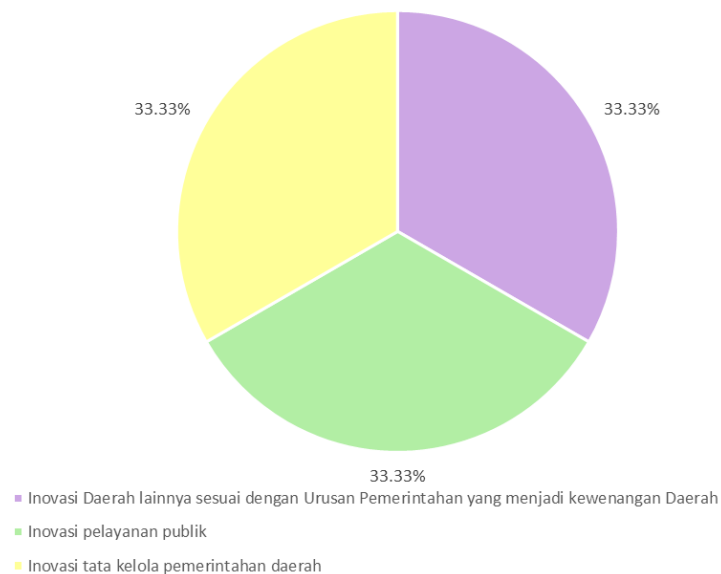
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 105. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Sintang

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sintang telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 3 (100%) inovasi dari 3 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020!

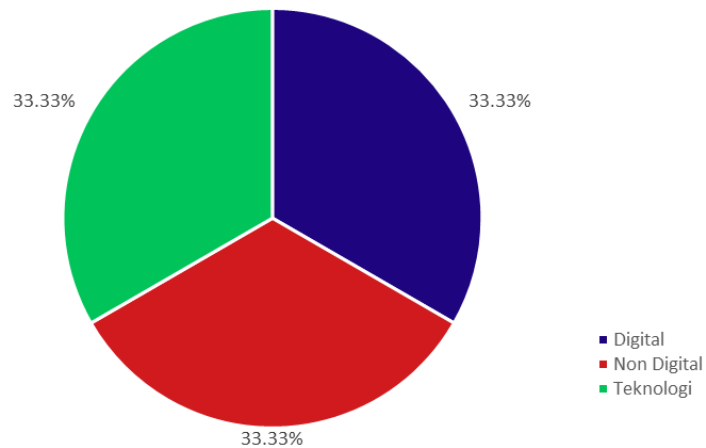
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sintang

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sintang merupakan inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintah daerah, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing 1 (33.33%) inovasi.

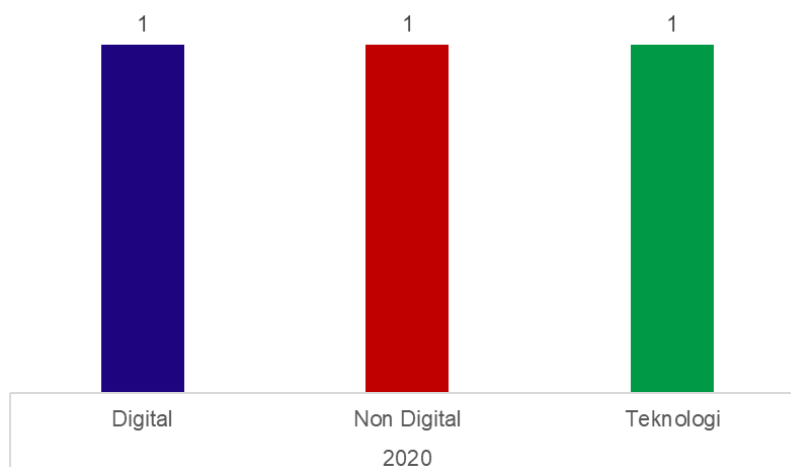
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 107. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sintang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 1 (33.33%) dari 3 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sintang merupakan inovasi digital, 1 (33.33%) inovasi merupakan inovasi non digital, dan 1 (33.33%) inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

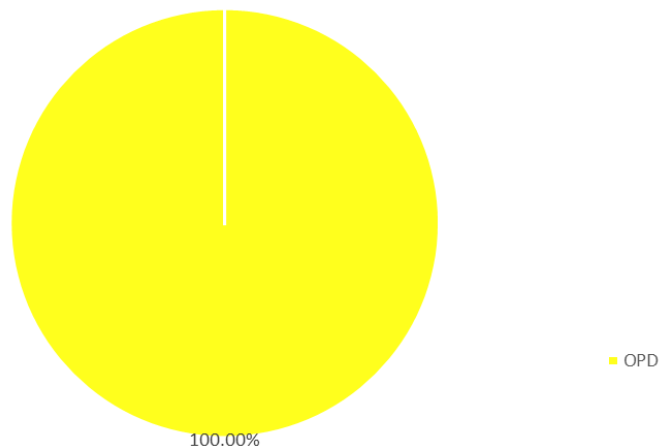
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 108. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sintang

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sintang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, inovasi teknologi, maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital, non digital dan inovasi teknologi yang pada tahun 2019 tidak ada, terdapat pada tahun 2020.

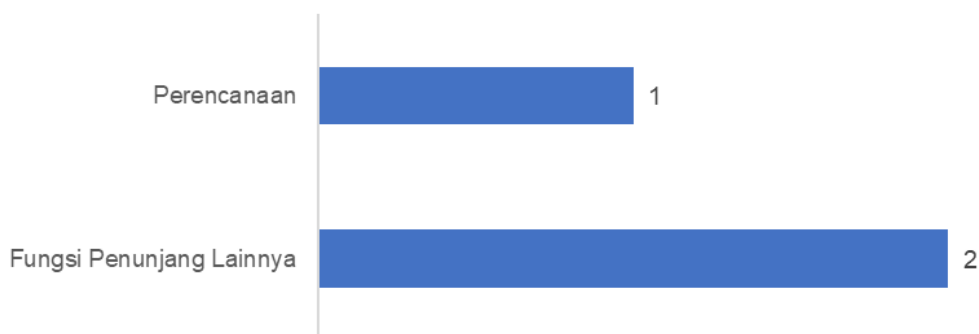
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 109. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sintang

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sintang pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 3 (100%) inovasi. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD, ASN, Kepala Daerah dan Masyarakat.

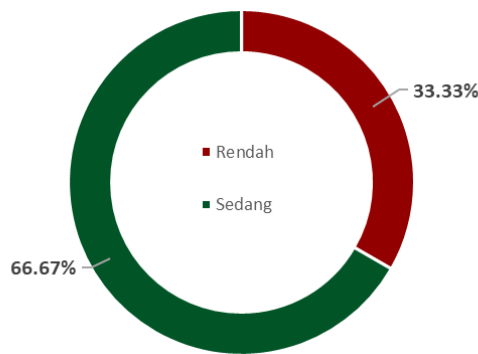
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 110. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sintang

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sintang berdasarkan urusan pemerintahan sangat terbatas. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan 2 inovasi dari 3 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar.

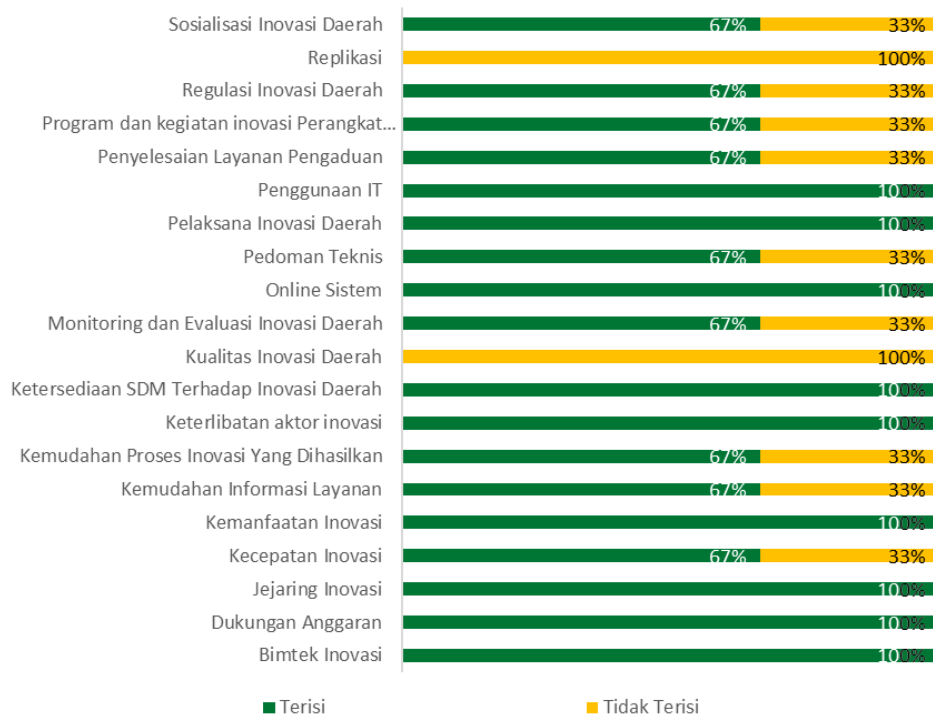
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 111. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sintang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 2 (66.67%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 1 (33.33%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

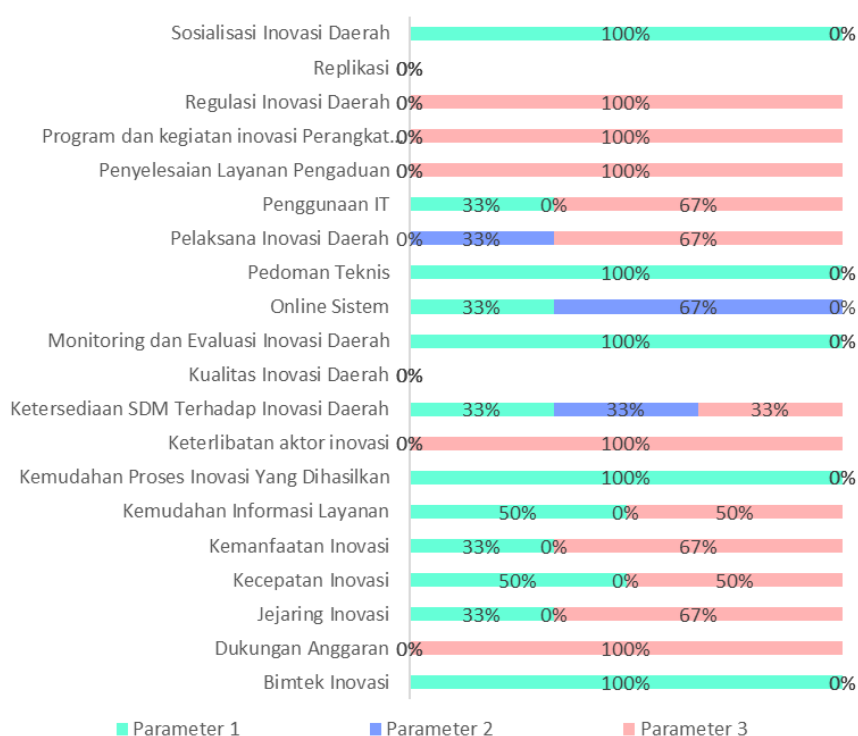


Gambar 112. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sintang

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 75%, artinya dari 3 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Sintang rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 15 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran dan Bimtek Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sintang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi dan Kualitas Inovasi Daerah yaitu 0%, yang berarti bahwa hanya 3 dari 3 inovasi yang dilaporkan tidak menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 113. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator *Online Sistem*, yaitu sebesar 67%, yang berarti bahwa 67% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Monitoring dan

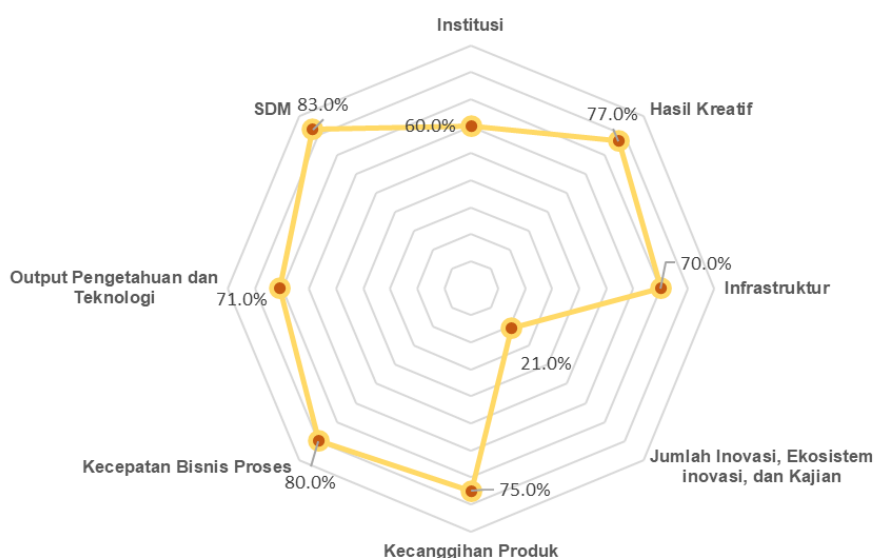
Evaluasi Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sintang beserta Skor Kematangannya

Tabel II Daftar Inovasi Kabupaten Sintang beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Sistem Informasi Pengaduan (SIDUAN) Online | 99 |
| Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2020 | 67 |
| Sistem Informasi Surat Tugas (SITGAS) | 36 |

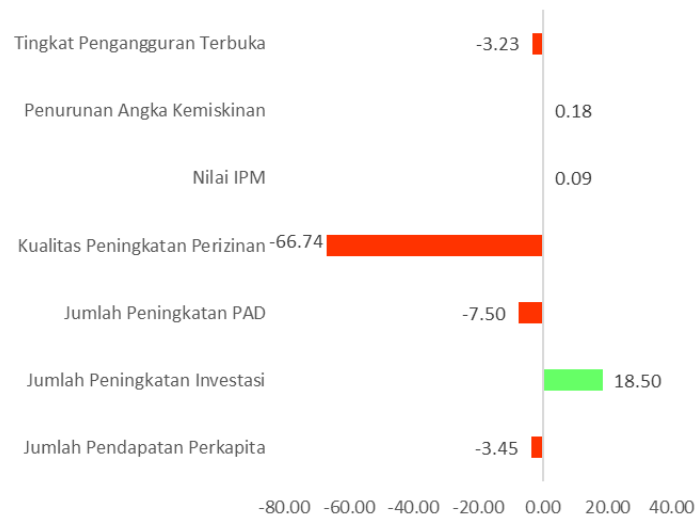
M. KOTA PONTIANAK



Gambar 114. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Pontianak

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Pontianak memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu 83%. Artinya 83% indikator-indikator pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM) sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 21%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



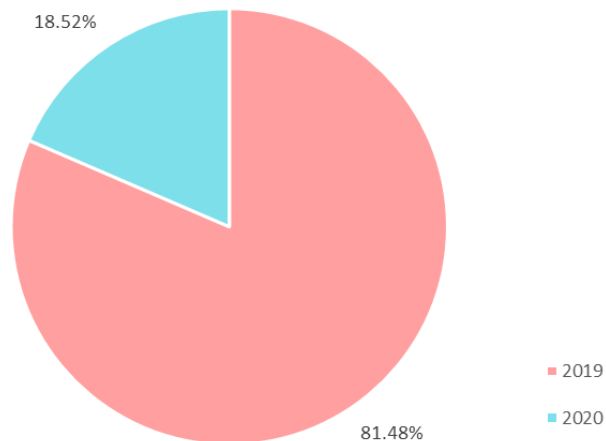
Gambar 115. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pontianak

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pontianak belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 4 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 3.23%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 3.23% dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 0.92%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan, yaitu sebesar 18.50%, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga meningkat sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 3.45% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang turun 1.85%.

Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.18%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.18% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.09%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan signifikan sebesar 66.74%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 66.74% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan parameter standar indeks inovasi daerah yang meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 7.50% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

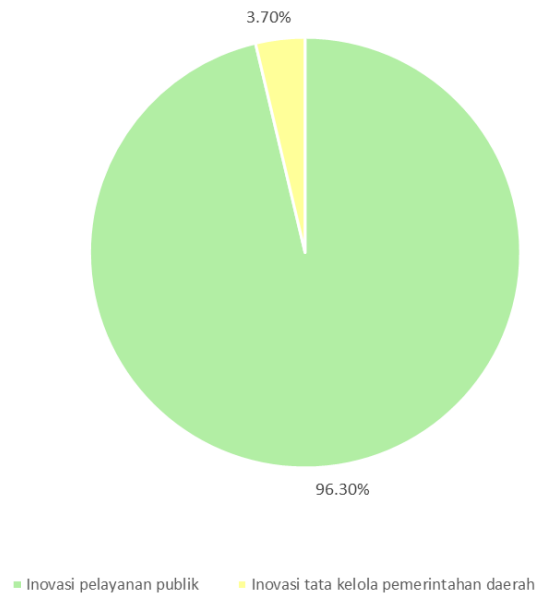
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 116. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kota Pontianak

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Pontianak telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 5 (18.52%) inovasi dari 27 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 22 (81.48%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

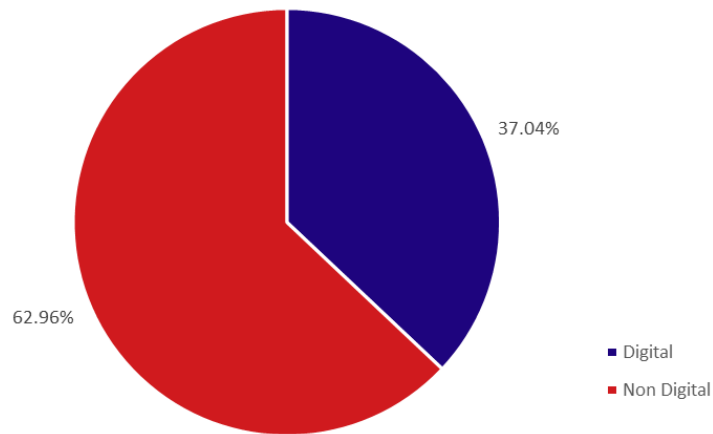
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Pontianak

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Pontianak merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 26 (96.30%) inovasi dari total 27 inovasi. Sedangkan 1 (3.70%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

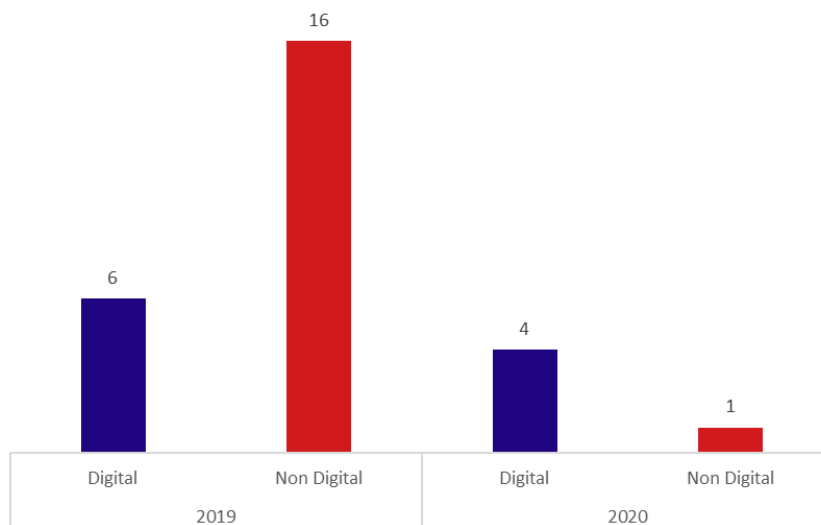
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Pontianak

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 10 (37.04%) dari 27 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Pontianak merupakan inovasi digital, dan 17 (62.96%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

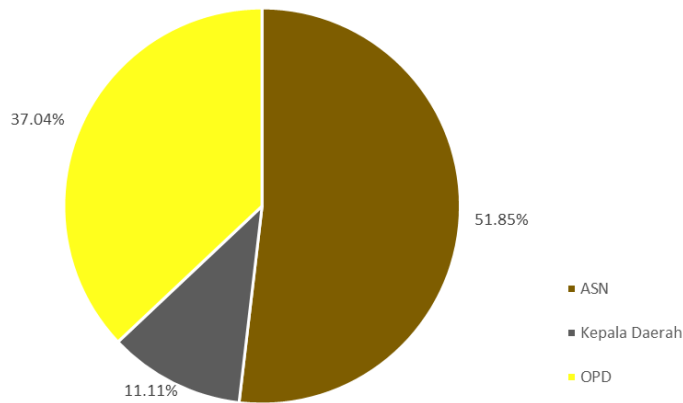
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 119. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Pontianak

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pontianak mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari sejumlah 6 inovasi pada tahun 2019, menjadi 4 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan dari 6 inovasi menjadi 4 inovasi.

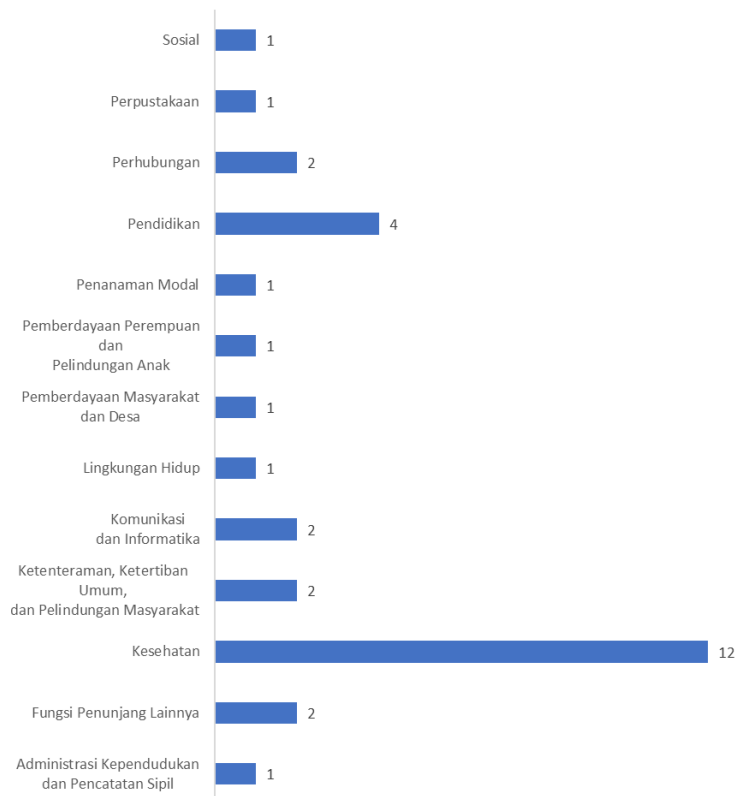
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 120. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Pontianak

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Pontianak pada tahun 2021 diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu sejumlah 12 (51.85%) inovasi. Sedangkan sejumlah 10 (37.04%) inovasi diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan 3 (11.11%) inovasi diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat.

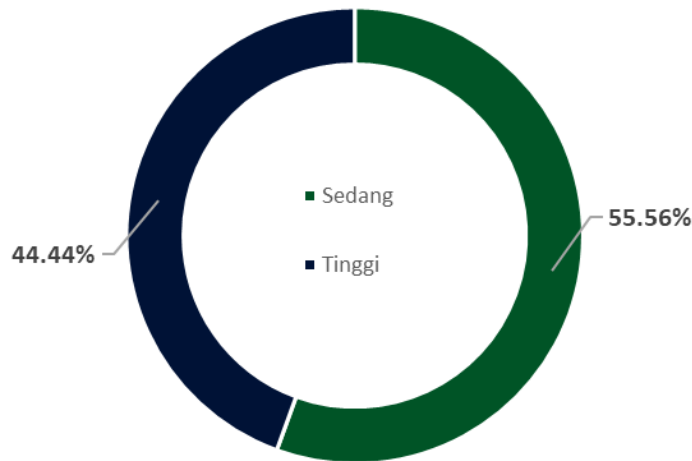
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 121. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Pontianak

Sebaran inovasi daerah pada Kota Pontianak berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 12 inovasi dari 27 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 4 inovasi, urusan kesehatan dengan 12 inovasi. Sementara urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan 2 inovasi serta urusan sosial dengan 1 inovasi. Sementara urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan urusan pekerjaan umum dan tata ruang belum ada.

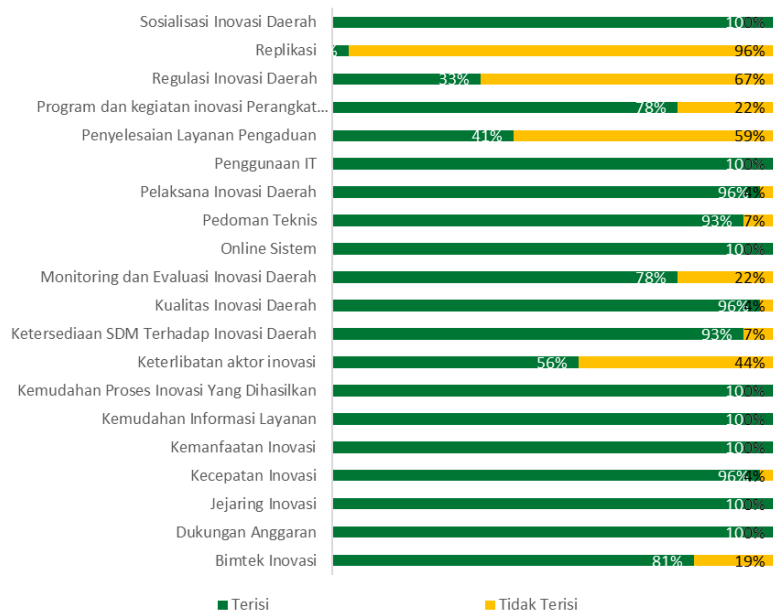
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 122. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Pontianak

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 15 (55.56%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 12 (44.44%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

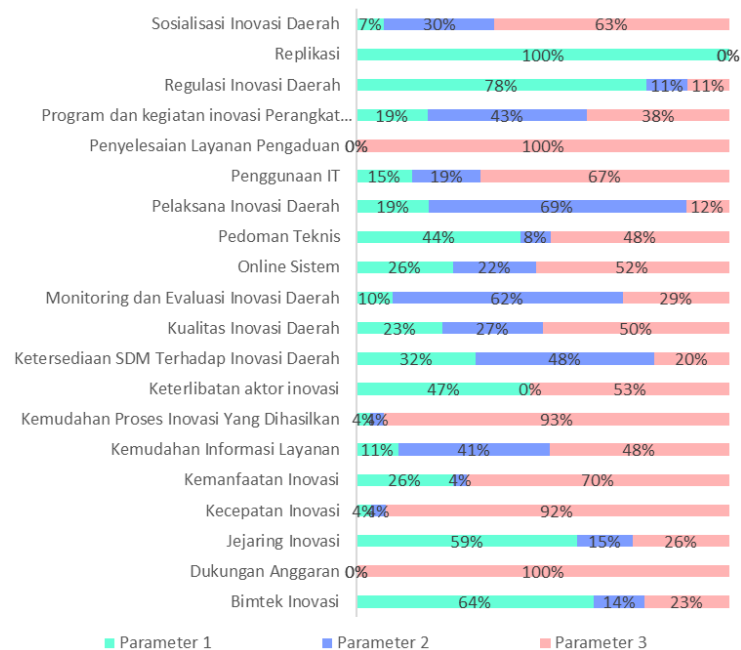


Gambar 123. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pontianak

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 82.22%, artinya dari 27 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kota Pontianak rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 16 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Online Sistem, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Jejarang Inovasi dan Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pontianak telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 4%, yang berarti bahwa hanya 1 dari 27 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 124. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, yaitu sebesar 69%, yang berarti bahwa 69% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

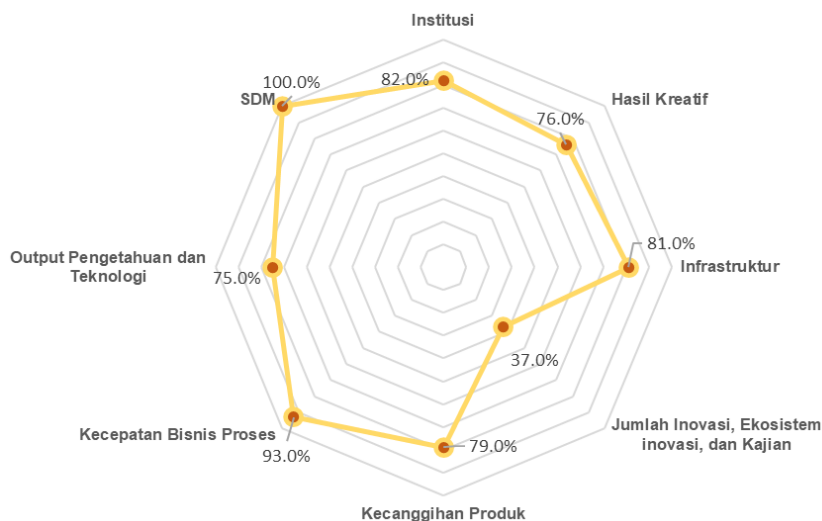
j. Daftar Inovasi Kota Pontianak beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Pontianak beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Satu Data | 123 |
| IMB Pemutihan Cepat, Ramah Pasti Dan Akuntabel (IMUT CERIA) | 119 |
| SIMPONI (Sistem Informasi Pelayanan Online) | 119 |
| CHIP (Cegah Kumuh Tanpa Rusuh Melalui Penertiban Subuh) | 116 |
| BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar) | 113 |
| Sistem Informasi PeLayanan Kesehatan Puskesmas Gang Sehat (SILE KE GANG SEHAT) untuk Pontianak Sehat | 112 |
| GURU MENGAJAR DI TV (GMDTV) | 111 |
| Aplikasi BUNDA PAUD | 108 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Aplikasi JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi) | 107 |
| BALAK (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran) | 107 |
| RUMPON (Rumah Komunitas Pontianak) | 104 |
| SAPA (Sistem Aplikasi Pengawasan Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pontianak Selatan) | 101 |
| PINTA (Pusat Informasi dan Terapi Autis) | 99 |
| Dokter Hewan Keliling (Dokkeling) | 98 |
| Mata LENA (Pemantauan Lalu Lintas yang Efektif, Dinamis dan Akuntabel) | 98 |
| LARA EMAKK (Optimalisasi Layanan perlindungan Respon cepat berEmpati bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan) | 96 |
| SELUSIF | 92 |
| SLRT B'DESUT | 90 |
| CATIN SIAP | 89 |
| Si Bankot Tambah Sapi (Sistem Bank Kompos Tanaman Pemanfaatan Limbah RPH Sapi) | 88 |
| Ketika Orang Saket Baru Sadar (Krocket Blodar) | 88 |
| SEHATI TB (SERVICE HOLISTIK ATASI INFEKSI TB) | 86 |
| Klinik Sehati | 85 |
| DEBAR (Delivery Buku Antar) | 78 |
| Kempita Sahul Bersinar | 74 |
| Stop Pasung | 72 |
| Si Pinky Tolak (Temulawak) Cerdik Sihul | 69 |

N. KOTA SINGKAWANG



Gambar 125. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Singkawang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Singkawang memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu 100%. Artinya seluruh indikator-indikator pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM) sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 37%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 126. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Singkawang

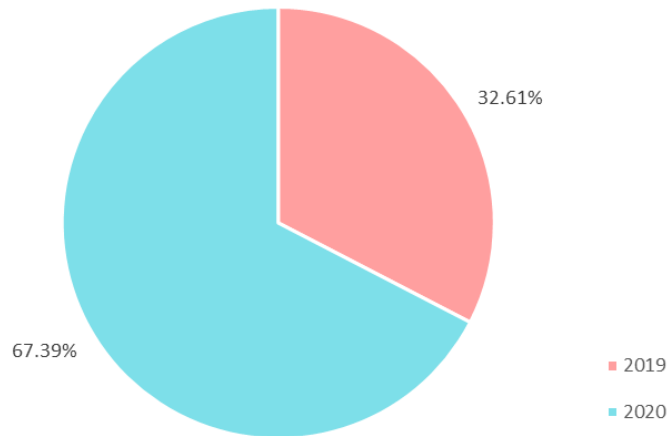
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Singkawang belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 3 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 2.34%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 2.34% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan yang besar, yaitu sebesar 98.24%. Perubahan kedua indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat hanya sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi. seharusnya turun 1.85% bagi jumlah pendapatan per kapita, sedangkan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 2.46% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun perubahan nilai indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun hingga 1.85%.

Empat indikator lain mengalami perubahan positif adalah indikator Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, Kualitas Peningkatan Perizinan, dan Jumlah Peningkatan PAD. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.38%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.38% dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.22%, berbeda dengan standar nasional yang tetap bagi nilai IPM. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami

peningkatan signifikan sebesar 169.33%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 169.33% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 5% bagi kualitas jumlah perizinan. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 16.47% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan standar nasional yang meningkat sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

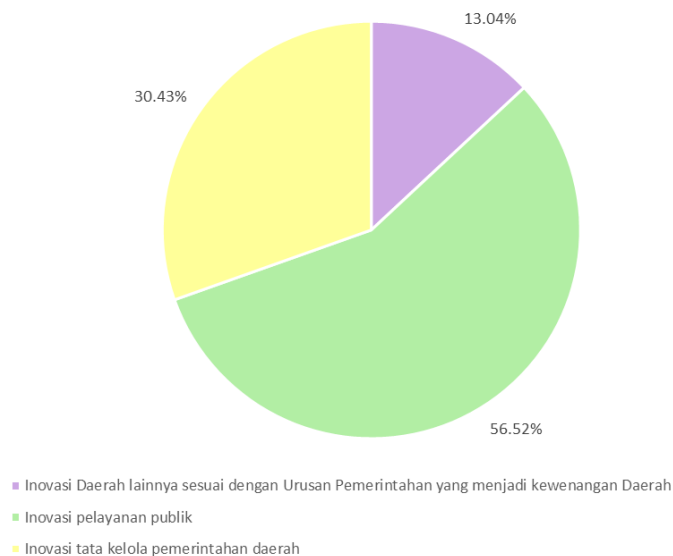
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 127. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kota Singkawang

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Singkawang telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 31 (67.39%) inovasi dari 46 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 15 (32.61%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

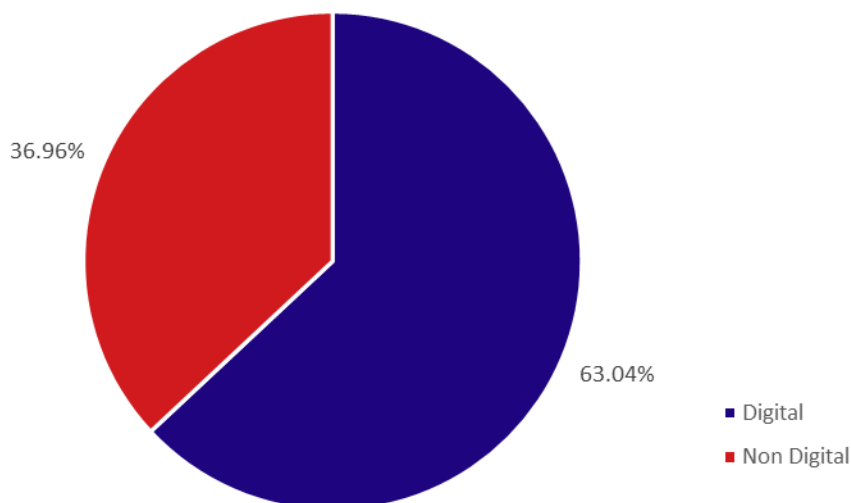
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Singkawang

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Singkawang merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 26 (56.52%) inovasi dari total 46 inovasi. Sedangkan 14 (30.43%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah, dan sejumlah 6 (13.04%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

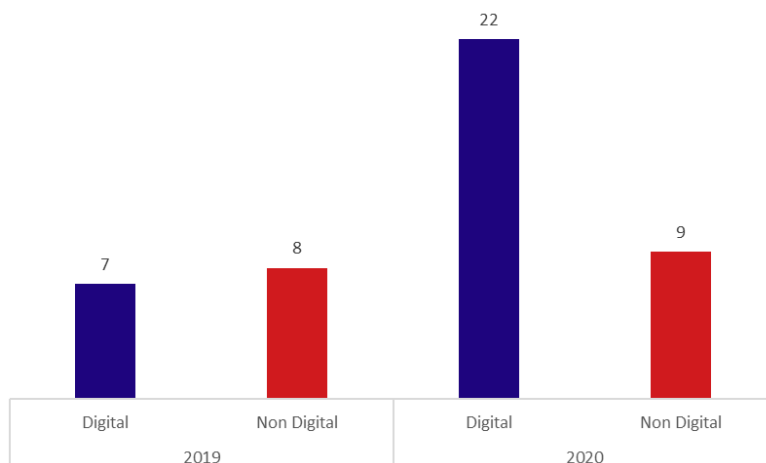
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Singkawang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 29 (63.04%) dari 46 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Singkawang merupakan inovasi digital, dan 17 (36.96%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

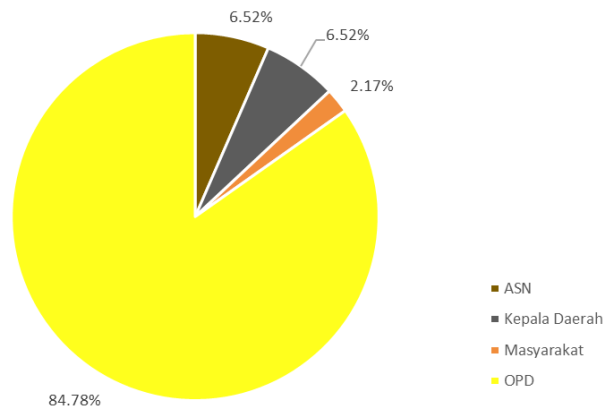


Gambar 130. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Singkawang

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kota Singkawang mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, maupun inovasi non digital. Dapat

dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami kenaikan dari sejumlah 7 inovasi pada tahun 2019, menjadi 22 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami kenaikan dari 8 inovasi menjadi 9 inovasi.

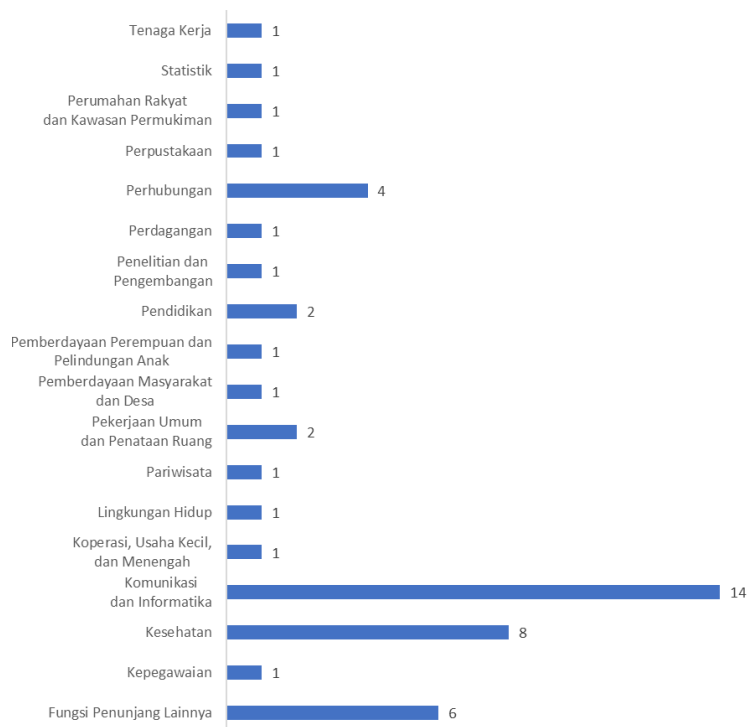
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 131. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Singkawang

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Singkawang pada tahun 2021 diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 39 (84.78%) inovasi. Sedangkan sejumlah 3 (6.52%) inovasi diinisiasi oleh ASN dan kepala daerah dan 1 (2.17%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 132. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Singkawang

Sebaran inovasi daerah pada Kota Singkawang berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan komunikasi dan informatika dengan 14 inovasi dari 46 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 2 inovasi, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan 1 inovasi, urusan pekerjaan umum dan tata ruang dengan 2 inovasi, urusan kesehatan 1 inovasi. Sementara urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial belum ada.

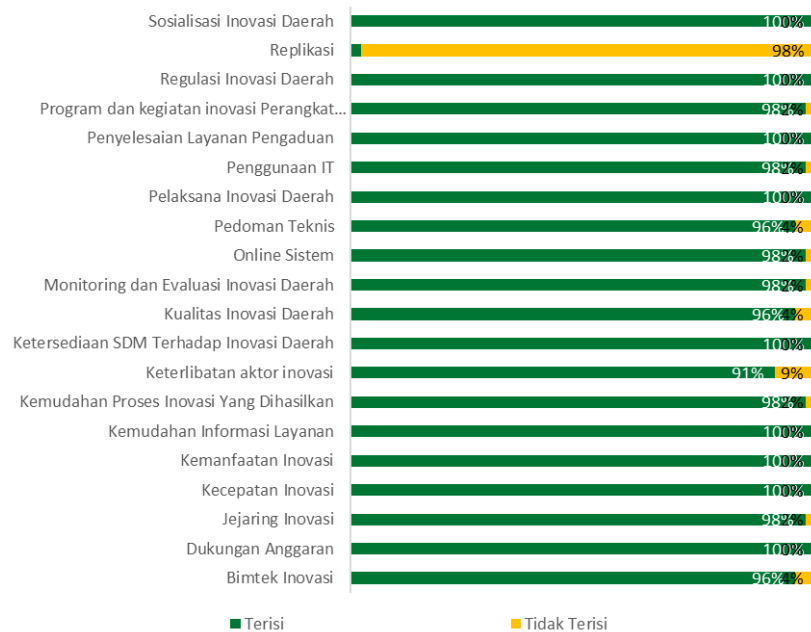
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 133. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Singkawang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 1 (2.17%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 45 (97.83%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

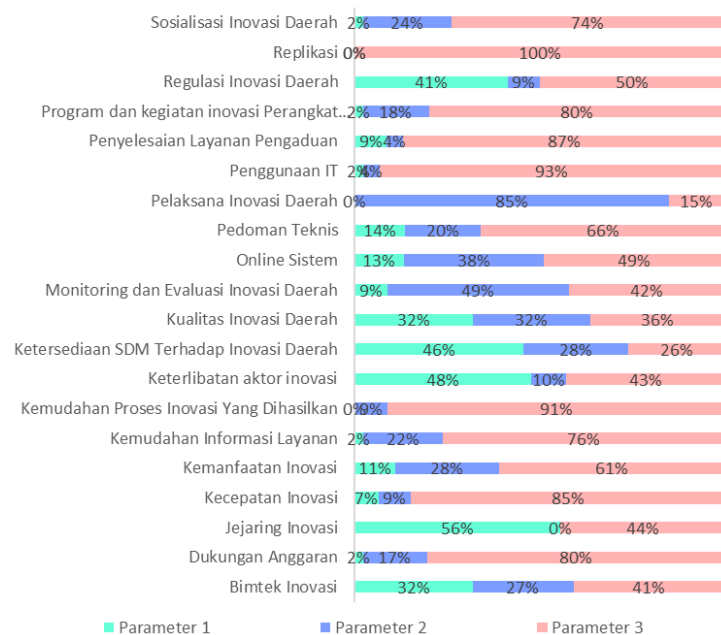


Gambar 134. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Singkawang

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 93.37%, artinya dari 46 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kota Singkawang rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 19 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi, Regulasi, Pelaksana, Ketersediaan SDM Terhadap inovasi daerah, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan dan Kecepatan Inovasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan dan Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Singkawang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 2%, yang berarti bahwa hanya 1 dari 46 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 135. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, yaitu sebesar 85%, yang berarti bahwa 85% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Jejaring Inovasi yaitu sebesar 56% yang berarti bahwa sebesar 56% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Singkawang beserta Skor Kematangannya

Tabel 13 Daftar Inovasi Kota Singkawang beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online | 130 |
| SATU DATA TINGKAT DAERAH | 128 |
| BINAKASI (Pembinaan dan Advokasi PBJ) | 128 |
| ONE STOP PORTAL | 127 |
| E-TICKET TCM ROOM | 125 |
| KAWA ORI (KLINIK ADMIN WEBSITE E-GOVERNMENT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH) | 125 |
| APLIKASI SISTEM TATA RUANG (SIMTARU) | 123 |
| POJOK PINTAR MASHAMI | 123 |
| TECHNICAL SUPPORT | 122 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| TRI IN ONE | 121 |
| ALAMI (ANDA LAPOR KAMI TINDAK LANJUT) | 121 |
| Kampung Mesen | 121 |
| SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN | 119 |
| SIHEBAT (SINGKAWANG HEBAT) | 119 |
| RASA ELIT (GERAKAN BERSAMA ELIMINASI TUBERKOLOSIS) | 119 |
| TUAH SUANTIK (SATU RUMAH SATU JURU PEMANTAU JENTIK) | 119 |
| SIMETRO (JARINGAN INTRANET METRO) | 118 |
| CAFE CERIA (Cegah Anemia dengan FE Agar Cantik, Energik,Riang dan Aktif) | 118 |
| GERTAKIN JEBOL (Gerakan Serentak Inovasi Jemput Bola) | 116 |
| SIWIFI HEBAT | 116 |
| Bukusaku Edukasi Lalu lintas Usia Dini (BELUD) | 116 |
| Marketing Business Center (MBC) Kota Singkawang | 115 |
| SIDALMENTEL (SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI) | 115 |
| CCTV PANTAU KOTA | 115 |
| MORNING-TV (Monitoring Jaringan CCTV) | 115 |
| Traffic Control Room | 115 |
| Mall Pelayanan Publik Kota Singkawang | 114 |
| Quick Information System (QIS) | 114 |
| LOKER KITE (LOWONGAN KERJA KITE) | 114 |
| E-OFFICE | 114 |
| APEKE IMUT (Asesmen Petugas Kelengkapan Indikator Mutu) | 113 |
| LAMORA (Layanan Mobil Jemput Pajak Daerah) | 112 |
| Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) | 112 |
| SIAN LINE (Sistim Informasi Antrian Online) | 111 |
| DISEK_LALU (Digitalisasi Informasi Sistem Edukasi Keselamatan Lalu Lintas) | 111 |
| Pojok Pintar | 109 |
| Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) | 109 |
| LHKPN SINGKAWANG 100% | 108 |
| SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Singkawang | 107 |
| NOC (NETWORK OPERATION CENTER) | 107 |
| Probit Audit | 107 |
| E-AGENDA | 106 |
| DEDIKASI PILAR KITA (DETEKSI DINI, KUNJUNGAN, ADVIS, SKRINING INTEGRASI PTM, IVA, LANSIA, AIDS/HIV, REMAJA, KUSTA, IMS, TBC, JIWA) | 106 |
| Kelompok PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) | 106 |
| CCTV ANALYTIC | 101 |
| MULTI PAYMENT ONLINE | 97 |

BAB III

PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Kalimantan Barat terdapat 13 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. Kota Singkawang

Kota Singkawang yang memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 70,63 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan refleksi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, Bantuan HKI. Namun Provinsi Kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada kota Singkawang melalui Refleksi inovasi, melakukan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi provinsi, eksepsi dan konferensi seminar dan penghargaan inovasi.

B. Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu raya yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 56,62 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kubu raya melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

C. Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 56,51 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sambas melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. Kota Pontianak

Kota Pontianak yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 56,00 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada kota Pontianak melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 55,01 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sanggau melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

F. Kabupaten Sekadau

Kabupaten Sekadau yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 48,84 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sekadau melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. Kabupaten Ketapang

Kabupaten ketapang yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 48,52 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Ketapang melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 41,57 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sintang melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang yang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 36,74 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi kalimantan Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bengkayang melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

J. Kabupaten Melawai

Kabupaten Melawai yang memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 28,22 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi kalimantan Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Melawai melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

K. Kabupaten Landak

Kabupaten Landak yang memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 23,48 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi kalimantan Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Landak melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

L. Kabupaten Mempawah

Kabupaten Mempawah yang memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 11,96 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi kalimantan Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Mempawah melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis.

M. Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten kayong Utara yang memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 9,00 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kayong Utara melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.